



Disidik Kasus Suap Pajak, Bank Panin Hormati Proses Hukum



Siloam Hospitals Group Dukung Vaksinasi Lansia di Jakarta

RAHMAD PRIBADI Bisnis Harus Membawa Berkah bagi Masyarakat



# INVESTOR DAILY

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

SENIN 8 MARET 2021

## NATIONAL & POLITICS

# UU Ciptaker Mulai *Nendang*



Agus Harimurti Yudhoyono

### AHY: KLB Jadi Ujian Masa Depan Demokrasi Indonesia

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kongres luar biasa di Deli Serdang serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

>> 14



Airlangga Hartarto

Sofyan Djajil

Ida Fauziah

Teten Masduki

Hariyadi Sukamdani

Shinta Widjaja Kamdani

David Sumual

Iskandar Simorangkir

Tauhid Ahmad

Oleh Triyan Pangastuti, Leonard AL Cahyoputra, dan Thomas Harefa

JAKARTA – *Game changer* Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai mulai *nendang*, setelah peraturan pelaksanaan berupa 51 PP dan perpres rampung diterbitkan pada Desember hingga Februari lalu. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lahir dari *omnimus law* ini telah dibentuk dengan setoran modal pemerintah Rp 75 triliun, yang diproyeksikan menarik investasi asing maupun dalam negeri Rp 225 triliun untuk tahap pertama.

### Target Penerapan UU Cipta Kerja:

- Ekonomi tumbuh 5,7-6% per tahun.
- Menciptakan lapangan kerja 2,7 juta hingga 3 juta per tahun dari saat ini 2 juta per tahun untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja, terdiri atas 7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru.
- Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.
- Meningkatkan produktivitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia masih 74,4%, di bawah rata-rata negara Asean sebesar 78,2%.
- Meningkatkan investasi 6,6-7,0%.
- Mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4-5,6%.
- Memberdayakan UMKM dan koperasi, sehingga kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB naik masing-masing menjadi 65% dan 5,5%.
- Mencegah berpindahnya lapangan kerja ke negara lain yang lebih kompetitif.
- Mencegah semakin turunnya daya saing pencari kerja di dalam negeri yang saat ini relatif rendah dibanding negara lain.
- Mencegah angka pengangguran.
- Mencegah Indonesia terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).
- Menekan ekonomi biaya tinggi pada kegiatan investasi. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Indonesia pada 2019 berada di level 6,77%, lebih buruk dari 2018 di posisi 6,44%, jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di Asean yang mencapai 3%.

Sumber: Kemenko Perekonomian

mencakup 15 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah; PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan; PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian; PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; serta PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan.

Bersambung ke hal 2

investor.id

## MATAHARI

### MACRO ECONOMICS

### Potensi Paket Pengadaan Pemerintah bagi UMK Capai Rp 478 Triliun

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan, potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, dan kecil (UMK) serta koperasi pada 2021 ini mencapai Rp 478 triliun.

>> 6

### MARKETS & CORPORATE

### Grup Indomobil Incar Pinjaman US\$ 200 Juta

PT Indomobil Finance Indonesia, anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), menjajaki *club deal loan* senilai US\$ 200 juta. Perseroan telah mengemukakan penggalangan pinjaman tersebut kepada para bankir dan diharapkan bisa disepakati pada April 2021.

>> 15



#LEBIH AMAN DI RUMAH

# Stimulus Jumbo di AS Jadi Sentimen Positif IHSG

Oleh Gita Rossiana

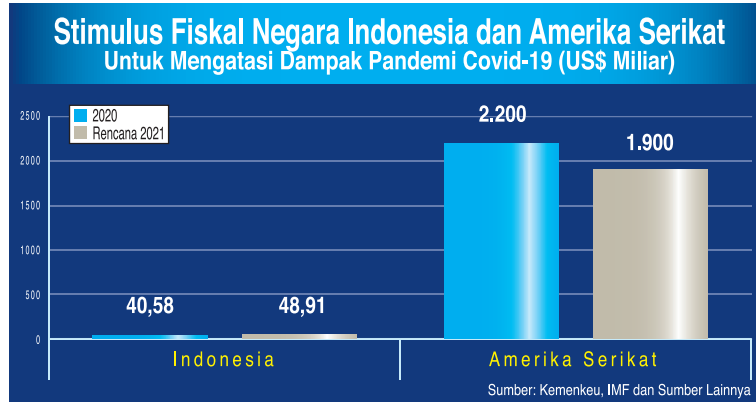
JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi menguat terbatas pekan ini. Penguatan indeks antara lain bakal ditopang oleh sentimen positif yang berasal dari pengesahan paket stimulus jumbo di Amerika Serikat (AS) senilai US\$ 1,9 triliun.

Hal itu diungkapkan analis PT Philip Sekuritas Anugerah Zamzami, analis PT Binaartha Sekuritas M Nafan Aji, Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee, serta Associate Director of Research Investment PT Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus. Mereka



Joe Biden

dihubungi *Investor Daily* secara terpisah di Jakarta, Minggu (7/3). Pada perdagangan Jumat (5/3), IHSG ditutup melemah 32,05 poin



(0,51%) ke level 6.258,74. Pelemahan IHSG terjadi sejalan dengan aksi jual saham secara masif oleh investor asing. Investor asing membukukan

jual bersih (*net sell*) senilai Rp 957,06 miliar di seluruh pasar. Alhasil, total beli bersih (*net buy*) saham oleh investor asing selama tahun berjalan

(*year to date/ ytd*) berkurang menjadi Rp 14,20 triliun. Adapun IHSG selama tahun berjalan masih positif 4,68%.

Analisis PT Philip Sekuritas, Anugerah Zamzami mengungkapkan, pengesahan paket stimulus senilai US\$ 1,9 triliun akan mempercepat pemulihan ekonomi di AS dan menambah likuiditas di pasar. "Paket stimulus ini juga bisa berdampak secara tidak langsung terhadap IHSG melalui peningkatan performa Wall Street dan derasnya dana asing yang masuk ke pasar saham domestik," ujar dia.

Bersambung ke hal 12

BERITA SATU .COM

BUMN UNTUK INDONESIA

# livein by mandiri

mandiridigital



STIMULUS COVID-19 US\$ 1,9 TRILIUN

# DPR AS akan Sahkan pada Selasa

Oleh Iwan Subarkah Nurdiawan

WASHINGTON – Senat Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (6/3) mengesahkan paket stimulus Covid-19 senilai US\$ 1,9 triliun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai kubu Demokrat bergerak cepat dan menjadwalkan Selasa (9/3) sebagai hari pemungutan suara untuk pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

Lalu akan diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani dan sebagai UU, sebelum batas waktu 14 Maret 2021 untuk memperpanjang program-program bantuan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19. Paket stimulus ini disahkan di Senat dengan suara 50-49. Kubu Republik tetap mempertanyakan perlunya belanja besar lagi, karena stimulus sebelumnya baru saja disahkan pada Desember 2020, masih di masa pemerintahan

Donald Trump. Adapun paket sebesar US\$ 1,9 triliun ini adalah paket penyelesaian kedua terbesar dalam sejarah AS, setelah paket stimulus CARES Act senilai US\$ 2 triliun, yang disahkan tahun lalu di puncak pandemi tersebut. Legislatif senilai US\$ 1,9 triliun ini akan mencakup bantuan langsung sampai US\$ 1.400 kepada sebagian besar rakyat AS. Lalu tunjangan pengangguran US\$ 300 per pekan sampai September 2021. Dan perpanjangan

kredit pajak anak selama satu tahun. Juga alokasi sebesar US\$ 350 miliar untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah. Serta bantuan US\$ 130 miliar untuk sekolah-sekolah. Kemudian akan tersedia anggaran sebesar US\$ 49 miliar untuk memperluas riset, pelacakan, dan pengetesan Covid. Serta US\$ 14 miliar untuk distribusi vaksinya. Selain itu juga akan ada anggaran untuk bantuan sewa hunian bagi rumah tangga yang kesulitan keuangan karena pandemi Covid. Paket ini pun mencakup US\$ 14 miliar bantuan gaji bagi maskapai-maskapai penerbangan AS. Lalu ada putaran ketiga bantuan federal untuk industri, dengan balasan mereka tidak merumahkan atau memangkas gaji karyawannya sampai 30 September 2021. Sementara para kontraktor maskapai penerbangan akan mendapatkan dana bantuan senilai US\$ 1 miliar. Biden menyebut disahkannya paket stimulus ini sebagai langkah raksasa untuk pemulihan ekonomi AS pasca-pandemi. "Saya sudah berjanji kepada rakyat Amerika bahwa bantuan segera tiba.



Paus di Irak

Foto yang dirilis kantor media Vatikan ini memperlihatkan Paus Fransiskus melepas seekor merpati putih di lapangan dekat reruntuhan Gereja Katolik Syriak Al Tahira I Kubra di kota tua Mosul, Irak, Minggu (7/3).

Hari ini, saya dapat mengatakan kita telah mengambil langkah raksasa lagi untuk memenuhi janji tersebut. Ini jelas tidak mudah. Dan memang tidak selalu mudah. Tapi ini teramat sangat dibutuhkan," ujar Biden, dalam konferensi pers di Gedung Putih di Washington, Sabtu. **Kemenangan** Walau tanpa mencakup janji utama Biden yang lain, yakni menaikkan upah minimum menjadi US\$ 15 per jam, paket stimulus ini merupakan kemenangan bagi Biden dan Demokrat. Karena pemulihan pascapandemi

adalah prioritas kebijakan-kebijakan progresifnya, sementara pandemi telah menewaskan lebih dari 500.000 orang di AS dan membuat perekonomian terpuruk. Ketua Senat Demokrat Chuck Schumer berjanji bahwa paket stimulus itu akan memberikan bantuan lebih banyak kepada lebih banyak orang. "Lebih dibandingkan yang sudah diberikan oleh pemerintahan federal AS dalam sepuluh tahun terakhir," ujar dia. Persetujuan Senat itu juga merupakan buah dari inisiatif legislatif pertama pemerintahan Biden. Wa-

laupun Republik dan sebagian ekonomi mengkritik cakupannya karena program vaksinasi Covid di AS terus meningkat, Demokrat beralih paket tersebut tetap dibutuhkan agar pemulihan tidak lamban dan ekonomi tidak terpuruk lagi di masa depan. "Kita akan mengakhiri pandemi menyakitkan ini dan kita akan dapat bepergian lagi, anak-anak kita bisa sekolah lagi dan bermain bersama lagi. Tugas kita sekarang adalah membantu negara kita keluar dari badai menuju masa depan yang cerah," kata Schumer. (afp/sumber lain)

## UU Ciptaker Mulai Nendang

Sumbangan dari hal 1

Kedua, klaster Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) mencakup 4 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseoran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; serta PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ketiga, klaster Investasi terdiri atas 5 PP dan 1 perpres. Ini adalah PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; serta Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keempat, klaster Ketenagakerjaan mencakup 4 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; serta PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kelima, klaster Fasilitas Fiskal mencakup 3 PP, yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; serta PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

Keenam, klaster Penataan Ruang mencakup 3 PP dan 1 perpres. Ini terdiri atas PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial; serta Perpres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Ketujuh, klaster Lahan dan Hak Atas Tanah 5 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; serta PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Kedelapan, klaster Lingkungan

PP dan Perpres Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terdiri Atas 11 Kluster			
<b>I. Kluster Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
1.	PP No 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Feb 2021	
2.	PP No 6/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	2 Feb 2021	
3.	PP No 23/2021 Penyelenggaraan Kehutanan	2 Feb 2021	
4.	PP No 26/2021 Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2 Feb 2021	
5.	PP No 28/2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian	2 Feb 2021	
6.	PP No 27/2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	2 Feb 2021	
7.	PP No 29/2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	2 Feb 2021	
8.	PP No 29/2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	2 Feb 2021	
9.	PP No 30/2021 Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Feb 2021	
10.	PP No 31/2021 Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	2 Feb 2021	
11.	PP No 32/2021 Penyelenggaraan Bidang Penerbangan	2 Feb 2021	
12.	PP No 33/2021 Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	2 Feb 2021	
13.	PP No 38/2021 Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Basah Umrah	2 Feb 2021	
14.	PP No 46/2021 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	2 Feb 2021	
15.	PP No 47/2021 Penyelenggaraan Bidang Perumahan	2 Feb 2021	
<b>II. Kluster Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
16.	PP No 7/2021 Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 Feb 2021	
17.	PP No 8/2021 Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseoran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil	2 Feb 2021	
18.	PP No 11/2021 Badan Usaha Milik Desa	2 Feb 2021	
19.	PP No 39/2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	2 Feb 2021	
<b>III. Kluster Investasi</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
20.	PP No 73/2020 Modal awal Lembaga Pengelola Investasi	14 Des 2020	
21.	PP No 74/2020 Lembaga Pengelola Investasi	14 Des 2020	
22.	PP No 42/2021 Kemudahan Proyek Strategis Nasional	2 Feb 2021	
23.	PP No 44/2021 Pelaksanaan Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2 Feb 2021	
24.	PP No 48/2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	2 Feb 2021	
25.	Perpres No 10/2021 Bidang Usaha Penanaman Modal	2 Feb 2021	
<b>IV. Kluster Ketenagakerjaan</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
26.	PP No 34/2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1 Apr 2021	
27.	PP No 35/2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	2 Feb 2021	
28.	PP No 36/2021 Pengupahan	2 Feb 2021	
29.	PP No 37/2021 Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	2 Feb 2021	
<b>V. Kluster Fasilitas Fiskal</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
30.	PP No 9/2021 Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	2 Feb 2021	
31.	PP No 10/2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan	2 Feb 2021	
32.	PP No 49/2021 Penyelenggaraan Bidang Perumahan	2 Feb 2021	
<b>VI. Kluster Penataan Ruang</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
33.	PP No 21/2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Feb 2021	
34.	PP No 43/2021 Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah	2 Feb 2021	
35.	PP No 45/2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial	2 Feb 2021	
36.	Perpres No 11/2021 Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	2 Feb 2021	
<b>VII. Kluster Lahan dan Hak Atas Tanah</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
37.	PP No 17/2021 Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	2 Feb 2021	
38.	PP No 18/2021 Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	2 Feb 2021	
39.	PP No 19/2021 Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	2 Feb 2021	
40.	PP No 20/2021 Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar	2 Feb 2021	
41.	PP No 24/2021 Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan	2 Feb 2021	
<b>VIII. Kluster Lingkungan Hidup</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
42.	PP No 22/2021 Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Feb 2021	
<b>IX. Kluster Konstruksi dan Perumahan</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
43.	PP No 1/2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Feb 2021	
44.	PP No 13/2021 Penyelenggaraan Rumah Susun	2 Feb 2021	
45.	Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	2 Feb 2021	
46.	PP No 15/2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelak	2 Feb 2021	
47.	PP No 16/2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Sertifikat Gedung	2 Feb 2021	
48.	Perpres No 9/2021 Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan	2 Feb 2021	
<b>X. Kluster Kawasan Ekonomi</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
49.	PP No 40/2021 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	2 Feb 2021	
50.	PP No 41/2021 Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	2 Feb 2021	
<b>11. Kluster Barang dan Jasa Pemerintah</b>			
Nomor	Tentang	Tanggal berlaku	
51.	Perpres No 12/2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peraturan Sarung Jas Pemerintah	2 Feb 2021	

Hidup 1 PP, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesembilan, klaster Konstruksi dan Perumahan mencakup 5 PP dan 1 perpres. Ini terdiri atas PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Arsitek; PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; serta Perpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Kesepuluh, klaster Kawasan Ekonomi mencakup 2 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; serta PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kesebelas, klaster Barang dan Jasa Pemerintah berupa 1 perpres, yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Diminati UAE** Pada kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UAE) Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei mengatakan sebelumnya, pihaknya tertarik berinvestasi pada lembaga SWF Indonesia yang juga bernama Indonesia Investment Authority (INA). Negara kaya di Timur Tengah itu tengah mengkaji proyek-proyek yang menjadi sasaran. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebelumnya, SWF sudah mendapatkan komitmen investasi dari banyak pihak, senilai sekitar US\$ 9,5 miliar Rp133

triliun hingga awal Februari lalu. Investor asing itu berasal dari sejumlah negara, antara lain, Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Kanada melalui Caisse de depôt et placement du Québec (CDPQ), perusahaan pengelolaan aset Belanda yakni AFG-Netherlands, dan dari Amerika Serikat. Ia mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, salah satunya dengan reformasi regulasi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah juga menawarkan beragam insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor agar menempatkan dananya pada sektor bisnis prioritas, sehingga dapat mendorong investasi di Indonesia. Airlangga sebelumnya menyebut undang-undang tersebut akan menjadi *game changer* kedua bagi perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sedangkan *game changer* pertama adalah vaksinasi Covid-19 secara nasional. "UU Ciptaker juga menjadi *game changer*, melalui reformasi struktural dan ekonomi. Perubahan ini tepat untuk membantu mengurangi dampak negatif dari PHK, yang dirumahkan, atau dikurangi jam kerjanya," ujar Airlangga.

**Bantu UMKM** Airlangga juga memastikan UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong investasi sektor jumbo, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Senada, Direktur Eksekutif Indef Tuhid Ahmad menilai, dari PP dan perpres pelaksana UU Ciptaker tersebut, yang paling efektif dan paling berpengaruh positif untuk pemulihan ekonomi adalah aturan-aturan mengenai perizinan terutama untuk UMKM, serta pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah lahan. "UMKM hambatanannya dari regulasi sudah dipermudah, UMKM juga memerlukan dukungan dari sisi implementasi regulasi untuk pemberdayaan, akses ke *market*, dan *financing*. Implementasi untuk mengawal hal tersebut butuh konsistensi dari pemerintah, karena butuh alokasi

anggaran pemerintah, serta dukungan perbankan dalam hal kredit," kata dia. Di sisi lain, lanjut dia, ada juga yang akan menjadi batu sandungan dalam implementasi, misalnya soal lahan. "Kalau pemerintah daerah tidak segera menyiapkan keputusan soal tata ruang dan sebagainya, penanganannya akan diambil alih pemerintah pusat. Kalau itu terjadi, implikasinya akan terjadi penolakan di lapangan, karena daerah tidak dilibatkan dalam proses itu. Jadi, intinya adalah problem eksekusi, karena Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi syarat untuk kewajiban penempatan dan lokasi di mana yang diperbolehkan untuk digunakan," kata Tuhid. Dia menjelaskan, biaya pembuatan RDTRK juga mahal. Selain itu, keputusan-keputusan mengenai penggunaan lahan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah yang perlu dibahas di tingkat legislatif pada umumnya membutuhkan waktu. Tuhid mengatakan, ada pula tantangan dalam UU Cipta Kerja mengenai perburuhan. Menurut dia, masih ada 7 poin yang perlu segera diperbaiki. "Jadi nanti yang mesti dipermudah bukan hanya soal upah, tapi hal lainnya berkaitan ketenagakerjaan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, turunan dari UU Cipta Kerja ada perpres dengan banyak lampiran, lampiran pertama berkaitan dengan fasilitas atau insentif yang diberikan pemerintah, kedua berkaitan dengan UMKM, dan ketiga adalah persyaratan tertentu. Yang akan menjadi masalah adalah persyaratan tertentu tersebut, karena membutuhkan persiapan, tidak cukup hanya perpres," ujar Tuhid. Beleid tersebut, lanjut dia, memerlukan juga teknis atau petunjuk teknis dan juklak atau petunjuk pelaksanaan. Ini berarti tetap harus ada peraturan menteri (permen) dan harus menunggu lagi sampai permen diterbitkan. **Kuartal I Positif** Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemeko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, sejak pemerintah resmi menerbitkan 51 peraturan pelaksana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *omnibus law* tersebut telah memiliki dampak positif, khususnya bagi pelaku UMKM. "Aturan turunan tersebut terdiri dari 47 PP dan 4 perpres. Setahu di bidang saya, banyak UMKM yang memanfaatkan pendaftaran perizinan tunggal," ujar Iskandar Simorangkir kepada *Investor Daily*, Minggu (7/3). Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tercantum dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Beleid ini mulai berlaku per 2 Februari 2021. Mengacu dalam PP pasal 43, lanjut dia, pemerintah pusat menyelenggarakan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. "Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah, diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal," ucapnya. Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong dan mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal I ini mulai positif. Sebelumnya, setelah terjadi pandemi Covid-19 pada awal Maret tahun lalu, ekonomi Indonesia mulai berkontraksi 5,32% kuartal II-2020, 3,49% pada triwulan III-2020, dan 2,19% pada triwulan IV-2020. "Pemerintah *kan* sudah mengeluarkan beragam stimulus kebijakan untuk digenjet di kuartal I ini. Misalnya, insentif sektor properti diberikan dalam bentuk diskon pajak pertambahan nilai (PPN)," tuturnya. Kebijakan itu diklasifikasikan dalam dua skema. Pertama, diskon 100% alias bebas PPN untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun paling tinggi Rp 2 miliar. Kedua, diskon 50% PPN untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Sementara itu, untuk insentif PPn-BM mobil diberikan sejak masa pajak Maret hingga masa pajak Desember 2021. Relaksasi pajak ini berlaku untuk jenis mobil di bawah 1.500 cc dengan tipe mobil sedan dan gardan tunggal 4x2. Lebih lanjut, Iskandar menilai bahwa pada pekan pertama Maret 2021, geliat aktivitas ekonomi mulai meningkat, setelah menurun pada Februari sejalan dengan pelaksanaan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM). "Minggu pertama Maret ini sudah mulai meningkat aktivitas ekonomi. Kredit usaha rakyat (KUR) juga mulai meningkat *disbursement* pada minggu I pertama Maret ini," tandasnya.

**Kadin Nilai Positif** Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sebelumnya, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah menyelesaikan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. "Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya bergerak cepat merampungkan aturan pelaksana tersebut di awal-awal tahun ini. Dengan demikian, kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk mempromosikan dan memaksimalkan pelaksanaan UU Cipta Kerja di tahun ini," katanya. Dia menilai, konsep besar dalam UU Cipta Kerja telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana tersebut, sehingga sebagian besarnya sudah bisa dioperasikan atau diimplementasikan di lapangan. Kadin juga akan terus membantu mengawal pelaksanaannya, bukan saja untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, tetapi juga membantu promosi investasi pemerintah dan

memberikan asistensi yang dibutuhkan bagi calon-calon investor untuk memanfaatkan UU Cipta Kerja. Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djailil pernah menyebutkan, UU Cipta Kerja mengentalkan konsep baru pertahanan, salah satunya aturan untuk pemanfaatan ruang bawah tanah (*under ground cluster*). Sofyan Djailil mengatakan bahwa aturan mengenai hak bawah tanah diatur dalam UU Cipta Kerja dengan mempertimbangkan perkembangan perkotaan, serta semakin dibutuhkan ruang bawah tanah di bawah tanah. "Dengan ada MRT, nanti macam-macam fasilitas di bawah tanah, kota semakin berkembang, maka kebutuhan memanfaatkan ruang *underground*, ruang bawah tanah diperlukan. Maka itu kami perkenalkan hak bawah tanah," kata Sofyan. **Kepentingan Pekerja** Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan berdampak positif tidak hanya untuk perkembangan investasi, tetapi pada pada saat yang sama juga memperhatikan kepentingan tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan segera berdampak bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. "Kalau anda lihat sebuah regulasi tidak mungkin langsung berdampak. Kita membutuhkan waktu terutama nanti setelah PP ini bisa efektif berjalan. Mudah mudahan tahun depan manakala pandemi sudah berkurang dan sudah kembali ke arah normal, kami prediksi akan sudah memberikan dampak signifikan terutama terkait investasi," ucap Anwar saat dihubungi *Investor Daily* pada Minggu (7/3) malam. Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan sebelumnya, terbnyta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja serta para pengusaha untuk lebih baik. Meski pemerintah berupaya mengakomodasi semua kepentingan *stakeholder* ketenagakerjaan, kata Ida, PP turunannya mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak. Pada kesempatan terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, adanya UU Cipta Kerja membuat koperasi dan UMKM mempunyai kepastian usaha dengan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja terbit, Teten optimistis daya saing UMKM meningkat. Sedangkan Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, PP dan perpres tersebut akan saling bersinergi sehingga semuanya bisa dibilang efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi. "Tidak bisa dipungkiri, pengaruh dari pandemi Covid-19 ini masih besar. Namun, aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja tersebut bisa menjadi basis bagi investor untuk lebih optimistis berinvestasi ke Indonesia," kata dia. Ketua umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Ususindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, semangat UU Ciptaker untuk menyederhanakan berbagai aturan dan birokrasi. Semangat tersebut disambut baik oleh dunia usaha terutama skala usaha UMKM. Menurut dia, PP dan perpres untuk implementasi UU Ciptaker sudah relatif menampung kepentingan dunia usaha. "Kalau memuaskan semua hal saya kira tidak, tetapi dibilang jelek juga *enggak*. Saya kira arahnya sudah baiklah. *Ini kan* ada waktu 4 bulan untuk melakukan penyesuaian," ujar Sutrisno saat dihubungi *Investor Daily*, Jakarta, Sabtu (6/3). (dho/tl/ark/ns/ant/sumber lain/en)





**Konpers Stimulus**

Presiden AS Joe Biden menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers terkait pengesahan paket stimulus Covid sebesar US\$ 1,9 triliun oleh Senat AS, di Ruang Makan Malam Kenegaraan Gedung Putih di Washington, Sabtu (6/3) waktu setempat.

# Pasar Masih Hadapi Dilema Stimulus dan Inflasi

Oleh Iwan Subarkah Nurdianan

▶ NEW YORK – Paket stimulus Covid-19 senilai US\$ 1,9 triliun di Amerika Serikat (AS) akan disahkan pekan ini. Pasar akan kembali akan dihadapkan pada dilema dalam menghadapi legislasi yang seharusnya disambut dengan optimisme ini.

Paket stimulus yang sangat besar itu seharusnya membuahkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi dan juga terhadap pasar finansial. Namun bisa menjadi pedang bermata dua bagi para investor.

Karena secara historis, paket stimulus dalam jumlah besar di sebutkan dapat memicu kenaikan inflasi dan imbal hasil obligasi. Karena dengan dana stimulus, baik untuk individu maupun sektor bisnis, kegiatan ekonomi menggeliat. Konsumen bergerak membelanjakan uangnya dan itu yang pada gilirannya akan memicu kenaikan inflasi.

Pasar saham global ditutup beragam pada pekan lalu. Indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup menguat. Tapi Nasdaq turun karena saham-saham teknologi yang sensitif terhadap

kenaikan suku bunga.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun terus naik dan embali mencapai level tertinggi 1,61% pada Jumat (5/3) sebelum bergerak ke level US\$ 1,54% di akhir perdagangan.

Salah satu hal yang akan dicermati oleh para investor adalah bagaimana pergerakan imbal hasil terhadap obligasi yang berikutnya. Obligasi 10 tahun senilai US\$ 38 miliar akan dilelang pada Rabu (10/3) dan obligasi 30 tahun senilai US\$ 24 miliar pada Kamis (11/3) waktu setempat.

Para investor akan mencermati lelang obligasi itu. Karena lelang Treasury bertenor tujuh tahun, yang biasanya lemah, pada Februari 2021 lalu imbal hasilnya naik. Bahkan

juga untuk obligasi yang bertenor 10 tahun.

"Kami lebih mengkhawatirkan yang itu karena apa yang terjadi dengan obligasi tujuh tahun dan beberapa tekanan jual di Jepang," ujar Ben Jeffery, analis strategi obligasi AS BMO Capital Markets, seperti dikutip CNBC akhir pekan lalu.

Menurut dia, investor-investor lembaga Jepang bakal kurang tertarik untuk ambil bagian dalam lelang tersebut, karena menunggu berakhirnya tahun fiskal Jepang pada 31 Maret 2021.

**Dampak Stimulus**

Sementara itu, Senat AS mengesahkan paket stimulus US\$ 1,9 triliun pada Sabtu (6/3) waktu setempat. Dan Dewan Perwakilan AS dijadwalkan mengesahkannya pada Selasa (9/3).

Pasar akan mencermati indikator-indikator utama inflasi yang keluar pekan ini. Yakni indeks harga konsumen (IHK) AS yang akan dilaporkan pada Rabu (10/3) dan indeks harga produsen (IHP) pada Jumat (12/3).

"Saya pikir pasar akan mencermati kemajuan dari paket stimulus. Saya pikir mereka juga akan terus mencermati pergerakan Treasury

10 tahun dan juga data IHK. Ini yang akan memengaruhi pergerakan dan saya perkiraan stimulus akan tetap menjadi faktor utama penggerak pasar," tutur Michael Arone, direktur investasi strategi State Street Global Advisors.

Inflasi biasanya menjadi sumber kekhawatiran para investor. Karena kenaikan inflasi dapat menggerus margin dan merusak kekuatan laba. Bagi investor obligasi, ini akan menggerus valuasi dan nilai dari imbal hasil.

"Sepanjang kenaikan imbal hasil obligasi selaras dengan kenaikan inflasi, saya pikir pasar akan sanggup mengatasinya. Saya pikir tantangannya adalah bilamana imbal hasil jauh di atas inflasi," kata Arone.

Selain itu, tambah dia, pasar akan mempertanyakan apakah paket stimulus baru ini dapat menyebabkan ekonomi *overheating*. Dan ini juga dapat memicu inflasi karena stimulus baru ini keluar belum lama berselang dari paket stimulus sebelumnya yang disetujui pada Desember 2020.

"Jadi akan memicu perdebatan apakah benar-benar butuh US\$ 1,9 triliun lagi? Ini seperti menyiram api dengan bensin dan ini lah yang dikhawatirkan dari stimulus sebesar US\$ 1,9 triliun itu," kata Arone. (sumber lain)

## Biden: Bantuan Langsung Keluar Bulan Ini

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Sabtu (6/3) waktu setempat mengatakan bahwa warga AS akan mulai mendapatkan bantuan langsung tunai bulan ini, setelah Senat AS mengesahkan paket stimulus senilai total US\$ 1,9 triliun pada hari tersebut.

Dewan Perwakilan AS yang dikuasai Partai Demokrat menyatakan akan mengesahkannya pada Selasa (9/3) lalu segera menyerahkannya kepada Biden untuk ditandatangani, sebelum batas waktu 14 Maret 2021 berakhirnya program-program ban-

antuan dari paket stimulus yang sebelumnya.

"Saat kami mulai bertugas 45 hari lalu, saya sudah berjanji kepada rakyat Amerika bahwa bantuan segera tiba. Hari ini, saya dapat mengatakan bahwa kita telah mengambil langkah raksasa untuk menyampaikan janji bahwa bantuan itu segera tiba. Bantuan tunai akan mulai mengucur bulan ini kepada rakyat AS yang sangat membutuhkannya," ujar Biden, dalam konferensi pers Sabtu siang waktu setempat, seperti dikutip CNBC. Paket stimulus US\$ 1,9 triliun ini

mencakup bantuan langsung hingga US\$ 1.400 kepada sebagian besar rakyat AS. Tunjangan pengangguran mingguan senilai US\$ 300 hingga September 2021 dan perpanjangan kredit pajak anak-anak selama setahun.

Bantuan tunai itu akan diberikan kepada orang dewasa berpenghasilan hingga US\$ 75.000 setahun, hingga US\$ 112.500 per tahun untuk kepala rumah tangga, dan hingga US\$ 150.000 per tahun untuk penghasilan per tahun gabungan suami-istri.

Hampir sama dengan dua bantuan tunai sebelumnya, sebagian besar

pembayaran akan disalurkan langsung ke rekening penerima, yang rekeningnya sudah tercatat di IRS. Berdasarkan mekanisme bantuan langsung yang US\$ 600 per orang, uang itu dapat mulai tiba di rekening penerima dua pekan sejak legislasinya disahkan. Ini menurut Garrett Watson, analis senior kebijakan Tax Foundation.

Sisa pembayaran akan dikirimkan via pos dalam bentuk kartu debit atau cek. Jadi waktunya akan lebih lama, bisa pada April dan Mei 2021. (sumber lain/sn)

## Cuitan Perdana di Twitter Ditaksir US\$ 2 Juta

SAN FRANCISCO – Bos Twitter Jack Dorsey menjual cuitan pertamanya dalam lelang. Cuitan tersebut dilelang sebagai *non-fungibel token* (NFT) atau cenderamata yang tidak dapat dipertukarkan dan hingga Sabtu (6/3) waktu setempat mendapatkan penawaran tertinggi US\$ 2 juta.

Angka penawaran itu menunjukkan tingginya minat terhadap barang-barang virtual, yang diotentikasi dengan teknologi *blockchain*. Cuitan tersebut berbunyi "just setting up my twttr," dan cuitan oleh Dorsey di Twitter pada 21 Maret 2006.

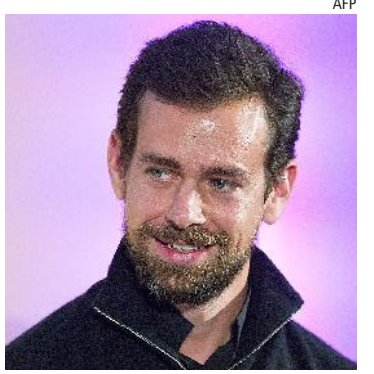
Pada Jumat (5/3) waktu setempat, ia menuliskan tautan ke *Valuables@Cent*. Ini adalah pasar *online* untuk cuitan-cuitan, yang menurut situs tersebut adalah tempat investor atau kolektor berjual-beli cuitan yang ditandatangani oleh penulis aslinya.

Penawaran tertinggi untuk cuitan Dorsey tersebut datang dari Justin Sun. Ia adalah pendiri TRON, sebuah tempat atau wadah untuk *blockchain*. Adapun *blockchain* adalah teknologi yang mendasari mata uang kripto. Sun juga memimpin wadah streaming BitTorrent.

"Jika pembuat sebuah cuitan memutuskan ingin mencetaknya di atas *blockchain*, bisa membuat versi yang ditandatangani dengan ukuran 1:1," kata *Valuables*.

Sementara seseorang yang membeli cuitan itu berarti membeli sertifikat digital dari cuitan itu. Yang mana ini unik karena telah ditandatangani dan diverifikasi oleh pembuatnya.

Dalam kasus cuitan pertama Dorsey itu, cuitan tersebut tetap dapat dilihat semua orang, sepanjang ia dan Twitter membiar-



Jack Dorsey

kannya tetap terbuka bagi semua pembaca.

Pendekatan dalam jual beli cuitan ini mirip dengan penjualan *online* momen-momen digital dramatis dari pertandingan di liga basket nasional AS, National Basketball Association (NBA). Jadi potongan-potongan video pendeknya tetap dapat bebas dilihat di internet. Tapi NFT-nya dibuat di *blockchain* untuk menjamin identitas, keaslian, dan kepadatdilacakan dari video tersebut. Dari situ lah nilainya tercipta.

Pada akhir bulan lalu, klip selama 10 detik dari sebuah aksi spektakuler bintang basket LeBron James dihargai hingga US\$ 208.000 di situs NBA Top Shot.

Menurut Dapper Labs, mitra NBA untuk Top Shot, mengklaim bahwa tahun ini Top Shot sudah menghasilkan transaksi bernilai lebih dari US\$ 200 juta.

Pada 2019, Sun merogoh kocek US\$ 4,6 juta sebagai pemenang lelang makan siang bareng miliarder Warren Buffett. Tapi, ia gagal meyakinkan Buffett mengenai nilai uang dari *bitcoin*. (afp/sn)

## Perusahaan Israel Kembangkan Isi Ulang Baterai Mobil Hanya 5 Menit

HERZLIYA – Sebuah perusahaan rintisan asal Israel mengembangkan teknologi yang memungkinkan isi ulang baterai mobil listrik dari kosong sampai penuh hanya dalam lima menit. Perusahaan spesialis isi ulang baterai supercepat bernama StoreDot ini berharap, teknologinya dapat mengatasi kekhawatiran para pemakai mobil listrik tentang jarak tempuh mobilnya dalam sekali baterai penuh.

StoreDot mengembangkan baterai lithium-ion generasi pertama yang dapat menyangi waktu pengisian bahan bakar minyak (BBM) di mobil biasa.

"Kami mengubah seluruh pengalaman berkendara, tidak akan ada lagi kecemasan berapa jauh lagi jarak tempuh, karena khawatir mogok di jalan raya gara-gara baterai habis," ujar pendiri StoreBot Doron Myersdorf.

Ia menambahkan bahwa inovasi ini dapat menghilangkan waktu pengisian baterai selama berjam-jam lamanya. Seperti dilaporkan AFP, Minggu (7/3), saat ini ada ratusan purwarupa yang sedang diuji oleh perusahaan.

Perusahaan yang berbasis di Herzliya, dekat kota Tel Aviv, ini didukung oleh empat investor utama. Yakni produsen mobil Jerman Daimler, perusahaan energi Inggris British Petroleum (BP), dan raksasa elektronik asal Korea Selatan serta Jepang, yakni Samsung dan TDK.

Myersdorf, yang mendirikan perusahaannya pada 2012, mengaku sudah menguji baterai tersebut pada ponsel, *drone*, dan skuter. Sebelum kemudian sekarang melompat ke mobil listrik.

Eric Esperance, analis dari konsultan Roland Berger berpendapat



Doron Myersdorf

bahwa teknologi isi ulang baterai sangat cepat ini masih akan melalui banyak tahapan. Walau di sisi lain akan menjadi sebuah revolusi. "Masih jauh untuk bisa masuk pasar otomotif industri," ujar dia kepada AFP.

Pada 2019, Nobel Kimia diraih oleh John Goodenough dari AS, Stanley Whittingham dari Inggris, dan Akira Yoshino atas penemuan baterai lithium-ion.

"Baterai ringan, dapat diisi ulang, dan berdaya tinggi ini sekarang digunakan di semua perangkat, dari ponsel, laptop, sampai mobil listrik," kata panitia Nobel waktu itu.

Myersdorf mengatakan, kecepatan isi ulang belum menjadi bagian dari desain asli baterai lithium ion yang meraih Nobel tersebut. Jadi, ia mengembangkan teknologi yang dianggap mustahil, yakni baterai lithium ion yang bisa diisi ulang hanya dalam hitungan menit.

"Kami ingin menunjukkan bisa menggunakan baterai lithium ion, mengganti beberapa bahannya, lalu bisa mengisinya dalam lima menit," kata dia. (afp/sn)

## Ekspor Tiongkok Melonjak 60,6%

BEIJING – Ekspor Tiongkok pada periode Januari-Februari 2021 melonjak 60,6%, jauh di atas ekspektasi kalangan analis, dengan kontributor utama dari ekspor elektronik serta tekstil.

Kenaikan permintaan itu disebabkan permintaan akan peralatan pelindung tubuh dan perangkat elektronik untuk bekerja dari rumah melonjak selama pandemi Covid-19.

Data yang dirilis Minggu (7/3) juga menunjukkan impor naik 22,2% pada periode yang sama. Kedua data ini kontras dengan data sama pada periode tahun lalu, yang mana impor anjlok sekitar 17% dan impor turun 4%.

Tiongkok pada awalnya direpotkan dengan pengendalian penyebaran Covid-19. Karena konsumen dikenai pembatasan-pembatasan sehingga harus

tinggal di rumah dan sektor bisnis bergerak lambat untuk kembali beroperasi.

Bea Cukai Tiongkok menyatakan, perbandingan dengan hasil tahun lalu juga kemungkinan ikut memperkuat data yang terakhir. "Low base adalah salah satu penyebab kenaikan yang lebih besar di tahun ini," kata Bea Cukai Tiongkok, seperti dikutip AFP.

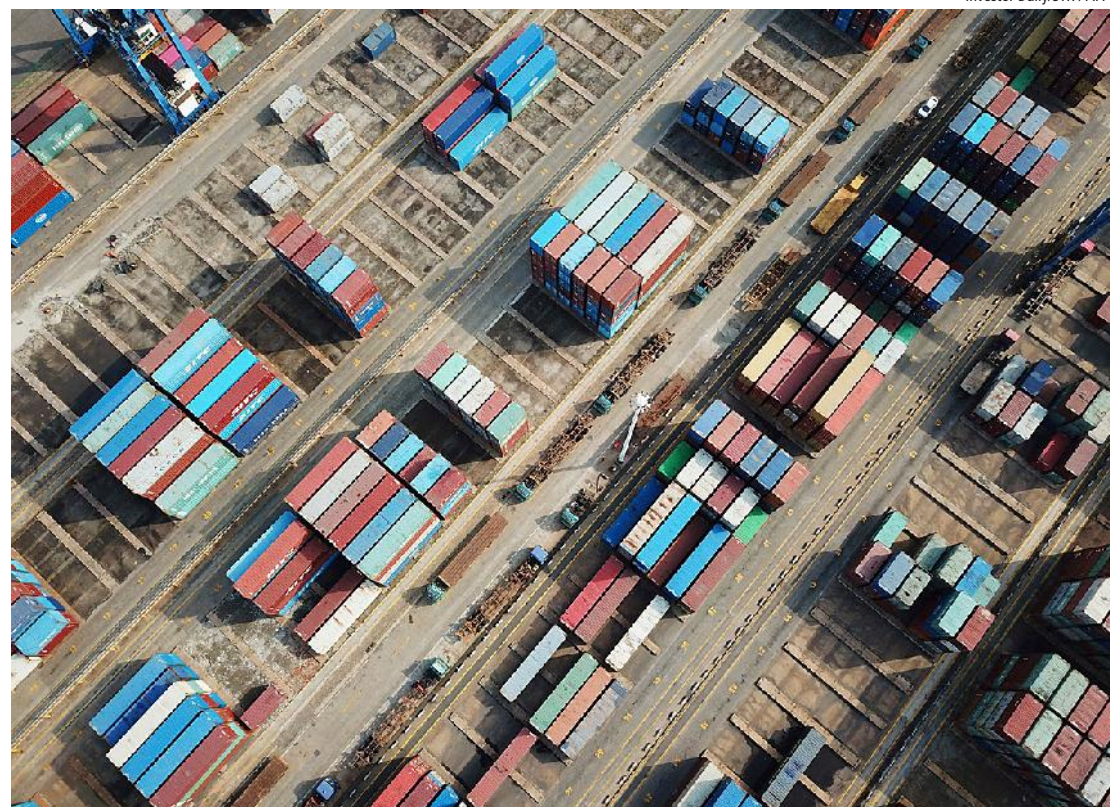
Data menunjukkan bahwa ekspor naik melonjak 54,1% pada periode tersebut. Sedangkan ekspor tekstil termasuk masker wajah melonjak 50,2%.

Secara keseluruhan, Tiongkok mencatatkan surplus perdagangan senilai US\$ 103,3 miliar. Pemerintah Tiongkok mulai menggabungkan data perdagangan Januari dan Februari pada tahun lalu, karena waktu itu sedang berjuang mengatasi penyebaran Covid-19.

Hal tersebut juga sejalan dengan rilis indikator-indikator yang lain. Dan mengurangi distorsi yang ditimbulkan oleh masa liburan Imlek, yang biasanya jatuh pada Januari atau Februari.

"Data perdagangan luar negeri tetap kuat walau ada masa liburan. Banyak perusahaan di provinsi-provinsi yang sebagian besar perdagangannya untuk ekspor seperti Guangdong dan Zhejiang tetap berproduksi selama Imlek. Permintaan pasar diperkirakan terus memulih," kata Bea Cukai Tiongkok.

Kegiatan perdagangan Tiongkok juga tinggi karena pulihnya produksi serta konsumsi di negara-negara ekonomi besar di Eropa dan di Amerika Serikat (AS). Selain karena naiknya konsumsi di dalam negeri. (afp/sn)



**Peti Kemas Ekspor**

Foto udara ini memperlihatkan peti kemas untuk ekspor berjejer di Pelabuhan Lianyungang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, Minggu (7/3). Bea Cukai Tiongkok melaporkan ekspor pada Januari-Februari 2021 melonjak.



# Operator Butuh Insentif agar Mau Jangkau Daerah Pelosok

Oleh Emanuel Kure

► JAKARTA – Penyelenggara/operator jasa telekomunikasi (telko) di Tanah Air perlu diberikan insentif agar mau membangun jaringannya hingga ke daerah pelosok dan perbatasan negara. Selain itu, pemerintah disarankan untuk mengintervensi industri telko agar lebih menguntungkan operator nasional.



Muhammad Arif



Kristiono

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Ajiatel) Muhammad Arif berpendapat bahwa para penyelenggara/operator layanan telko di Tanah Air perlu diberikan insentif agar mau membangun jaringannya hingga ke daerah pelosok dan perbatasan negara.

Arif pun mengaku sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah agar memberikan kemudahan perizinan. Hal tersebut pun sudah diakomodasi dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diterjemahkan lebih jauh pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar). "Kita menunggu realisasinya,

dan apabila ada penyelenggara jaringan yang membangun di daerah yang belum terjangkau, diberikan insentif pajak, atau sejenisnya agar mengundung minat dari operator," ujar dia kepada *Investor Daily*, Minggu (7/3).

Sementara itu, pemerintah dan swasta saat ini sudah membangun serat optik (*fiber optic*) sepanjang 348 ribu kilometer (km) yang digelar di darat dan laut, termasuk jaringan tulang punggung (*backbone*) Palapa Ring 12 ribu km yang menyambungkan wilayah pelosok hingga perbatasan negara.

Menurut Arif, pengaluran jalur utama telko tersebut agar tersambung ke pelanggan bisnis

dan rumah tangga perlu lebih banyak mengoptimalkan peran operator telko. Hal tersebut perlu dilakukan terutama untuk memberikan akses telko ke daerah pelosok.

"Itu perlu lebih banyak meng-gandeng penyelenggara (telekomunikasi) lokal untuk menjangkau area yang masih belum ter-cover," tegasnya.

Ketua umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono mengakui, jangkauan infrastruktur digital Indonesia saat ini belum merata hingga wilayah pelosok Tanah Air. Saat ini, masih ada sekitar 12 ribu desa yang belum terjangkau akses internet.

"Yang sudah terjangkau pun kualitasnya masih rendah. Di antara negara Asean pun kita ketinggalan, sehingga perlu operator telko sehat. Dan, itu membutuhkan dukungan dan keberpihakan pemerintah karena sebagian besar infrastruktur digital nasional dibangun oleh operator telko nasional," tutur Kristiono.

Jika kita membaca PP Postelsiar pasal 21 ayat (1), disebutkan, dalam penyelenggaraan telko, pemerintah pusat dan daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk penyelenggara telko secara bersama dengan biaya wajar, berupa tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif telekomunikasi.

Lebih lanjut, pemerintah kini pun mempermudah penyelenggara jasa telko untuk bekerja sama dalam berbagi infrastruktur pasif (*infrastructure sharing*). Hal ini diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Selanjutnya, pasal 50 ayat (1) menyebutkan, penyelenggara jaringan telko pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat bekerja sama (*spectrum sharing*) untuk penerapan teknologi baru. Hal ini antara lain untuk mendukung

implementasi teknologi seluler generasi kelima (5G) yang perlu segera disiapkan.

## Perlu Intervensi

Sementara itu, Kristiono meminta pemerintah agar segera melakukan intervensi dengan kebijakan yang lebih memihak demi melindungi industri telko nasional dari dominasi platform penyedia layanan melalui internet (*over-the-top/OTT*) global.

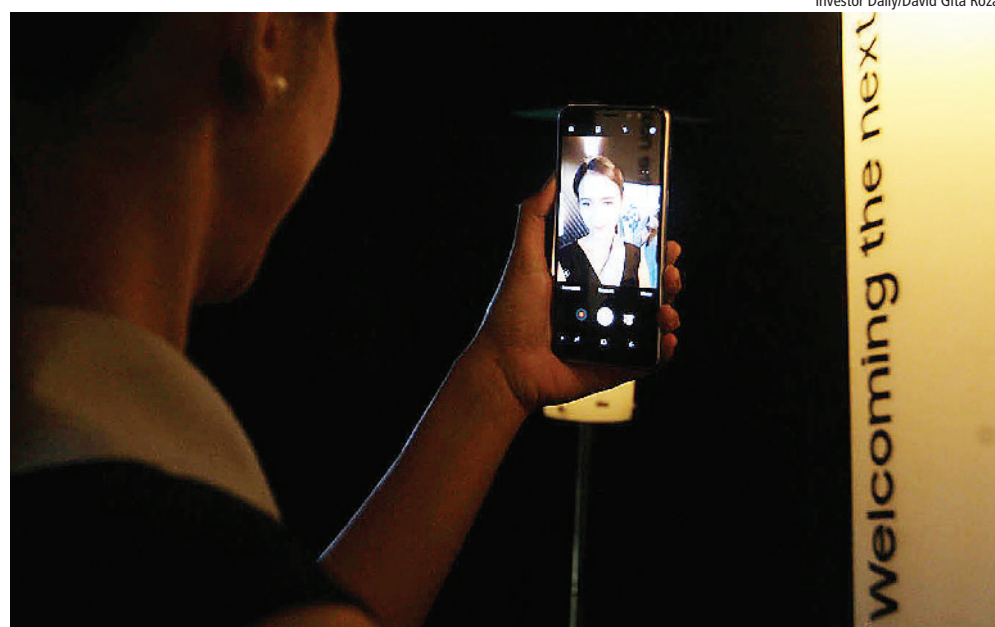
Pasalnya, sejak lima tahun terakhir ini, kinerja industri dan operator telko nasional dalam tren menurun. Hal ini pun telah berdampak buruk pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia.

"Intervensi pemerintah harus dilakukan, bukan dalam kerangka proteksionisme, namun wujud kedaulatan negara untuk menyeimbangkan posisi tawar kedua belah pihak agar seimbang, sehingga tercipta kerja sama yang *win-win* sebagaimana instruksi Bapak Presiden," ungkap Kristiono.

Menurut dia, *value chain* industri digital saat ini didominasi oleh platform konten global telah menempatkan kondisi industri telko nasional dalam posisi semakin tertekan. Pemerintah pun terpaksa mengupayakan konsolidasi industri telko dengan berbagai skema efisiensi melalui UU Cipta Kerja.

Arif mengakui, selama ini, penyediaan layanan OTT asing lebih menguasai Indonesia daripada lokal. Karena itu, pemerintah pun diharapkan bisa lebih mendorong dan mendukung OTT lokal bisa lebih kuat dan digunakan oleh masyarakat secara luas di Tanah Air.

"Saya berharap, pemerintah lebih mendorong dan yang paling penting meng-endorse agar konten-konten lokal ini bisa lebih kuat dan dipakai oleh masyarakat secara luas," tuturnya. (Im)



## Streaming via Ponsel

Pengunjung mencoba layar kamera sebuah *smartphone*, saat peluncuran di Jakarta, beberapa waktu lalu. Platform *analytics* pemasaran aplikasi global, Adjust merilis hasil surveynya, di mana ditemukan 52,5% pengguna di seluruh dunia semakin banyak menggunakan *smartphone* untuk *streaming* konten video sejak adanya pembatasan sosial.

# ACCI dan Telkomtelstra Gelar Kelas Daring Edukasi Cloud Computing

JAKARTA – Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) menggandeng Telkomtelstra untuk mengedukasi komputasi awan (*cloud computing*) melalui kelas belajar secara daring di Cloud Computing Academy. Kegiatan ini bertema *Container as a Service* (Docker, Kubernetes, dan AKS Engine).

Kelas belajar daring bagian pertama tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Umum ACCI Alex Budiyanto pada Jumat, 26 Februari 2021. Alex mengatakan bahwa kelas belajar secara daring diadakan dua minggu sekali setiap hari Jumat, pukul 14.00 WIB.

"*Container as a service* ini merupakan kelas Cloud Computing Academy yang diselenggarakan bekerja sama dengan Telkomtelstra, di mana materinya disampaikan oleh Imam Adiwibowo, *senior technical specialist cloud & collaboration* Telkomtelstra," ujar Alex, dalam keterangannya, seperti dikutip Minggu (7/3).

Imam Adiwibowo menambahkan, kerja sama Telkomtelstra dengan ACCI tersebut sekaligus juga untuk memperkenalkan produk solusi yang dimiliki oleh Telkomtelstra. Salah satu layanan yang disediakan adalah *Managed Cloud Services*, di mana Telkomtelstra menjadi *provider* untuk Azure Stack, yaitu *cloud platform* berbasis teknologi Azure yang *data center*-nya ada di Indonesia.

"Jadi, kalau ada kebutuhan menggunakan *cloud computing* dengan teknologi yang sama seperti Azure, tapi butuh *data center* ada di Indonesia, maka Azure Stack dari Telkomtelstra bisa jadi salah satu pilihan untuk *cloud* yang digunakan," imbuhnya.

Selain layanan tersebut, Telkomtelstra menawarkan *Unified Communications*. Salah satunya *Cloud Contact Center* yang sudah diimplementasikan oleh Komnas Perempuan. Ada juga solusi *Managed Security*

*Services* dan *Managed Network Services* SD-WAN.

## Materi Kelas

Alex melanjutkan, dalam kelas belajar daring kerja sama ACCI dan Telkomtelstra tersebut akan dibahas mengenai *container*, *platform* Docker, Kubernetes, dan Azure Kubernetes Service (AKS) Engine mulai dari level dasar.

Kelas pun akan sangat cocok bagi pengguna yang ingin menguasai Docker, Kubernetes, dan AKS Engine meskipun belum paham sekali.

*Container as a Service* (CaaS) merupakan model layanan *cloud* yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengatur, memulai, menghentikan, dan mengelola aplikasi dalam bentuk *container*. Secara sederhana, penyedia CaaS menawarkan kerangka kerja lengkap untuk menggunakan dan mengelola aplikasi dalam bentuk *container*. (Im)



# PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kantor Pusat  
Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Bali  
Telepon : (0361) 767 629  
Faksimile : (0361) 766 059  
Website : www.balitower.co.id

Kantor Perwakilan  
Wisma KEIAI Lantai 22  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220  
Telepon : (021) 5790 5788  
Faksimile : (021) 5790 5789

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
(Dalam Rupiah Penuh)					
ASET	2020 Rp	2019 Rp	LIABILITAS DAN EKUITAS	2020 Rp	2019 Rp
<b>ASET LANCAR</b>			<b>LIABILITAS</b>		
Kas dan Bank	104.870.198.132	20.975.304.044	<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Piutang Usaha - Neto	144.403.778.103	132.375.145.774	Utang Usaha	72.909.229.308	156.060.135.493
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.813.773.769	16.719.814.723	Beban Akumul	84.775.664.524	60.017.107.691
Persediaan	59.778.891.915	62.021.441.902	Utang Pajak	5.284.402.220	1.516.621.875
Pajak Dibayar di Muka	58.682.334.768	84.151.843.319	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	24.085.775.133	19.414.886.417
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	31.647.629.492	39.513.794.620	Medium Term Notes	-	348.941.132.935
			Pendapatan Diterima di Muka	145.187.367.303	119.730.949.223
Jumlah Aset Lancar	401.196.606.179	355.757.344.382	Bagian Jangka Pendek dari:		
			Utang Pembiayaan Konsumen	74.636.241	304.949.098
			Liabilitas Sewa	5.916.181.265	3.379.207.545
			Utang Bank Jangka Panjang	304.050.109.641	382.204.195.163
			Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	642.283.365.635	1.091.568.985.440
			<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
			Utang Pembiayaan Konsumen	43.019.323	34.121.996
			Liabilitas Sewa	24.325.085.642	17.517.759.067
			Pendapatan Diterima di Muka	17.587.568.607	7.016.573.071
			Utang Bank Jangka Panjang	670.256.958.582	1.070.255.817.794
			Utang Obligasi	546.883.328.463	-
			Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	497.713.487.827	-
			Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	18.734.359.405	19.368.248.580
			Liabilitas Pajak Tanggungan	54.258.677.391	43.611.360.089
			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.829.812.485.240	1.157.803.880.867
			<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.472.095.850.875</b>	<b>2.249.372.866.307</b>
			<b>EKUITAS</b>		
			<b>Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>		
			Modal Saham - nilai nominal:		
			Rp20 per saham		
			Modal Dasar: 10.000.000.000 Saham	78.691.850.000	78.691.850.000
			Modal Ditertanggungjawabkan dan Disetor Penuh:		
			3.934.592.500 Saham	159.999.203.328	159.999.203.328
			Tambahan Modal Disetor - Neto	(1.266.853.812)	(1.266.853.812)
			Saldo Laba	15.738.370.000	14.661.506.800
			Telah ditentukkan Penggunaannya	468.352.350.038	324.055.069.498
			Belum ditentukkan Penggunaannya	1.458.369.680.142	1.322.221.769.009
			Penghasilan Komprehensif Lainnya	2.179.884.599.696	1.898.362.544.823
			Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(40.474.883)	(46.088.377)
			Keperingan Nonpengendali	2.179.844.124.813	1.898.316.456.446
			<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.179.844.124.813</b>	<b>1.898.316.456.446</b>
			<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4.651.939.975.688</b>	<b>4.147.689.322.753</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
(Dalam Rupiah Penuh)		
	2020 Rp	2019 Rp
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	778.896.099.135	617.522.982.196
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(356.126.150.223)	(280.844.719.850)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>422.769.948.912</b>	<b>336.678.262.346</b>
Beban Usaha	(61.193.829.525)	(58.801.501.351)
<b>LABA USAHA</b>	<b>361.576.119.387</b>	<b>277.876.760.995</b>
Beban Keuangan	(225.571.029.007)	(205.841.909.907)
Pendapatan Diterima di Muka	1.024.838.466	1.169.632.593
Beban Lain-lain	(6.927.444.471)	(2.797.596.129)
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>130.102.484.375</b>	<b>70.406.887.552</b>
Pajak Final Atas Penghasilan	(22.811.275.051)	(11.230.695.650)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>107.291.209.324</b>	<b>59.176.191.902</b>
Beban Pajak	(22.887.993.519)	(13.151.754.701)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>84.403.215.805</b>	<b>46.024.437.201</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:		
Surplus Revaluasi Aset Tetap	195.954.245.787	77.417.828.921
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan atas Surplus Revaluasi Aset Tetap	(1.440.417.525)	(17.209.620.824)
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	3.413.594.079	(2.923.491.790)
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(802.969.779)	730.872.948
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak</b>	<b>197.124.452.562</b>	<b>58.015.589.255</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>281.527.668.367</b>	<b>104.040.026.456</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik Entitas Induk	84.397.633.086	46.022.823.146
Keperingan Nonpengendali	5.582.719	1.614.055
<b>Jumlah</b>	<b>84.403.215.805</b>	<b>46.024.437.201</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik Entitas Induk	281.522.054.873	104.038.393.836
Keperingan Nonpengendali	5.613.494	1.632.620
<b>Jumlah</b>	<b>281.527.668.367</b>	<b>104.040.026.456</b>
<b>LABA PER SAHAM:</b>		
Labar tahun berjalan per saham yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	21,45	11,88

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
(Dalam Rupiah Penuh)			
	2020 Rp	2019 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	796.378.480.956	664.487.923.354	
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(107.567.655.791)	(196.037.888.844)	
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(60.208.985.162)	(56.484.429.428)	
Penerimaan Bunga	70.731.992	777.262.458	
Pembayaran Pajak	(34.762.365.255)	(32.747.451.219)	
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>594.547.206.740</b>	<b>379.996.418.321</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pencairan Dana yang Dibatasi Penggunaannya	70.587.000	202.920.000	
Penempatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(449.435.000)	-	
Perolehan Aset Tetap	(469.875.973.160)	(647.879.151.590)	
Penjualan Aset Tetap	13.807.239.697	21.906.651.130	
Pembayaran Sewa Lahan Dibayar di Muka	(8.712.277.717)	(8.158.771.283)	
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(465.159.859.180)</b>	<b>(633.928.351.743)</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pencairan Dana yang Dibatasi Penggunaannya	11.000.000.000	-	
Penempatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(14.196.250.000)	-	
Penerimaan dari Pelaksanaan Waran Seri I	-	16.257.264.000	
Penerimaan dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	-	84.150.000.000	
Penerimaan dari Penerbitan Obligasi	554.000.000.000	-	
Biaya Emisi Penerbitan Obligasi	(6.354.794.346)	-	
Biaya Penjaminan Penerbitan Obligasi	(6.232.500.000)	-	
Utang Bank Jangka Panjang	-	-	
Penerimaan	437.882.980.281	809.379.433.155	
Pembayaran	(919.364.741.292)	(448.823.487.810)	
Penerimaan dari Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	500.000.000.000	-	
Pembayaran Angsuran Pembiayaan Konsumen dan Liabilitas Sewa	(4.088.442.373)	(490.404.083)	
Pembayaran Beban Keuangan	(247.633.511.625)	(203.845.396.311)	
Pembayaran Medium Term Note	(350.000.000.000)	-	
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(444.987.279.355)</b>	<b>256.627.408.951</b>	
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN BANK</b>	<b>84.400.068.205</b>	<b>2.695.475.529</b>	
<b>DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK</b>	<b>(505.174.117)</b>	<b>(83.214.487)</b>	
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>20.975.304.044</b>	<b>18.363.043.002</b>	
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>104.870.198.132</b>	<b>20.975.304.044</b>	

\* Saldo laba termasuk pengukuran kembali atas program imbalan pasti masing-masing pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp743.559.556 dan Rp1.867.064.749

## Catatan:

- Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Bali Towerindo Sentra Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM network dengan opini audit tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporannya bertanggal 4 Maret 2021. Karena informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian.
- Labar per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Jakarta, 8 Maret 2021

Direksi

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN									
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019									
(Dalam Rupiah Penuh)									
	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor-Neto	Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	Saldo Laba *)		Penghasilan Komprehensif Lainnya Surplus Revaluasi Aset Tetap	Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Keperingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
				Yang Telah Ditentukkan Penggunaannya	Yang Belum Ditentukkan Penggunaannya				
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018</b>	<b>73.307.534.000</b>	<b>64.976.255.328</b>	<b>(1.266.853.812)</b>	<b>14.537.826.800</b>	<b>219.160.120.879</b>	<b>1.323.202.003.792</b>	<b>1.693.916.886.987</b>		



INVESTOR DAILY

INDONESIA

Editor In Chief : Primus Dorimulu

Editor at Large : John Riady



TAJUK

# Menunggu Dampak UU Ciptaker

Diam-diam, peraturan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya rampung. Tidak ada aksi demo yang mengharu biru seperti pada paruh pertama Oktober 2021. Angka positif pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan vaksinasi yang sudah dimulai lebih menarik perhatian publik. Selain itu, penyusunan peraturan pelaksanaan *omnibus law* pertama ini melibatkan berbagai unsur, sehingga tak ada kepentingan yang tidak terakomodasi.

Pada pekan terakhir Februari 2021, pemerintah mengumumkan rampungnya 51 peraturan pelaksanaan UU Ciptaker, terdiri atas 47 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres). Ke-51 peraturan pelaksanaan itu mengutar 11 klaster, yakni klaster perizinan dan kegiatan usaha (15 PP), koperasi dan UMKM serta badan usaha milik desa (empat PP), investasi (lima PP dan satu perpres), ketenagakerjaan (empat PP), fasilitas fiskal (tiga PP), penataan ruang (tiga PP dan satu perpres), lahan dan hak atas tanah (lima PP), lingkungan hidup (satu PP), konstruksi dan perumahan (lima PP dan satu perpres), kawasan ekonomi (dua PP), serta barang dan jasa pemerintah (satu perpres).

Seperti tujuan utamanya, UU Ciptaker juga merupakan *game changer* selain vaksinasi Covid-19. *Omnibus law* diharapkan mampu menyelesaikan kecacatan hukum yang selama ini mendera ekonomi Indonesia. UU dan peraturan yang tumpang-tindih serta saling berbenturan diharapkan dapat diselesaikan oleh UU Ciptaker. Kekosongan hukum yang selama ini terjadi dapat diisi oleh UU sapu jagat ini.

UU Ciptaker diharapkan mampu menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha. Dengan cukup mendaftar, pelaku usaha dapat langsung menjalankan usaha. Semua perizinan dilakukan secara elektronik. Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem *online single submission* guna mencegah pungutan liar dan korupsi.

Harapan ini tertuang dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kegiatan usaha dan investasi dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas (PT) disederhanakan dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek dipercepat. Harapan ini tertuang dalam PP No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diberikan perhatian tinggi. Perusahaan asing tidak boleh masuk skala UMKM dan dalam kegiatan usaha, perusahaan besar wajib mengikutkan UMKM. Perusahaan besar tidak boleh mencaplok UMKM dan itu tertuang dalam PP No 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi dipermudah. Ini diatur dalam PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PP No 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Telantar, PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pengaturan tata ruang diberikan pedoman yang jelas. Itu diatur dalam PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidakeesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah. UU Ciptaker juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak

yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas. Kemudahan ini tertuang pada PP No 40 Tahun 2021 tentang KEK, PP No 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pembangunan perumahan rakyat dipermudah. Kemudahan ini diatur dalam PP No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan serta PP No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Masalah ketenagakerjaan diatur dalam empat PP, yakni PP No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No 36 Tahun 2021 tentang Pungupahan, serta PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. UU dan peraturan ketenagakerjaan dibuat lebih adil bagi pekerja dan pemberi kerja. Tidak ada penelantaran dan pengabaian hak-hak pekerja seperti digambar-gembarkan.

UU Ciptaker mengatur pendapatan daerah dan badan usaha milik desa (BUMDes). Ada PP No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dan PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

UU Ciptaker mendorong terwujudnya informasi yang merata ke seluruh warga Indonesia yang ada di berbagai wilayah NKRI. Ini tertuang dalam PP No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Televisi nasional wajib hijrah dari televisi analog ke televisi digital, selambatnya 2 November 2021. Ini diatur dalam PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Izin penyelenggaraan rumah sakit dipermudah. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas medis dalam menangani pasien. Pandemi Covid-19 mengauk rapuhnya kapasitas medis Indonesia. Kemudahan ini diatur dalam PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan.

Untuk mempercepat sertifikasi halal berbagai produk, ada PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Izin penyelenggaraan rumah sakit dipermudah. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas medis dalam menangani pasien.

UU Ciptaker juga mengatur tentang *sovereign wealth fund* (SWF), sebuah lembaga untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan infrastruktur untuk mendapatkan dana investasi. Kehadiran SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diatur dalam PP No 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI, PP No 74 Tahun 2020 tentang LPI, dan PP No 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan LPI dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

Pada 16 Februari 2021, Presiden mengumumkan pembentukan dewan pengawas dan dewan direksi LPI atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI memperoleh dukungan modal awal Rp 15 triliun atau sekitar US\$ 1 miliar. Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara US\$ 5 miliar tahun ini. Meski baru dibentuk, LPI diproyeksikan mampu menarik investasi asing dan domestik senilai Rp 225 triliun pada tahap pertama.

Hingga saat ini, baru gaung LPI (INA) atau SWF yang sudah berdampak. Harga saham BUMN infrastruktur di Bursa Efek Indonesia terangkat dan diperkirakan terus menaik seiring dengan perubahan kinerja fundamental. Kita berharap, 47 PP dan empat perpres UU Ciptaker segera dilaksanakan agar memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Sejumlah kementerian segera meluncurkan peraturan menteri agar pelaku usaha mendapatkan pedoman kerja yang jelas. UU Ciptaker sudah membangkitkan harapan pelaku bisnis—mulai dari kelas UMKM hingga korporasi—akan iklim investasi yang lebih baik. Harapan ini jangan disia-siakan. □

# Tantangan Berat Direksi Baru BPJS Ketenagakerjaan

Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama BPJS Ketenagakerjaan, yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tertanggal 21 September 2020, memiliki tugas pokok mencari profesional yang akan mengelola dana milik jutaan peserta (baca "buruh") berjumlah ratusan triliun rupiah bahkan dengan potensi ribuan triliun rupiah.

Oleh Hotbonar Sinaga \*

Penulis sebagai anggota paling senior menyampaikan pesan dalam rapat awal pansel bahwa yang akan diseleksi dan dipilih adalah orang-orang "setengah dewa". Dengan kata singkat yang harus dicari dan diajukan kepada Presiden adalah orang-orang yang ter-"amanah", bukan semata-mata pandai, cerdas, piawai, jagoan, hebat disertai keunggulan lainnya.



Hotbonar Sinaga

### Keputusan Presiden

Setelah ditunggu-tunggu publik, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan susunan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37/P/2021, dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) berdasarkan Keppres Nomor 38/P/2021 tertanggal 19 Februari 2021 untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Inti keputusan terkait Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru adalah mengangkat dalam Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan: Anggoro Eko Cahyo sebagai direktur utama, Abdur Rahman Irsyadi sebagai direktur, Asep Rahmat Swandha sebagai direktur, Edwin Michael Ridwan sebagai direktur, Pramuaya Iriawan Buntoro sebagai direktur, Roswita Nilakurna sebagai direktur, dan Zainuddin sebagai direktur.

### Pembagian Tugas Direksi

Untuk posisi direksi, Keppres tidak menetapkan siapa menjadi direktur apa. Presiden hanya menetapkan siapa dari ketujuh orang direksi yang diangkat tersebut menjadi direktur utama. Demikian juga yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 25/P yang terbit lima tahun lalu (19 Februari 2016).

Berdasarkan pengalaman direktur utama terpilih tahun 2016 yang diceritakan kepada penulis, direksi kemudian melangsungkan rapat untuk penetapan direktur bidang masing-masing. Saat membicarakan siapa menjadi direktur apa, memang agak sulit karena tidak tersedia informasi lengkap serta latar belakang masing-masing seperti kompetensi dan pengalaman. Mestinya dalam periode sekarang akan lebih mudah karena saat pendaftaran sudah diminta memilih direktur bidang apa. Peminatan tersebut dijadikan rujukan untuk pembidangan, walaupun menurut penulis tidak mengikat dan memerlukan kesepakatan bersama plus komitmen setiap anggota direksi.

### Skala Prioritas

Memperhatikan komposisi bi-

ang setiap anggota direksi terpilih, diperlukan konsensus dari masing-masing yang tampaknya tidak akan mudah. Mungkin dapat dibicarakan bersama dalam rapat direksi awal, lalu diputuskan dalam satu rapat gabungan dewan pengawas dengan direksi. Penulis berpendapat, masalah ini tidak perlu dijadikan isu prioritas.

Yang perlu ditangani adalah bagaimana mengatasi permasalahan hukum terkait potensi kerugian investasi yang angkanya belum dapat dipastikan karena "unrealized" untuk investasi pada saham yang memang fluktuatif apalagi dalam masa-masa pandemi yang dipenuhi faktor "uncertainties". Hal ini sangat penting karena dapat menimbulkan risiko reputasi, terutama di kalangan para peserta/buruh yang memiliki hak utama atas dana yang dikelola badan ini dengan total mendekati angka Rp 500 triliun.

Tantangan berat dalam kepesertaan ini dalam menuju era industri 5.0 yang menuntut peran teknologi/robotisasi, kecerdasan buatan dan kecenderungan tenaga kerja muda yang enggan terikat dalam hubungan kerja formal, memerlukan antisipasi yang holistik.

### Kepercayaan

Isu ini wajib diprioritaskan penganannya karena menyangkut tingkat kepercayaan (*trust*) publik terhadap badan ini, seperti ditekankan oleh salah satu kandidat direksi yang notabene seorang praktisi aktuarial saat wawancara akhir dalam proses seleksi. Hal ini juga yang menjadi salah satu sebab utama, 2 dari 7 anggota pansel bersikeras untuk mencalonkan kandidat dari KPK masuk menjadi 14 nama yang diajukan kepada Presiden Jokowi. Siapa di antara kita yang tidak meyakini bahwa sampai sekarang salah satu lembaga yang paling dipercaya di Republik ini adalah

KPK. Daripada membuat kerja sama dengan institusi KPK yang belum tentu efektif, lebih baik rekrut saja langsung pejabat KPK dengan harapan dapat menularkan jiwa integritasnya yang sudah teruji dan sebagai *watch dog* internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Tantangan berat dalam beberapa tahun dan dekade mendatang, selain permasalahan hukum dan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi, terdapat beberapa hal penting berupa *pointers* yang tidak dibahas terinci dalam tulisan singkat ini. *Pertama* adalah upaya peningkatan kepesertaan yang masih berjalan di tempat sejak penulis memimpin institusi ini (awal 2000-an), termasuk untuk tenaga kerja informal dengan program Perisai-nya yang memerlukan penyempurnaan. Ide bernas penyelenggaraan piala Paritrana yang sudah berjalan baik dan terus meningkat partisipasinya di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), UMKM dan peserta perusahaan besar, kecil dan menengah sejak 2017, layak untuk dilanjutkan bahkan dikembangkan. Upaya lain berupa penajaran secara proaktif para calon peserta/tenaga kerja atas ide Odang Mochtar yang pernah menjadi Direktur Muda semasa BUMN Asteek, perlu di-explora dan dikembangkan lebih jauh.

Tantangan berat dalam kepesertaan ini di era revolusi industri 4.0 yang menuntut peran teknologi/robotisasi, kecerdasan bua-

(Persero) dan PT Asabri (Persero) kepada BPJamsostek yang sudah harus diwujudkan tahun 2029.

*Ketiga*, berupaya menghindari terjadinya disharmoni internal, seperti pernah terjadi pada periode sebelumnya yang dapat mengganggu kinerja BPJS. Pada dasarnya dewan pengawas dan direksi sebagai organ pimpinan harus kompak demi pencapaian misi maupun tujuan BPJS.

*Keempat*, finalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai amanah UU Cipta Kerja.

*Kelima*, pendekatan kelembagaan yang lebih intens dan efektif terutama dengan Kemenaker, Kemenkeu dan Lembaga Pemerintah lainnya, seperti DJSN serta asosiasi untuk mempromosikan program literasi jaminan sosial bersama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa yang sebagian produknya berisian. Jangan sampai ada yang berpendapat, "Ingin dikenal namun miskin promosi, sosialisasi yang tidak berkelanjutan serta minim literasi". Lakukan riset perlunya menyusun peta jalan jaminan sosial 25 tahun ke depan berbarengan dengan pihak-pihak terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan/OJK (*total involvement*) supaya ada *sense of belonging*.

*Keenam*, penegakan sistem tata kelola yang baik dan telah diprakarsai dewan pengawas sebelumnya namun belum dituntaskan, termasuk kelengkapan perangkat dewan pengawas berikut peningkatan kompetensi personalnya.

*Ketujuh*, melanjutkan dan mengembangkan program LAPAK ASIK untuk mendukung protokol kesehatan dalam melayani peserta tanpa harus hadir fisik ke kantor pelayanan, berikut pengembangan inovasi lainnya.

*Kedelapan*, penegakan *Governance, Risk & Compliance* (GRC) seperti yang sudah diteladani oleh regulator dan pemerintah. Misalnya dalam penyusunan SOP investasi sehingga tidak ada masalah bila terjadi "unrealized loss" kecuali dilakukan eksekusi.

Langkah-langkah di atas sebagai *"Quick Wins"* yang merupakan opsi untuk direalisasikan dalam waktu 100 hari ke depan oleh direksi BPJS Ketenagakerjaan terpilih.

Selamat bekerja dan berinovasi kepada dewan pengawas dan direksi yang baru. Jangan segan-segan meniru hal-hal baik, seperti konsep BUMN Berakhlak yang digagas Menteri BUMN Erick Thohir yaitu menetapkan AKHLAK (amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) sebagai *core value* BPJamsostek.

\* Anggota Pendiri KUPASI (Komunitas Penulis Asuransi Indonesia), Direktur Utama Jamsostek 2007-2012.

## SURAT PEMBACA

### Jaga Kestabilan Harga Gabah Jelang Panen

Musim panen raya padi di daerah Jawa Timur segera tiba. Biasanya saat panen, harga gabah turun karena banyak pasokan. Belum lagi jika kondisi gabahnya buruk karena dampak curah hujan tinggi seperti saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat seyogianya sudah melakukan langkah antisipasi dan berupaya menjaga kestabilan harga gabah kering panen agar tidak merosot saat masa panen tiba sehingga tidak merugikan petani. Saat masa panen raya, harga

gabah, baik gabah kering panen (GKP) maupun gabah kering giling (GKG) di tingkat petani acap turun. Bahkan terkadang hingga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Dari yang mengemuka di surat kabar, petani sempat melapor bahwa harga gabah kering panen saat ini saja sudah Rp 3.400 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp 4.100 per kilogram.

Harga tersebut juga lebih rendah dari HPP tahun 2020 di tingkat petani yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 4.200 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering giling di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp 5.205 per kilogram dan di gudang Bulog Rp

5.300 per kilogram.

Kondisi tersebut jelas membuat petani merugi karena nilainya tidak sebanding dengan biaya operasional tanam.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah efektif agar harga gabah tidak kian anjlok. Syukur-syukur bisa menaikkan atau menjaga kestabilan harga jual gabah petani. Guna membantu petani, pemerintah bisa membangun beberapa infrastruktur pertanian seperti gudang, bantuan mesin pengering hingga lantai penjemuran di kala musim hujan saat ini. Dengan demikian, harga GKP tidak anjlok saat musim hujan dan bagus saat musim kemarau.

Syukurlah, ada kabar dari pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kabupaten Ngawi, berencana untuk menggandeng investor dalam bidang industri pertanian untuk membeli sekaligus pengelola hasil padi setelah panen. Dengan mendatangkan investor di bidang industri pangan itu diharapkan akan bermanfaat bagi petani di Ngawi—yang merupakan lumbung padi nasional nomor 6 dan nomor 2 se-Jatim. Harapannya saat panen ke depan, petani bisa memiliki nilai jual gabah yang baik.

Langkah-langkah strategis seperti itu layak dijalankan daerah lumbung padi Jawa Timur lainnya.

Dudung T Surabaya



Impacting Lives Through News You Can Trust

### Dewan Redaksi:

Theo L Sambuaga (Ketua)  
Markus Parmadi, Didik J Rachbini,  
Samuel Tahir

### MANAGEMENT:

Chief Operating Officer: Anthony Wonsono. Finance Director: Lukman Djaja. News Director: Primus Dorimulu Senior Advisor: Samuel Tahir

INVESTOR DAILY

INDONESIA

Penerbit: PT Koran Media Investor Indonesia

Wakil Pemimpin Redaksi: Hari Gunarto Redaktur Pelaksana: Abdul Aziz, Asisten Redaktur Pelaksana: Ester Nuky URS, Nurjoni

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Francisco Rio Winto, Harso Kurniawan, Iwan Subarkah, Imam Suhartadi, Jauhari Mahardhika, Nasori, Totok Hari Subagyo, Thomas E. Harefa, Tri Murti, Tri Listiyarini, U. Heri Gagarin (Foto), Asisten Redaktur: Aris Cahyadi, Ely Rahmawaty, Eva Fitriani, Happy Amanda Amalia, Kunradus Aliandu, Mardiana Makmun, Parluhutan Situmorang, Retno Ayuningtyas. Staf Redaksi: Arnoldus Kristianus, Emanuel Kure, Imam Mudzakir, Indah Handayani, Leonard AL Cahyoputra, Novy Lumanauw, Ridho Syukra, Thresa Sandra Deslika, Triyan Pangastuti, Farid Firdaus, Gita Rossiana, Nabil Syarifudin AI Faruq, Muhammad Ghafur Fadillah, Nida Sahara, Prisma Ardianto, Grace Eldora Sinaga, Rangga Ambar Prakoso. Wartawan Foto: David Gita Roza, Emral Firdiansyah. Riset Foto: Arief Hidayat. Surabaya: Amrozi Amanan. Sekretaris Redaksi: Chandra Wijayanti (Kepala), Francisco Chrisnanto Nugroho. Litbang: Alam Saruwijaya. Produksi: Gianto (Kepala), Sukadi, Agustinus W. Trivibowo, R. Thatti Tri Adiwanto. Desain Grafis: Rochadi Kusabrata.

Advertising: Djemy Piether (General Manager), Arlan Darmawan (Manager), Benediktus Utoro Wiratsongko (Manager), Jaya Peranginangin (Manager), Enny Wulandari, Hery Suhaery. Marcomm & Event Management: Sari Oetomo (Genera Manager), Herry Wardiyanto (Manager). Circulation: Amson Nainggolan, Finance: Anna Gertruida. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950. Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A, Lantai 1, Jl. Garnisun 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 10%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.



# Potensi Paket Pengadaan Pemerintah bagi UMK Capai Rp 478 Triliun

Oleh **Arnoldus Kristianus**

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan, potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, dan kecil (UMK) serta koperasi pada 2021 ini mencapai Rp 478 triliun. Sementara tingkat partisipasi pelaku UMK dan koperasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik saat ini mencapai 404.999 pelaku.

"Untuk itu, perlu adanya koordinasi lintas sektor, yakni pemda (pemerintah daerah) dan K/L (kementerian/lembaga), untuk mendorong UMK dan koperasi menjadi penyedia baik melalui

Bela Pengadaan, LPSE, dan e-Katalog," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (6/3).

Menurut Arif, perlu ada pelatihan teknis bagi UMK dan koperasi agar mempunyai pengetahuan tentang proses pelaksanaan pengadaan. Pendampingan secara *online* bagi UMK dan koperasi akan meningkatkan partisipasi peserta dalam pengadaan pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L dan Pasar Digital (PaDi) UMKM.

Tidak hanya itu, lanjut dia, juga perlu ada rapat koordinasi *monitoring* dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan. "Perlu ada pula kurasi produk yang kemudian dilakukan pendampingan dan sertifikasi produk. Termasuk, perlu ada MoU antara pengelola pengadaan dengan APIP (*Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*) dan aparat penegak hukum dalam rangka implementasi 40% pengadaan barang dan jasa bagi UMK dan

koperasi," ucap Arif. Hanya saja, Arif mengakui, masih ada kendala yang membelit pelaku UMK dan koperasi di antaranya, kualitas produk UMK dan koperasi yang belum memenuhi standar, hingga belum menguasai pengoperasian aplikasi pengadaan.

"Di samping itu, adanya kekhawatiran pejabat pengadaan untuk implementasi, mengingat belum ada kesamaan pemahaman dengan APIP dan aparat penegak hukum," kata Arif.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengamanatkan bahwa K/L dan pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40% pengadaan barang dan jasa bagi usaha mikro dan kecil

(UMK) serta koperasi.

Kemudian, dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan dari pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta UMK dan koperasi.

Dalam perpres tersebut, kata Arif, juga dilakukan peningkatan batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi menjadi Rp 15 miliar atau naik menjadi enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar.

"Terbitnya perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,"

kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada kesempatan sebelumnya.

Batasan nilai pengadaan barang dan jasa UMKM sebesar Rp 15 miliar ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp 15 miliar.

Teten mengatakan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan K/L dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40% untuk UMKM dan koperasi. "Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMKM dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat

PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMKM dan koperasi," kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik. Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM dan koperasi dikelola dengan transparan. PP Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40% tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri-menteri teknis dan pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (*whistle blowing system*) dalam rangka pengawasan.



## Peresmian Bank Wakaf Mikro

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri) menyapa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) pada acara Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Muayyad dan Al Mushoffa di Kantor OJK, Solo, Jawa Tengah, Minggu (7/3/2021). OJK saat ini telah mendirikan 60 BWM melalui direksikannya BWM di Pondok Pesantren Al Muayyad dan Pongpes Al Qur'anijy Azzayadi, dengan total penerima manfaat sekitar 41.436 nasabah dan total pembiayaan mencapai Rp60,6 miliar.

## Erick Minta OJK Dorong Perbankan Swasta Ikut Turunkan Bunga Kredit

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar penurunan suku bunga kredit perbankan tidak hanya dilakukan oleh bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Ia meminta, langkah serupa juga dilakukan oleh bank-bank swasta.

Bahkan, Erick mengaku telah melakukan diskusi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penurunan suku bunga kredit oleh perbankan swasta. Dalam diskusi itu ia menyarankan kepada OJK agar mendorong bank-bank swasta menurunkan suku bunga kredit mereka.

"Saya bilang ke teman-teman OJK tidak hanya Himbara, (kredit) bank swasta juga mesti ikut turun. Kalau tidak berat sebelah. Kalau Himbara untung, dividen balik ke negara. Kalau boleh tidak hanya Himbara, tapi swasta juga," ujar Erick dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2021, Jumat (5/3).

Di sisi lain, Erick juga meminta OJK untuk mengajak bank-bank swasta melakukan restrukturisasi kredit sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih besar.

Sebagai tambahan informasi, Bank Indonesia (BI) pada Februari 2021 lalu kembali menurunkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 3,5%.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BRI Sunarso mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan BI untuk mendorong kredit nasional, termasuk langkah BI yang beberapa kali menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,5%.

Bahkan, kata dia, BRI pun ikut merespons kebijakan bank sentral dengan menurunkan suku bunga kredit hingga 350 basis poin per 28 Februari lalu. Kendati begitu, Sunarso memiliki analisis lain bahwa penurunan suku bunga acuan BI bukan satu-satunya cara mendorong pertumbuhan kredit untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ia menyebutkan, saat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebelum 2015 dipatok 22%, justru pertumbuhan kredit BRI bisa mencapai *double digit*. Sebaliknya, ketika bunga KUR diturunkan jadi 15% bahkan disubsidi pemerintah dan nasabah hanya perlu membayar 7% setelah 2015, pertumbuhan kredit BRI justru sulit terdongkrak hingga *double digit*.

"Suku bunga rendah pertumbuhan kredit *nggak* sampai *double digit*. Sepanjang periode itu hanya sekali



Erick Thohir

*double digit*, yaitu pada 2018. Jadi, boleh disimpulkan ternyata *loan interest rate* *nggak* serta merta mendorong pertumbuhan kredit atau penurunan suku bunga acuan bukan satu-satunya faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar dia dalam diskusi Prospek BUMN 2021 sebagai Lokomotif PEN dan *Sovereign Wealth Fund*, Kamis (4/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, yang paling elastis untuk meningkatkan pertumbuhan kredit adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh pendapatan dan membelanjakannya sehingga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau begitu, kebijakan apa yang harus didorong untuk menumbuhkan kredit guna meningkatkan GDP nasional. Turunkan suku bunga iya, tapi mendorong daya beli masyarakat, mendorong kemampuan belanja masyarakat, menjadi faktor penting. Jadi, rasanya dibutuhkan kebijakan untuk memperkuat dan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan pekerjaan ke masyarakat untuk mendorong daya beli dan konsumsi," papar dia.

### Bauran Kebijakan

Dia mengatakan, beberapa kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat sudah dilakukan, seperti memberikan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru, peningkatan *loan to value* (LTV), dan penurunan suku bunga acuan yang juga tetap diperlukan.

"Jadi, bauran diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam program PEN ini. Stimulus itu seperti infus. Sekarang pemerintah memberikannya infus, tapi sampai berapa lama bertahan? Jangan lama-lama, karena tidak bisa terus-menerus andalkan infus dari negara," pungkask dia. (try)

## 67,1% INVESTASI MANGKRAK DISELESAIKAN

### Bahlil: Desa Miliarder Tuban Imbas Pembebasan Lahan

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa asal muasal munculnya julukan desa miliarder di Tuban, Jawa Timur dikarenakan pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan proyek kilang minyak dan petrokimia New Grass Root Refinery (NGRR) PT Pertamina (Persero) di Tuban, Jawa Timur.

Ia mengungkapkan proyek kilang minyak Grass Root Refinery (NGRR) masuk dalam daftar proyek mangkrak selama empat tahun dikarenakan masalah pembebasan lahan yang akhirnya berhasil ditangani

oleh BKPM. "Urusan Rosneft di Tuban Jawa Timur, saya datang Tuban, sebab bebaskan tanah 800 hektare (ha) lebih itu banyak sekali masalahnya" jelasnya dalam Rakernas Hipmi, Sabtu (6/3).

Ia mengatakan, Rosneft memiliki nilai investasi Rp 211,9 triliun. Oleh karena itu, Bahlil harus turun ke lapangan untuk memastikan permasalahan terselesaikan.

Menurutnya, pemerintah melakukan pembebasan lahan warga yang terkena pembangun proyek pembangunan kilang dengan harga per meternya Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu dan

dilakukan secara terbuka. Dengan demikian izin-izin pembangunan Kilang Tuban pun berhasil dikeluarkan. "Nilai investasinya itu Rp 200 triliun lebih, sekarang izin sudah selesai, setelah 4 tahun *nggak* selesai ini barang. Makanya, keluar itu desa miliarder, yang tanah ganti untung itu urusan Rosneft," pungkasknya.

Untuk diketahui, Kilang Tuban merupakan proyek dari usaha patungan antara Pertamina dan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft.

Ia menekankan penyelesaian investasi mangkrak tidak cukup dengan regulasi dan kewenangan. Ia mengatakan,

pemerintah juga harus turun tangan langsung ke lapangan. "Saya datang Ketua PBNU malam-malam, jadi saya pakai sarung, kami ikut wridj juga untuk menyelesaikan ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan hal serupa juga terjadi pada investasi Lotte Chemical di Cilegon. Investasi senilai Rp 52,5 triliun itu juga mangkrak enam tahun akibat permasalahan lahan.

"Itu tanah tumpang tindih antara PT Krakatau Steel, masyarakat di sana dan dengan perusahaan di sana. Tiga menteri disuruh selesaikan di sana tidak selesai-selesai," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia terpaksa turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Saat ini, permasalahan investasi mangkrak tersebut pun sudah selesai dan Lotte pun telah mulai membangun pabrik yang rencananya beroperasi pada Maret 2021.

"Ada satu yang nakal kami 'sekolahin' satu bulan masuk ke pesantren," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini BKPM mencatat investasi mangkrak yang berhasil direalisasikan mencapai Rp 474,9 triliun atau setara dengan 67,1% dari total investasi mangkrak sebanyak Rp 708 triliun. (try)

## Kinerja BLK Belum Berdampak Optimal bagi Peyerapan Naker

JAKARTA – Langkah penyerapan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah dinilai belum berjalan optimal. Hal ini turut memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah. Sebab, investor hanya akan datang ke daerah yang sudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa memenuhi kebutuhan industri atau siap bekerja.

"Faktanya BLK yang dikelola pemerintah daerah memang tidak serius, banyak BLK yang mangkrak. Pemerintah daerah kalau tidak mau peduli dengan BLK daerah maka investor akan kesulitan untuk mendapatkan SDM di daerah tersebut," ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi *Investor Daily* pekan lalu.

Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 1.014 BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Begitu juga sebelumnya di 2019 Kemnaker telah membangun 988

BLK Komunitas. Sehingga, bila dikumulatifkan dari 2017 sampai 2020 Kemnaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas.

Timboel mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan di BLK juga harus memenuhi kebutuhan industri. Dalam hal ini komite vokasi nasional harus memberikan data kebutuhan industri mengenai SDM. Menurutnya harus ada kesesuaian antara kebutuhan industri dengan pelatihan yang dilakukan di BLK. Misalnya yang terkait dengan teknologi dan informasi, pemerintah pusat dan daerah harus menginvestasikan peralatan yang bisa menjadi alat kerja di bidang tersebut. "Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pencari kerja melalui *up-skilling* dan *re-skilling*, benar-benar memenuhi kebutuhan industri," ucap Timboel.

Upaya penyerapan tenaga kerja harus dilakukan melalui kombinasi antara BLK pemerintah pusat, BLK pemerintah daerah serta

sistem pemagangan. Dengan kombinasi tiga hal ini pelatihan di BLK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri dari sisi modul, peralatan, dan instruktur.

"Jadi, memang benar-benar (harus) terintegrasi seluruh BLK yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, serta sistem pemagangan," ucap Timboel.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, BLK harus berperan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja. Namun, kondisi yang BLK kini justru menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran. "Kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, kita harus bekerja *extra ordinary* menjawab kebutuhan dan tantangan dinamika ketenagakerjaan," ucap Ida.

Berdasarkan data BPS pada Agustus 2020, TPT dari taman SMK masih merupakan

yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 3,61%. "BLK harus menjadi titik temu bagi dunia usaha dan industri," imbuh Ida.

Ia mengatakan, sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab, dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai terhadap kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Dunia usaha sebagai pihak yang menyerap tenaga kerja berperan besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.

"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri,

sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri," ucapnya. (ark)



### Ketahanan Pangan

Petani membersihkan gulma pada lahan pertanian di Tangerang, Sabtu (6/3/2021). Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 menjadi Rp104 triliun dari anggaran tahun lalu sekitar Rp80 triliun guna mendukung pemulihan ekonomi.





**Vaksinasi Pengemudi Taksi Blue Bird**

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Noni Purnomo (tengah) bersama Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr Muhammad Budi Hidayat M.Kes dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Blue Bird Group, R Marzuki meninjau pelaksanaan program vaksinasi pengemudi taksi Blue Bird di Pool Bluebird Jalan Mayjen Sutuyo, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (5/3/2021). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), khususnya dalam mendukung pemerintah melaksanakan vaksinasi massal agar segera tercapai *herd immunity* (kekebalan massal) pandemi covid-19.

**PENUMPANG WINGS AIR BUKA JENDELA DARURAT**

# Investigasi Insiden Pesawat Batik Air Diserahkan ke KNKT

Oleh Thresa Sandra Desfika

► JAKARTA - Maskapai Batik Air menyatakan telah berkoordinasi dan menyerahkan proses investigasi atas insiden pesawat Batik Air registrasi PK LUT kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan, serta siap menerima dan menjalankan rekomendasi yang nanti diberikan.

Adapun pesawat Batik Air tipe Airbus 320-200 registrasi PK-LUT mengalami kendala teknis dan terpaksa kembali ke bandara asal saat melayani penerbangan Jambi-Jakarta dengan nomor ID-6803 pada Sabtu (6/3).

"Batik Air penerbangan ID-6803 mengudara sesuai jadwal keberangkatan. Setelah lepas landas, pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara keberangkatan (*return to base/ RTB*) dikarenakan ada salah satu indikator menyala di ruang kokpit yang memberitahukan kemungkinan ada kendala teknis," kata *Corporate Communications Strategic* Batik Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (7/3).

Dalam penerbangan ID-6803 itu, Batik Air membawa enam awak pesawat, 114 tamu dewasa, dua tamu anak-anak, serta satu balita. Danang mengatakan, sebelum dioperasikan, pesawat Airbus 320-200 registrasi PK-LUT telah menjalani pemeriksaan awal, yakni sebelum diterbangkan dan dinyatakan laik terbang dan beroperasi.

Menurut Danang, dalam upaya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, maka keputusan kembali ke bandar udara asal adalah tepat. Hal ini untuk segera dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut pada pesawat udara Airbus 320-200 registrasi PK-LUT. Adapun setelah mendarat, pesawat udara berhenti pada posisi

berada di landasan pacu (*runway*) Bandara Sultan Thaha, Jambi.

Pada Minggu (7/3), lanjut Danang, proses pemindahan posisi pesawat udara pada Airbus 320-200 registrasi PK-LUT di Bandara Sultan Thaha dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antara semua unit atau pihak yang terlibat.

Pada pukul 02.25 WIB, kata Danang, teknisi, peralatan, dan perlengkapan telah tiba di Bandara Sultan Thaha yang diterbangkan dari Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadim, Batu Besar, Kepulauan Riau (BTH) pada 01.00 WIB dengan menggunakan Wings Air tipe pesawat ATR 72-600 penerbangan nomor IW-5030.

Pada pukul 02.26 WIB dengan kondisi hujan, posisi pesawat udara registrasi PK-LUT masih berada di landasan pacu. Akan tetapi, ujar Danang, upaya untuk proses pemasangan alat bantu pada roda pendaratan pesawat bagian depan dan pemindahan tetap dilaksanakan.

"Batik Air senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan pengelola bandar udara setempat, regulator, dan instansi lainnya yang terkait dalam proses pemindahan posisi pesawat Airbus 320-200 itu," imbuh Danang.

Danang mengungkapkan, pada pukul 06.20 WIB, pemindahan posisi pesawat dari landasan pacu berhasil dilakukan dengan aman dan tepat sesuai prosedur.

Di sisi lain, Airnav Indonesia me-



**Danang Mandala Prihantoro**

nerbitkan *notice to airmen* (Notam) C0268/21 NOTAMC C0267/21 yang menyatakan bahwa landas pacu Bandara Sultan Thaha, Jambi, kembali beroperasi normal. Direktur Utama Airnav Indonesia M Pramintohadi Sukarno menjelaskan, Notam tersebut mengumumkan kepada seluruh pemangku kepentingan transportasi udara bahwa landas pacu kembali beroperasi normal pada Minggu (7/3) mulai pukul 08.45 WIB, setelah sebelumnya terdapat pesawat Batik Air ID 6803 yang melakukan pendaratan kembali (*return to base*) karena kendala teknis pada pesawat.

"Batik Air ID 6803 rute Bandara Sultan Thaha-Bandara Soekarno Hatta dengan nomor registrasi PK LUT lepas landas pada Sabtu (6/3) pukul 13.28 WIB dan kemudian RTB pada pukul 13.51 WIB akibat kendala pada roda depan (*nose wheel*). Tidak terdapat korban jiwa pada proses pendaratan darurat kemarin, proses evakuasi pesawat dari landas pacu dapat diselesaikan Minggu pagi ini pada pukul 06.35 WIB," kata Pramintohadi kemarin.

**Wings Air**

Sementara itu, insiden juga menimpa pesawat anak usaha Grup Lion Air yang lain, Wings Air. Seorang penumpang pesawat Wings Air penerbangan IW-1248 membuka jendela darurat saat pesawat akan berangkat dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang pada Minggu (7/2). Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, penerbangan IW-1248 sudah dipersiapkan dengan baik, memiliki jadwal keberangkatan pada 08.45 WIB. Wings Air mengoperasikan

ATR 72-500 registrasi PK-WFO yang akan menerbangkan empat awak pesawat dan 44 penumpang dewasa, serta satu anak-anak dengan tujuan Bandar Udara Binaka di Gunung Sitoli, Sumatera Utara.

"Ketika proses persiapan keberangkatan selesai dan seluruh penumpang sudah berada di dalam kabin pesawat, salah satu penumpang laki-laki berinisial HS (29) yang memiliki nomor kursi 3A sesuai lembar masuk pesawat (*boarding pass*) tiba-tiba membuka jendela darurat (*emergency exit window*)," ujar Danang dalam keterangan resminya kemarin.

Atas kondisi tersebut, ujar Danang, seluruh penumpang diturunkan dan diarahkan kembali ke ruang tunggu keberangkatan bandar udara. Saat ini, papar dia, pesawat ATR 72-500 registrasi PK-WFO itu sedang dilakukan pengecekan pada pesawat udara. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), jelas Danang, awak pesawat menginformasikan kepada petugas layanan darat (*ground handling*) dan petugas keamanan (*aviation security/avsec*) agar segera dilakukan penanganan kepada HS.

"Wings Air telah menyerahkan HS kepada pihak terkait beserta Otoritas Bandar Udara guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut," imbuh Danang.

Atas kondisi tersebut, mengakibatkan keterlambatan keberangkatan Wings Air penerbangan IW-1248 yaitu 55 menit. Penerbangan IW-1248, ucap Danang, telah diberangkatkan kembali pada 09.40 WIB dengan menggunakan pesawat Wings Air yang lain yakni ATR 72-600 registrasi PK-WHM. Pesawat mendarat di Gunung Sitoli pukul 10.45 WIB.

Wings Air menegaskan bahwa seluruh operasional pesawat menggunakan aspek keselamatan dan keamanan (*safety first*).

"Wings Air mewajibkan kepada seluruh penumpang untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan saat di darat serta sedang mengudara. Tindakan yang dilakukan oleh penumpang indisipliner akan mendapatkan sanksi tegas dan memiliki konsekuensi hukum," tegas Danang.

## Tol Japek II Selatan Seksi 3 Rampung pada Maret 2022

JAKARTA - Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan Seksi 3 (Taman Mekar-Sadang) ditargetkan rampung Maret 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama PT Jasamarga Jakarta Cikampek (Japek) Selatan tengah melaksanakan pembangunan Jalan Tol Japek II Selatan yang menghubungkan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1, JORR 2, dan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi).

"Untuk Seksi 1 dan 2 saat ini sedang dalam tahap pembebasan tanah dan ditargetkan konstruksinya rampung Juni 2022. Sedangkan Seksi 3 progres konstruksinya telah mencapai 42,58% dan ditargetkan rampung Maret 2022," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (7/3).



**Basuki Hadimuljono**

Jalan Tol Japek II Selatan membentang sepanjang 62 km dengan biaya senilai Rp 8,8 triliun, terbagi dalam tiga seksi pembangunan, yaitu Seksi 1 Jatiasih-Setu sepanjang 9,3 km, Seksi 2 Setu-Taman Mekar sepanjang 24,85 km, dan Seksi 3 Taman-Mekar Sadang sepanjang 27,85 km.

"Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan produktif seperti ini akan memperlancar aksesibilitas masyarakat, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," papar dia.

**Hutama Karya**

Pada bagian lain, PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Padang-Sicincin dikerjakan sesuai arahan dan kebijakan Kementerian PUPR selaku regulator.

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan dalam membangun proyek Tol Padang-Sicincin, perseroan seringkali dihadapkan dengan kendala di lapangan seperti pembebasan lahan di wilayah Sumatera Barat yang masih menjadi tantangan bagi perusahaan hingga sekarang. Walaupun demikian, progres yang tidak signifikan di ruas tol tersebut bukan disebabkan oleh pembangunan yang lambat, tetapi perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan.

"Jika tersedia kelebihan sumber daya, akan kami lakukan *refocusing* ke ruas proyek tol lain yang lebih siap lahannya," tutur Koentjoro

dalam keterangan resminya akhir pekan lalu.

Untuk mempercepat pembangunan Tol Padang-Sicincin, berbagai skema alternatif pun dilakukan. Hutama Karya mulai dari pengajuan penetapan lokasi (penlok) baru, relokasi trase, hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ini agar proyek tersebut dapat terus berjalan.

Hal ini sekaligus untuk mempertimbangkan pendapat masyarakat setempat yang menyebut tanah di sekitar pembangunan merupakan tanah pusaka dan produktif. Namun dalam pelaksanaannya, Koentjoro menegaskan telah mengikuti keputusan regulator.

Koentjoro juga menekankan bahwa sampai saat ini, perusahaan tidak pernah mengeluarkan pernyataan selain yang didistribusikan Komunikasi Korporat Hutama Karya. Sehingga, jika beredar informasi simpang siur, perusahaan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Sekedar informasi, Tol Padang-Sicincin merupakan tol milik PT Hutama Karya (Persero) sepanjang 36 Km dan menjadi bagian dari koridor pendukung (*feeder*) di koridor Pekanbaru hingga Padang sepanjang 254 Km. Sampai saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang sekitar 1.064 km dengan 551 ruas tol konstruksi dan 513 ruas tol operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km), Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang -Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Medan-Binjai Seksi 2 & 3 (15 km), Tol Pekanbaru-Dumai (131 km), dan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 Indrapura-Blang Bintang (14 km). (mwd)

## Garuda Buka Rute Kargo Surabaya-Hong Kong

JAKARTA - Maskapai Garuda Indonesia melayani penerbangan rute khusus kargo Surabaya-Hong Kong mulai Sabtu (6/3). Layanan itu merupakan bagian dari upaya perluasan jaringan penerbangan kargo guna mendukung peningkatan daya saing komoditas ekspor unggulan nasional, khususnya wilayah provinsi Jawa Timur.

Pada penerbangan perdana, Garuda Indonesia mengangkut komoditas unggulan dari Jawa Timur yang terdiri atas produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Jawa Timur, komoditas perikanan, dan hasil produksi lainnya.

Penerbangan khusus kargo rute Surabaya-Hong Kong dilayani sebanyak satu kali setiap minggunya dengan armada Airbus A330-300 yang memiliki daya angkut mencapai 30-40 ton di setiap penerbangannya. Rute khusus kargo Surabaya-Hong Kong ini berangkat dari Bandara Internasional Juanda pada pukul 06.00 WITA dan tiba di Hong Kong pukul 12.00 waktu setempat.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiapatra mengungkapkan, penerbangan rute khusus kargo menjadi salah satu peluang bisnis yang

secara berkelanjutan akan diperkuat selaras dengan tren kebutuhan pengangkutan kargo yang terus tumbuh.

"Dengan pengembangan jaringan penerbangan kargo ini, harapan kami kegiatan *direct export* komoditas unggulan dari kawasan Surabaya dan sekitarnya dapat semakin berdaya saing sehingga dapat mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya wilayah Jawa Timur," ungkap Irfan dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (7/3).

Pihaknya, sambung Irfan, mengharapkan kehadiran penerbangan kargo ini dapat semakin meningkatkan daya saing kualitas produk komoditas unggulan di Jawa Timur dengan waktu pengiriman yang lebih singkat tanpa harus melakukan transit di beberapa *hub* penerbangan.

"Dengan demikian, kualitas produk menjadi lebih terjangkau dengan biaya logistik yang lebih kompetitif. Harga komoditas ekspor dapat menjadi lebih bersaing di pasar global," papar Irfan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik pembukaan penerbangan khusus kargo tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh layanan penerbangan khusus kargo rute Surabaya-Hong Kong yang mulai beroperasi per 6 Maret. Hal ini tentunya akan berkontribusi positif untuk membantu *export* kita ke Hong Kong sekaligus meningkatkan daya saing produk kita," ungkap Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah mengharapkan pembukaan penerbangan khusus kargo tersebut dapat dilihat sebagai peluang bagi pelaku UMKM, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur.

"Harapannya, peluang tersebut bisa meningkatkan semangat yang lebih bagi pelaku UMKM kita untuk berkembang dan berdaya saing," lanjut Khofifah.

Sebelumnya, sejalan dengan upaya pengembangan jaringan penerbangan logistik dari wilayah Jawa Timur, Garuda Indonesia juga telah menerbangkan penerbangan khusus kargo dengan rute Surabaya-Banjarmasin-Balikpapan enam kali setiap minggu menggunakan armada B737-800NG dengan rata-rata pengangkutan komoditas telur tetas dan *general cargo* hingga 13,5 ton di setiap penerbangannya. (esa)

## Perjalanan KA Terganggu Akibat Longsor di Blitar

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas adanya gangguan perjalanan kereta api (KA) akibat jalur KA terkena longsor di petak jalur antara Stasiun Pohgajih - Kesamban, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Minggu (7/3) pukul 16.54. Longsor menutupi jalur KA di KM 87+500 setelah sebelumnya wilayah tersebut diguyur hujan lebat.

"Kami atas nama manajemen KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat jalur KA terkena longsor di wilayah tersebut," ujar VP *Public Relations* KAI Joni Martinus dalam

keterangan resmi, Minggu (7/3).

Sampai dengan saat ini terdapat dua KA yang tertahan, yaitu KA Malabar dari Stasiun Malang menuju Bandung keberangkatan pukul 17.10 tertahan di Stasiun Kepanjen dan KA Panatara dari Stasiun Blitar menuju Surabaya Gubeng keberangkatan pukul 17.35 tertahan di Stasiun Wlingi.

Joni menambahkan, KAI saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perjalanan kereta api di lokasi tersebut. Penanganan dilakukan baik dari sisi pengaturan operasional KA maupun prasarana jalur KA. KAI juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses perbaikan. Estimasi waktu perba-

ikan jalur kereta tersebut adalah dua jam sejak kejadian.

"Kami berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan KA. Semoga cuacanya mendukung dan longsor segera teratasi agar jalur kereta api yang terdampak kembali normal serta perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan lancar," jelas Joni.

Pada bagian lain PT KAI Daop 8 Surabaya memperpanjang relasi Kereta Api (KA) Mutiara Timur dari yang sebelumnya Surabaya Gubeng-Ketapang PP menjadi Yogyakarta-Surabaya Gubeng-Ketapang PP.

"Perpanjangan operasi KA Mu-

tiara Timur ini guna memenuhi transportasi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Manajer Humas Daop 8 Surabaya Luqman Arif, di Surabaya, Minggu (7/3).

Adapun rangkaian yang digunakan KA Mutiara Timur relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng-Ketapang, terdiri atas empat kereta eksekutif dan tiga kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk sesuai protokol kesehatan 308 penumpang. KA Mutiara Timur relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng-Ketapang tiba di Surabaya Gubeng pukul 00.53 WIB, berangkat kembali pukul 01.20 WIB dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 07.30 WIB. (esa/ant)



**Pembangunan Jembatan Jalan Lintas Sumatera**

Kendaraan melintasi Jembatan Merangin di samping pembangunan Jembatan Merangin 2 di Jalan Lintas Sumatera Jambi-Sumbar, Bangko, Merangin, Jambi, Minggu (7/3/2021). Pembangunan jembatan di atas pertemuan arus Sungai Batang Merangin dan Sungai Batang Mesumai dengan nilai proyek Rp58 miliar dari APBN tersebut ditargetkan selesai dalam tahun ini.



ANDREAS GEBERT / POOL / AFP



**Bayern Menangi "Der Klassiker"**

Gelandang Bayern Munich (Bayern) asal Jerman Joshua Kimmich (kiri bawah) berduel dengan pemain tengah Dortmund asal Jerman Mahmoud Dahoud saat pertandingan sepak bola divisi pertama Bundesliga Jerman, FC Bayern Munich vs BVB Borussia Dortmund di Munich, Jerman, Sabtu (6/3/2021) malam waktu setempat. Bayern menang laga bertajuk "Der Klassiker" tersebut dengan skor 4-2.

# Siloam Hospitals Group Dukung Vaksinasi Lansia di Jakarta

Oleh Indah Handayani

▶ JAKARTA – Siloam Hospitals Group bekerja sama dengan Lippo Mall Indonesia menggelar vaksinasi untuk lanjut usia (lansia) di wilayah DKI Jakarta. Lokasi vaksinasi berada di Lippo Mall Kemang yang sudah dimulai pada 4 Maret 2021 dan Lippo Mall Puri sejak 9 Maret 2021.

Vaksinasi dilakukan setiap Senin hingga Sabtu pada pukul 10.00-16.00 WIB. Program itu dilakukan dalam rangka mendukung percepatan program vaksinasi lansia Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Direktur RS Siloam TB Simatupang, dr Harijanto Solaeman MM mengatakan, pihaknya bersyukur mendapatkan bisa kesempatan membantu Dinkes DKI untuk mempercepat program pemberian vaksinasi pada lansia. Hal itu bertujuan agar percepatan ini bisa terealisasi dengan secepat-cepatnya.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Lippo Mall yang mempunyai lahan sangat besar untuk dapat mengakomodasi agenda ini. Dia pun menegaskan, apapun yang menjadi agenda utama negara, tentunya merupakan suatu tanggung jawab dan panggilan bagi Siloam untuk turut ambil bagian. "Oleh karena itu, Siloam siap mendukung setiap program pemerintah demi Indonesia yang lebih sehat dan baik," ungkap dr Harijanto melalui pesan singkat yang diterima *Investor Daily*, Minggu (7/3).

Pemilihan lokasi di dua Mall Lippo tersebut, kata dr Harijanto, sudah melalui berbagai tahap pemikiran. Alasan utama tentunya sehubungan dengan bagaimana Siloam bisa merealisasikan agenda Dinkes DKI untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada sebanyak-banyaknya orang dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu, diperlukan area besar yang dapat mengakomodasi agenda tersebut. Misalnya, saja Lippo Mall Kemang mempunyai banyak area *outdoor* yang nyaman serta ramah terhadap lansia. "Sehingga pelayanan kepada orang banyak dan terutama lansia bisa terwujud. Terlebih lagi lokasi yang dekat dan mudah dijangkau dari berbagai pihak di Jakarta Selatan juga menjadi faktor besar dalam keputusan ini," papar dr Harijanto. Menurut dr Harijanto, melayani lansia tentunya membutuhkan *skill* tersendiri. Selain sertifikasi sebagai vaksinator dari Dinkes DKI, tentunya sehubungan dengan banyaknya pasien geriatri yang sudah Siloam Hospitals

TB Simatupang layani, stafnya pun sudah terlatih untuk menangani para lansia jika terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Saat ini, pihaknya sudah memberikan vaksinasi kepada kurang lebih 250 orang per hari. Melihat animo masyarakat setempat, pihaknya pun siap untuk melayani lebih banyak. "Siloam Hospitals siap mendukung program pemerintah di setiap cabang Siloam," tegas dr Harijanto. Para lansia, kata dr Harijanto, diharapkan turut mengambil bagian dalam program vaksinasi ini. Para lansia perlu berdiskusi dengan dokter untuk memastikan kesiapan tubuh sebelum menjalani program vaksinasi. Beberapa test dapat dilakukan sebelum menjalani vaksinasi sesuai petunjuk dokter. "Setelah itu, tentunya daftarkan diri melalui tautan resmi [dki.kemkes.go.id](http://dki.kemkes.go.id), melakukan penjadwalan di MySiloam App agar dapat dilayani petugas sesuai dengan waktu yang diinginkan dan agar dapat menjalankan *social distancing* sesuai protokol pemerintah," jelas dr Harijanto. (iin)

## Siloam Hospitals Purwakarta Buka Layanan Uji Kuantitatif Serologi

PURWAKARTA - Siloam Hospitals Purwakarta membuka layanan uji kuantitatif serologi. Dokter spesialis Patologi dari Siloam Hospitals Purwakarta, dr Adrian Suhendra SpPK menjelaskan, uji serologi kuantitatif merupakan cara medis melalui pengambilan sampel darah yang berfungsi guna mengidentifikasi patogen di dalam tubuh manusia. "Tujuannya untuk mengetahui dan melihat respon kekebalan tubuh seseorang atau antibodi dari seseorang yang telah mendapatkan suntik vaksin Covid-19," ungkap dr Adrian di sela *live Instagram*, Sabtu (6/3).

Uji kuantitatif serologi, kata dr Adrian, dilakukan pada laboratorium khusus serologi yang bertujuan membaca hasil pemeriksaan secara kuantitatif. Wujudnya adalah jumlah titer antibodi yang ada di dalam darah. "Uji tes ini berbeda dengan rapid tes serologi sebelumnya, metode kualitatif, yaitu menunjukkan apakah hasil tes reaktif atau non reaktif. Intinya adalah metode serologi kuantitatif berfungsi untuk mengecek imun tubuh pasca vaksinasi," papar dia. Tes kuantitatif serologi, menurut dr Adrian, menggunakan immunoassay untuk menentukan nilai kuantitatif titer antibodi terhadap protein *Spike-Receptor Binding Domain* (S-RBD) Covid-19 dalam darah manusia. Metode ini akan mem-

bantu memberikan hasil nilai antibodi seseorang secara akurat sehingga pasien bisa mengetahui bagaimana respons imun tubuhnya terhadap Covid-19. Tes ini termasuk jenis tes imunologi yang bersifat mengevaluasi titer antibodi Covid-19 dalam tubuh seseorang baik itu pasca vaksin Covid-19 maupun kondisi setelah terpapar Covid-19. "Karena itu, tes kuantitatif serologi berbeda dengan tes kualitatif serologi pada umumnya," jelas dr Adrian. Menurut dr Adrian, tes kuantitatif serologi bertujuan untuk skrining Covid-19, sementara tes kuantitatif serologi bertujuan mengetahui titer antibodi seseorang terhadap Covid-19

yang ditunjukkan dengan satuan u/mL. Selain itu, tes kuantitatif antibodi juga berguna dalam menilai respons imun humoral seseorang yaitu antibodi terhadap Covid-19 baik pada penyintas Covid-19 maupun pada individu penerima vaksin. Dalam prosesnya, pengumpulan sampel tes kuantitatif serologi diambil dari darah vena dengan waktu proses pemeriksaan adalah sekitar 120 menit. "Tes serologi kuantitatif pada umumnya bisa dilakukan secara berkala dan direkomendasikan untuk pasien yang sudah di vaksinasi setelah periode 14 hingga 60 hari dari penyuntikan vaksin tahap kedua," kata dia. (iin)

## Penayangan *Fast & Furious* Ditunda Hingga Juni 2021

LOS ANGELES - Universal Pictures menunda penayangan global film *Fast & Furious* terakhir atau *F9* selama satu bulan hingga 25 Juni 2021. Seperti dikutip *Reuters*, perubahan terbaru oleh studio Hollywood ini mencoba untuk mengukur kapan penonton bioskop akan kembali ke bioskop dalam jumlah besar. Langkah tersebut mengisyaratkan bahwa Universal yakin kondisi akan semakin pulih pada musim panas mendatang. Sebab, vaksin virus corona menjadi lebih banyak tersedia di Amerika Serikat dan Kanada. AS dan Kanada menjadi pasar film terbesar di dunia. Bioskop di New York City, merupakan wilayah penonton bioskop terbesar kedua di Amerika Serikat, dijadwalkan mulai dibuka kembali pada akhir pekan ini. Operator teater termasuk AMC Entertainment, Cineworld Plc dan Cinemark Holdings Inc berharap



**Fast and Furious 9**

mereka akan memiliki film *blockbuster* untuk ditayangkan musim panas ini. Apalagi, musim panas menjadi musim yang paling menguntungkan dalam

industri ini. Nampaknya, Studio film tidak ingin merilis film aksi termahal sampai mereka dapat menarik banyak orang untuk menutup biaya produksi

dan pemasaran. Film aksi beranggaran besar berikutnya dalam jadwal Hollywood, film Marvel Walt Disney Co, *Black Widow*, saat ini masih dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 7 Mei. Waralaba *Fast & Furious* tentang sekelompok pembalap jalanan telah meraup lebih dari total US\$ 5 miliar dalam penjualan tiket global sejak film pertama dirilis pada 2001. *F9* yang dibintangi Vin Diesel dan Michelle Rodriguez, awalnya dijadwalkan rilis pada April 2019 tetapi telah ditunda beberapa kali. Film lain yang direncanakan untuk tayang pada musim panas adalah *Top Gun: Maverick* yang dibintangi Tom Cruise, dan *Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings* dari Marvel, keduanya akan tayang pada Juli 2021. Setelah memindahkan *F9* hingga akhir Juni, Universal juga menunda perlisn film animasi *Minions: The Rise of Gru* dari awal Juli 2021 hingga Juli 2022. (iin)

## Good Doctor Permudah Akses Layanan Kesehatan

JAKARTA – Good Doctor Technology Indonesia, perusahaan penyedia layanan kesehatan terpadu berbasis teknologi, meluncurkan aplikasi Good Doctor untuk mempermudah pelayanan kesehatan telemedis bagi keluarga Indonesia. *Managing Director* Good Doctor Technology Indonesia, Danu Wicaksana mengatakan hasil survei layanan telemedis oleh Nielsen pada September 2020 menyebutkan dari total populasi pengguna internet di Indonesia, diestimasikan hanya 47% pengguna internet yang menggunakan aplikasi telemedis. Sementara, ada 53% lainnya belum menggunakan aplikasi telemedis. Selain itu, publikasi yang diterbitkan World Bank pada 25 Januari 2021 menyebutkan, konsultasi kesehatan melalui telepon dan saluran daring masih tergolong jarang di Indonesia. Dari rumah tangga yang memerlukan pelayanan kesehatan, hanya 7% melakukan konsultasi melalui telepon atau saluran daring. Danu menambahkan sebesar 40% dari yang tidak menggunakan layanan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui ketersediaan layanan atau tidak tahu cara menggunakannya. Sedangkan 17% sisanya memilih konsultasi secara fisik bertemu dengan dokter. Sisanya, tidak bisa mengakses layanan tersebut karena kendala teknologi atau akses internet yang terbatas, permasalahan biaya, serta kepedulian atas keamanan data personal dan kualitas konsultasi daring. "Data-data tersebut di atas, menunjukkan adanya ruang bagi aplikasi telemedis untuk terus tumbuh di Indonesia agar dapat turut ambil bagian dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau," ungkap dia di sela peluncuran, belum lama ini. Menurut Danu, Good Doctor hadir sebagai aplikasi yang dapat menjadi pilihan dan solusi layanan kesehatan lengkap. Layanan yang tersedia mulai dari tanya jawab kesehatan secara daring (*online*) selama 24 jam, tujuh hari bersama dokter-dokter dari 26 spesialisasi, *e-commerce* (perdagangan elektronik) untuk berbagai produk kesehatan dan kebugaran; janji medis di lebih dari seribu rumah sakit, laboratorium, serta berbagai konten mengenai kesehatan, dan gaya hidup yang dikurasi oleh tim dokter. Sukses bermitra dengan Grab Indonesia dalam menghadirkan solusi layanan kesehatan, menurut Danu, Good Doctor melanjutkan komitmennya dalam memberikan majemukan pelayanan kesehatan berbasis aplikasi serta membangun ekosistem digital di bidang kesehatan. "Peluncuran aplikasi Good Doctor ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan untuk membantu penggunaan teknologi di bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tengah tantangan pandemi sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi Covid-19," papar dia. (iin)

## Masyarakat Harus Menjaga Kesehatan Mental



**Denada Tambunan**

JAKARTA - Denada Tambunan, *Brand Ambassador* Zumba di Indonesia, meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan mental, selain kesehatan fisik. Salah satu caranya adalah melakukan aktivitas yang membuat perasaan bahagia di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19. "Kita harus terus menjaga kondisi tubuh, tapi harus diingat pula bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya. Kendalikan dan ubahlah dirimu, dan mulailah *step into happy*," kata Denada dalam keterangan pers yang diterima *Investor Daily*, Kamis (4/3). Menurut Denada, beberapa orang sudah berhasil menyesuaikan norma kesehatan dengan mudah, tetapi sebagai makhluk sosial, stres karena pandemi masih mengganggu sebagian besar masyarakat, terutama jika tidak dikelola dengan mekanisme penanggulangan yang positif. Menurut sebuah studi global yang diterbitkan di Plos One, satu dari tiga orang dewasa mengalami kecemasan dan depresi akibat Covid-19. Penemuan ini berlaku terutama untuk wanita dan orang dewasa yang lebih muda. "Tahun lalu, tidak mudah bagi siapa pun, termasuk saya. Bertemu dengan murid kelas zumba saya di studio adalah momen terbaik saat menjalani hari-hari. Energi saya datang dari interaksi dengan orang lain. Meski kami jarang bertemu secara langsung, kelas zumba virtual menjadi pelampiasan yang baik bagi saya dan murid-murid untuk mengelola stres dan kecemasan," ujar Denada. Sementara itu, psikolog Rr Finandita Utari menambahkan peluncuran vaksin membawa harapan dalam perjuangan melawan pandemi, tetapi Covid-19 akan terus menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia dalam jangka panjang. Dampak psikologis akibat pengaruh pandemi dapat bertahan lama dan sebagian orang dapat mengalami masalah kesehatan mental berkepanjangan. Agar kesehatan mental dapat selalu terjaga, satu hal terpenting adalah perlu bahagia. "Memiliki istirahat cukup, berolahraga dan meluangkan waktu untuk membahagiakan diri dapat membuat seseorang merasa diri sangat positif, berenergi dan bahagia," jelas Finandita. Denada menyarankan semua orang untuk melihat situasi saat ini secara positif dan menganggapnya sebagai peluang untuk memulai transformasi pikiran, tubuh, dan jiwa secara utuh. Dia menambahkan hubungannya dengan anak menjadi sangat dekat, karena menghabiskan banyak waktu bersama di rumah. Ketika keduanya jenuh, dia dan sang anak mulai menari mengikuti lagu zumba favorit, meskipun hanya selama 5 atau 10 menit. "Aktivitas seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan mood dan menjadi terapi instan untuk menghilangkan stres. Jika kita meningkatkan intensitas zumba selama 15 menit atau lebih, kita bisa membakar kalori sambil bersenang-senang," jelas Denada. Denada menambahkan untuk tidak lupa untuk menjaga pola makan yang sehat selama gerakan fisik dibatasi karena tetap diam di rumah, tapi selesailah, jangan lupa mengonsumsi makanan favorit. Setiap orang bisa menjaga keseimbangan dengan rutinitas olahraga, dan dapat dengan mudah menemukan kelas kebugaran secara virtual. (iin)



## Menperin Kawal 81 Proyek Manufaktur

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya akan mengawal realisasi 81 proyek manufaktur dengan total nilai investasi sebesar Rp 921,84 triliun untuk pengembangan hilirisasi industri dalam kurun waktu tahun 2023-2030. Dari total investasi tersebut, ditargetkan bisa menyerap 125.286 tenaga kerja baru.

“Dari investasi ini, tentunya akan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Hal ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Selain itu juga akan mengurangi tingkat pengangguran, baik itu karena pandemi atau angkatan kerja baru,” kata Menteri AGK dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu.

Menperin menegaskan, pemerintah tetap fokus untuk terus meningkatkan investasi di tanah air. Sebab, upaya strategis tersebut dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa kunci pertumbuhan ekonomi kita adalah di investasi. Maka dari itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif berkontribusi dalam menarik investasi baru, khususnya sektor industri,” terang dia.

Di sektor hilirisasi petrokimia, kata Agus, Kemenperin terus mendorong realisasi investasi pengembangan industri petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, yang

akan menghasilkan produk olefin dan aromatik. Berikutnya, Kemenperin memacu hilirisasi nikel dalam rangka meningkatkan nilai tambah bahan baku nikel dan kobalt yang tersedia di Indonesia. Bahan baku ini dapat digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

“Saat ini, secara total kita punya 30 smelter yang beroperasi, kemudian yang sedang konstruksi 20 smelter, dan dalam tahap *feasibility study* sebanyak 9 smelter. Smelter ini berperan untuk menguatkan struktur industri dalam negeri agar lebih berdaya saing di kancan global,” jelas Menperin.

Implikasi dari kebijakan hilirisasi ini, menurut dia, industri logam dasar pada tahun 2020 tumbuh 5,87%, ekspor pun tumbuh 30%, bahkan mampu menyumbang devisa negara hingga US\$ 22 miliar. Saat ini, Indonesia memiliki 30% dari cadangan bijih nikel dunia, sehingga menjadi jaminan bahan baku untuk investasi di sektor baterai kendaraan listrik, yang pada akhirnya akan menarik investasi di sektor kendaraan listrik.

Menperin menyebut, beberapa perusahaan yang akan memproduksi bahan baku baterai listrik nikel-kobalt, di antaranya adalah PT QMB (Sulawesi Tengah), PT Halmahera Persada Lygend (Pulau Obi), PT Weda Bay Nickel (Maluku Utara), dan PT Smelter Nikel Indonesia (Banten). (leo)

## Aprindo Minta Kemendag Jaga Pasokan Bahan Pokok

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjaga pasokan bahan pokok dan penting (bapokting), terutama menjelang ramadan dan Idul Fitri.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, selama ini peritel modern berusaha menjual bapokting dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena itu, dia meminta supaya barang di berbagai daerah tidak sampai langka, yang dapat merugikan pedagang ritel modern.

“Peritel menjadi *price leader*, karena harga barang yang kami jual sudah *fixed*, tidak naik turun. Harga barang kita sesuai pakta dengan kontrak awal yang tidak sampai HET (Harga Eceran Tertinggi). Seperti tahun lalu, ketika harga gula sampai Rp 22 ribu per kilogram (kg), kami masih mencoba jual Rp 12.500 per kg,” kata Roy dalam rapat kerja Kemendag, Jumat (5/3).

Karena itu, Roy mengingatkan, ritel modern juga turut menjaga inflasi di Indonesia. Dia pun meminta

pemerintah untuk melindungi usaha ritel dengan terus mendukung kegiatan peritel modern.

Menurut Roy, sebelumnya Aprindo juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bappebti untuk menjadikan toko ritel modern pelaksana Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan ini, Aprindo berharap dapat membantu stabilisasi harga, tidak hanya saat pasokan menipis, tetapi juga saat pasokan berlebih, hingga berpotensi merugikan petani.

Namun demikian, Roy mengatakan, gudang peritel sebetulnya terbatas. Sehingga, dia menepis tuduhan peritel modern kerap menjual barang untuk meningkatkan harga bapokting.

“Sangat tidak mungkin ketika kita berusaha efisien dan efektif, kemudian dituduh bahwa peritel sering memimbun barang. Bagaimana mungkin?, karena gudang kami sangat terbatas. Jadi kami tidak mungkin ekstra pasokan, karena sudah dikalkulasi semuanya. Termasuk apapun yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, sudah diukur dan dilakukan dengan baik,” imbuh Roy. (sny)

### SERAP INVESTASI RP 5 TRILIUN

# 50 Investor Minati KEK Likupang

Oleh Eva Fitriani

▶ JAKARTA – Sebanyak 50 investor menjajaki peluang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Sulawesi Utara. KEK Pariwisata yang masuk dalam lima destinasi super prioritas itu, tengah dikebut pembangunannya dan ditargetkan mampu menyerap investasi hingga 5 triliun serta 65 ribu tenaga kerja baru.



### Deklarasi Dukungan Kadin Daerah Indonesia Timur

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie (tengah), Ketua Kadin Sulut Rio Dondokamby (kanan) dan Ketua Kadin Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (kiri), mengemukakan tangan bersama saat Deklarasi Dukungan Kadin daerah Indonesia Timur, di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (06/03/2021). Sebanyak 9 Kadin daerah di Indonesia Timur menyatakan dukungan kepada Anindya Bakrie untuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Rosan Roeslani yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

“Ada lebih dari 50 investor yang berkomitmen menjajaki penanaman investasi di sini. Saya juga mendapat komitmen untuk penyiapan video investasi, karena yang ingin kita tarik adalah kekuatan investor-investor untuk menghadirkan konsep terkini,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangan resminya, Minggu (7/3).

Dalam tinjauannya ke KEK Likupang bersama 50 calon investor, Sandiaga menjelaskan, terdapat beberapa peluang investasi yang bisa digarap. Antara lain infrastruktur di dalam kawasan termasuk Sustainability Concept dan menciptakan Smart Tourist Destination (STD). Kemudian Cultural Village sebagai pusat untuk destinasi wisata dan pusat ekonomi kreatif untuk menggiatkan dukungan terhadap masyarakat setempat.

“Serta pembangunan kawasan tahap I (3 tahun pertama) di atas lahan seluas 92,89 hektare dengan nilai investasi Rp 914 miliar, mencakup resort, utilitas, area komersial, danau, juga ruang terbuka hijau,” ujar dia.

Sandiaga mengungkapkan, KEK Likupang yang dikembangkan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) berada di atas lahan seluas 197,4 hektare yang akan dibangun dalam tiga tahap. Total nilai investasi pembangunan kawasan sebesar Rp 2,1 triliun, dan diperkirakan menarik investasi Rp 5 triliun hingga tahun 2040.

“Melalui KEK Likupang diharapkan dapat mendorong realisasi investasi sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara, yang berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020, mencapai Rp 939,13 miliar dengan PMA mencapai Rp 80 miliar, dan PMDN mencapai Rp 859,13 miliar,” ujar dia.

Sandiaga berharap, investor yang masuk ke KEK Likupang bisa membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui industri dan jasa pariwisata bertaraf internasional. Sehingga, dapat menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada Sabtu (6/3), lebih dari 50 investor tersebut bertemu stakeholder terkait dalam “Gala Dinner Tourism & Creative Economy Investment Forum in North Sulawesi” guna mendengar lebih jauh tentang pengembangan KEK Pariwisata Likupang. Forum ini merupakan pertemuan dengan beberapa pengusaha sekaligus investor yang digagas untuk mendorong serta mendukung percepatan pengembangan industri dan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Likupang yang merupakan Destinasi Super Prioritas dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” ujar Sandiaga.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokamby, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandowu, Anggota Komisi X DPR RI Adriana Dondokamby, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulung, serta para investor yang dipimpin Peter F Gontha selaku pelaksana forum investasi. Serta mendampingi Menparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Hari Santosa Sungkari.

Sandiaga memastikan, KEK Likupang menjadi salah satu dari lima destinasi super prioritas yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah dalam membangunnya, khususnya terkait infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik. Salah satu yang menjadi perhatian khusus Menparekraf adalah jaringan telekomunikasi yang masih perlu ditingkatkan.

“Untuk jaringan, saya sudah lapor dengan menteri komunikasi dan informatika. Kita langsung terhubung juga dengan direktur utama Telkom dan beberapa perusahaan provider. Komitmennya, dalam minggu depan akan dikirim tim ke sini dan kita akan pantau minggu per minggu. Mudah-mudahan kerja sama dengan Bakti Kominfo dan perusahaan provider bisa menyelesaikan infrastruktur jaringan ini,” kata Sandiaga.

Sandiaga berharap, pembangunan KEK Likupang tidak hanya terbatas kepada meningkatnya pendapatan daerah dan masyarakat sekitar, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta sosial budaya dan lingkungan terjaga dengan baik.

### Roadshow

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga menyaksikan penandatanganan kerangka kerja sama antara PT Minahasa Permai Resort Development dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) mengenai Rencana Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang.

Kerangka kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pendirian atau pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*) sebagai Badan Usaha Pembiangan dan Pengelolaan (BUPP). Hal ini merupakan wujud konkret dari konsep *public-private-people partnership*.

“Saya akan menyiapkan kelengkapan dokumentasi untuk menarik investor, dan langsung diikuti dengan *roadshow* (promosi investasi). Tahun

ini adalah tahun penyiapan, dan tahun depan mudah-mudahan kita bisa memulai satu kegiatan yang konkret, sehingga sebelum tahun 2024 sebagian dari fase KEK Likupang ini sudah bisa terbangun,” kata Sandiaga.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya apa yang sudah menjadi program pemerintah, khususnya Kemenparekraf yang akan dilakukan di sini. Sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tentu kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya,” kata Joune Ganda.

Dia mengungkapkan, pengembangan KEK Likupang diprediksi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sebesar 162 ribu pada 2025. Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 16% dari target yang ditetapkan yaitu 1 juta wisatawan mancanegara pada 2025.

Joune Ganda menambahkan, pemerintah daerah juga sedang membangun sekolah kejuruan pariwisata yang diharapkan dapat ikut menambah jumlah tenaga pariwisata. “Tenaga pariwisata yang siap pakai dan tentunya akan mengantisipasi perkembangan kawasan ekonomi khusus ini,” kata Joune Ganda.

*Project Development Head* PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) Paquita Widjaya mengatakan, dalam pengembangan KEK Likupang rencananya dibangun berbagai atraksi dan fasilitas yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Mulai dari Marina Club, Waterpark, Sailing Club, Retail Area, Sport Arena, Desa Wisata, dan juga Wallace International Conservation Resort and Marine Park.

## HUKUM BISNIS

## Dinamika Kebijakan Nasional di Tengah Pandemi: Kesejahteraan Masyarakat atau Ancaman Global?



Andreas Tedy Mulyono\*

Prioritas kebijakan nasional di tengah pandemi Covid-19 menjadi wacana lintas negara. Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk menanggulangi dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, arus deras global mengungkapkan bahaya lain yang lebih mengancam daripada Covid-19, yaitu isu perubahan iklim. Di satu sisi, Covid-19 bersifat akut; muncul seketika dan menyebar tiba-tiba.

Di sisi lain, perubahan iklim merupakan isu lama yang kronis menghantui kehidupan masyarakat dunia. Permasalahannya adalah bagaimana prioritas kebijakan hukum nasional menghadapi pandemi yang akut dan perubahan iklim yang kronis.

### Latar Belakang

Tokoh bisnis dunia, Bill Gates gearar mempropagandakan ancaman *cli-*

*mate change* (perubahan iklim) yang dampaknya lebih berbahaya dari pada Covid-19. Viral diberitakan bahwa ia sangat prihatin.

Ramalan Gates tentang bahaya perubahan iklim dikuatirkan terbukti seperti halnya Covid-19. Menarik juga pernyataan dari WMO-PBB (UN’s World Meteorological Organizations) bahwa perubahan iklim harus dilawan seperti pandemi virus corona.

Padahal, perubahan iklim dan virus corona mempunyai karakter yang berbeda. Setidaknya berbeda secara asal-muasal.

Isu perubahan iklim sebenarnya telah ada beberapa dekade sebelum pandemi ini. Secara historis, wacana ini merupakan derivatif dari meta-prinsip *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.

Komisi Brudtland menggaungkan dalam laporan tahun 1987 berjudul “Our Common Future”. Selanjutnya secara kontemporer, isu perubahan iklim ini berubah alarmist menjadi pemanasan global (*global warming*).

Propaganda seperti ini berlanjutan dari *climate change*, *climate strike* (2019), dan terakhir *climate adaptation* (25-26 Januari 2021). Berbeda dengan virus corona yang disinyalir muncul di sekitar akhir tahun 2019 atau awal 2020. Perkembangan kontemporer perubahan iklim cenderung menjadi bentuk tekanan global (*geopolitical tension*).

Tekanan yang berasal dari ideologi lingkungan hidup yang berkarakter universal-global. Dimensi politik global sinergis dengan wacana ini karena konsep negara diperlakukan sebagai sebuah sub-nasional, bukan sebagai sebuah negara berdaulat (Heywood, 2011).

Ada yang menyebutnya sebagai *new world order*, yang ditandai terben-

tuknya *transnational communities* dan *diasporas*. Sekaligus mendekonstruksi konsep *state* menjadi *stateless*.

Merujuk pada Pasal 1 The Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State (1933): “The state has four features: (i) a defined territory; (ii) a permanent population; (iii) an effective government; and (iv) the capacity to enter into relations with other states.”

Kritiknya adalah konsep “internasionalisasi negara” (*internationalization of the state*) sebagai dampak globalisasi. Seperti diutarakan oleh Cox (1993): “The mutual dependence between markets and states has in fact intensified as a result of globalization, leading”.

Memang masih menjadi wacana; ada berbagai pro dan kontra. Sekilas mirip dengan konsep desentralisasi dalam wacana otonomi daerah.

Dengan latar belakang uraian di atas, perubahan kebijakan nasional dalam memitigasi pandemi Covid-19 dan kebijakan mengenai isu global perubahan iklim (*climate change*) berkorelasi dalam kaitan dengan ketidakpastian periode waktu penanganannya dan total dana yang harus dialokasikan.

Karenanya, berikut ini akan diulas progres pendanaan program pengurangan Covid-19 dan kemudian pengkinian kebijakan iklim. Pendekatan artikel ini sejatinya menuju pada suatu prioritas kebijakan nasional terkait pandemi yang akut dan isu iklim yang kronis.

### Transparansi Covid

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bentuk nyata dari seberapa besar Pemerintah mencadangkan dana untuk menanggulangi Covid-19. Anggaran PEN tahun 2021 sebesar Rp 619 triliun; lebih

besar dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp 579 triliun. Nakaikan yang signifikan di sektor kesehatan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi sektor kesehatan yang pada tahun lalu hanya Rp 63,5 triliun, tahun ini meningkat menjadi Rp 173,3 triliun. Jumlah ini termasuk biaya vaksinasi, fasilitas medis dan infrastruktur, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBP/BP.

Peran dan fungsi Menteri Keuangan semakin krusial. Pengaturan normatifnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (PP 28/2015). Tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan demikian, secara nasional, berdasarkan PP 28/2015, seorang Menteri Keuangan adalah “penjaga keuangan negara” (Nagara Dana Rakca). Dalam kaitannya dengan alokasi dana iklim, seorang menteri keuangan mempunyai otoritas langsung maupun tidak langsung dalam setidaknya tiga hal.

Pertama, menggunakan kebijakan fiskal. Kedua, mengelola keuangan publik. Ketiga, mobilisasi pendanaan dalam mendorong aksi perubahan iklim.

### Transparansi Climate

Budget Negara untuk proyek-proyek iklim juga sangat luar biasa. Hal ini sempat terkaik dalam Konferensi Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan RI tanggal 27 Agustus 2020. Berdasarkan grafik, total belanja iklim dari 2016-2020 mencapai sekitar Rp 448,3 triliun. Harapannya, prestasi Sri Mulyani yang

ditunjuk menjadi *co-chair* Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim (The Coalition of Finance Ministers for Climate action) 2021-2023, bukan karena budget nasional yang sangat besar tersebut di atas. Kabarinya, Sri Mulyani terpilih di antara tiga Menteri dari Indonesia, Filipina, dan Uganda. Dia menggantikan Menteri Keuangan Chile.

Namun kenyataannya, selama ini Pemerintah memang telah mengalokasikan anggaran iklim. Bukan hanya dari APBN, tetapi juga APBD dan sumber-sumber lainnya.

Telah terbentuk juga Pooling Fund Bencana yang menggunakan instrumen pembiayaan seperti Green Sukuk. Juga membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan terobosan dan instrumen pembiayaan inovatif. Namun di sisi lain, apakah ada perhitungan untung-rugi secara finansial (*cost and benefit analysis*) sebelum terbitnya suatu kebijakan? Setidaknya ada gambaran angka yang real dan transparan, di samping proyeksi dan benefit lainnya.

Miris juga bila perhitungan hasil emission reduction (ES) REDD+ untuk tahun 2013-2017 sebesar 210 juta tCO<sub>2</sub>e ternyata yang masuk *plotting funding proposal* ke Green Climate Fund (GCF) hanya untuk tahun 2014-2016 hanya sebesar 37 juta tCO<sub>2</sub>e.

Lalu dari nilai tersebut pun hanya disetujui GCF sebesar 20,25 juta tCO<sub>2</sub>e plus 2,5% (Non Carbon Benefit); sehingga potensi RBP yang diterima Indonesia, dengan asumsi harga \$5/ton, hanya US\$ 103,78 juta. Dengan kata lain, biaya atau dana APBN dan

APBD yang dikeluarkan lebih besar daripada dana yang dihasilkan.

Hal lainnya yang penting adalah perihalan dana yang dikelola oleh BPD LH. Sedianya, dana tersebut untuk pemulihan lingkungan hidup. Artinya, dana tersebut tidak secara langsung terkait kesejahteraan masyarakat kita.

Teknis penggunaan dana mengikuti prosedur tertentu melalui lembaga swadaya masyarakat khusus lingkungan hidup. Ditengarai, untuk dana GCF akan disalurkan melalui tujuh puluh LSM asing; dan hanya lima belas LSM lokal.

### Penutup

Secara umum, kebijakan nasional kita dibedakan antara jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Kebijakan jangka pendek berfokus pada penanganan pandemi dan peningkatan daya beli masyarakat kecil. Adapun kebijakan terkait perubahan iklim, cenderung melanjutkan yang telah ada.

Pemerintah cenderung melakukan justifikasi terhadap implementasi ketentuan-ketentuan tersebut. Terkesan belum tercipta keharmonisan serta transparansi yang menyeluruh menghadapi dinamika global.

Harus ada dukungan perhatian terhadap dampak ekonomi suatu kebijakan secara terintegrasi. Beberapa sektor memerlukan analisis (*regulatory impact analysis*). Juga pentingnya sosialisasi masif guna meningkatkan eksistensi dan kemandirian bangsa. Indonesia sebagai negara berdaulat harus mengutamakan amanat rakyat (*people mandate*).

\*Dosen Fakultas Hukum S1 dan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan





Beritasatu Photo/Uthan AR

**Membangkitkan Sektor Energi Nasional**

Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (7/3/2021). Untuk membangkitkan sektor energi nasional, PT Pertamina (Persero) sepanjang 2020-2024 membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US\$ 92 miliar. Jumlah tersebut untuk mendanai sekitar 300 proyek yang akan dikerjakan Pertamina selama lima tahun.

# Smelter Freeport Tetap Harus Rampung pada 2023

Oleh **Rangga Prakoso**

► **JAKARTA** – PT Freeport Indonesia wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (*smelter*) tembaga pada 2023 sesuai komitmen ketika mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2018 silam. Batas waktu tetap berlaku meski Freeport dapat menggarap sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membangun *smelter* tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Eddy Soeparno mengatakan, pembangunan *smelter* merupakan syarat dalam pemberian IUPK. Freeport sudah menyatakan kesediaannya membangun *smelter* dalam jangka waktu lima tahun sejak pemberian IUPK tersebut. Tak hanya itu, komitmen Freeport juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menegaskan larangan ekspor mineral mentah dan olahannya di 2023.

“Kalau Freeport tidak membangun [*smelter*] pada 2023 tersebut, sanksinya tidak bisa ekspor konsentrat,” kata Eddy

kepada *Investor Daily* di Jakarta, akhir pekan lalu.

Semenjak mendapatkan IUPK tersebut, Freeport sudah melaksanakan komitmennya membangun *smelter*. Rencananya, tahap konstruksi *smelter* yang berlokasi di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPIE) Gresik, Jawa Timur itu dimulai pada Agustus 2020 lalu. Namun pandemi Covid-19 melanda dunia yang turut berimbas pada pembangunan *smelter*. Freeport pun mengajukan permohonan penundaan penyelesaian pembangunan *smelter* selama 12 bulan alias hingga 2024. Namun permohonan ini

tidak disetujui pemerintah.

Kemudian muncul Tsingshan Steel yang menawarkan kerjasama pembangunan *smelter*. Perusahaan asal Tiongkok itu bahkan bersedia menanggung lebih dari 90% investasi pembangunan *smelter*. Freeport hanya menanggung sekitar 7,5% dari total investasi sebesar US\$2,5 miliar. Tsingshan menjanjikan *smelter* rampung paling lambat di 2023. Freeport terbuka dengan penawaran tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menerangkan, kedua belah pihak masih terus melakukan penajakan. Dia menegaskan paling lambat akhir Maret ini sudah ada titik temu. “Masih negosiasi,” ujarnya.

Seto menerangkan, kerja sama dengan Tsingshan merupakan solusi terbaik bagi Freeport. Pasalnya, selama ini Freeport di beberapa kesempatan mengutarakan ketidakekonomisan proyek *smelter*. “Selama ini Freeport bilang tidak *profitable*, *capex* (*capital expenditure*/belanja modal) mahal dan lainnya. Tsingshan punya teknologi, tekan angka *capex* dan berikan pendanaan *capex* yang maksimal. Freeport hanya perlu pendanaan sekitar 7,5% dari total proyek,” ujarnya.

Menurut catatan *Investor Daily*, satu hal yang terpenting bagi Freeport ialah kepastian. Bila bekerja

sama dengan Tsingshan maka Freeport bergantung sepenuhnya terhadap perusahaan tersebut. Artinya, Freeport tidak memiliki kendali atas nasibnya. Kekawatiran yang timbul adalah tidak terpenuhinya target pembangunan di 2023. Meski disebut Tsingshan memiliki kemampuan mumpuni dalam penyelesaian pembangunan, tetap dibutuhkan kepastian bagi Freeport. Pasalnya bila tidak bisa ekspor di 2023 maka efeknya yang luar biasa.

Kepastian berikutnya mengenai pasokan konsentrat. Rencananya, Tsingshan membangun *smelter* dengan kapasitas 2,4 juta ton. Bila kebutuhan konsentrat tersebut dipasok oleh Freeport sepenuhnya maka pasokan untuk PT Smelting di Gresik, Jawa Timur akan berkurang. Hal ini lantaran produksi konsentrat Freeport direncanakan terus meningkat hingga mencapai 3 juta ton dalam dua tahun ke depan.

Eddy menerangkan, kerja sama bisnis merupakan ranah internal perusahaan, di mana faktor keekonomian dan komersialisasi *smelter* menjadi faktor pertimbangan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Freeport apakah akan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau tetap menggarap *smelter* sendiri. Namun dia kembali mengingatkan komitmen Freeport menyelesaikan pembangunan *smelter* di 2023.

# Co-firing PLTU, Produksi Listrik Energi Terbarukan Ditargetkan Naik 1,8 GW

**JAKARTA** – PT PLN (Persero) menargetkan produksi listrik energi terbarukan bisa meningkat 1,8 gigawatt (MW) melalui strategi *co-firing* atau penggunaan bahan bakar biomassa di 52 PLTU miliknya. Namun, strategi ini dinilai tidak efektif dalam mencapai target bauran energi terbarukan 23% di 2025.

Dalam *draft* Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang diperoleh *Investor Daily*, terdapat 113 PLTU dengan total kapasitas 18.895 megawatt (MW) yang berpotensi untuk diterapkan *co-firing* biomassa. Namun, *co-firing* ini akan dijalankan di 52 PLTU dengan potensi tambahan produksi listrik energi terbarukan sebesar 1,8 GW.

“Program *co-firing* merupakan salah satu program strategis transformasi PLN dalam mencari bauran energi terbarukan 23% di 2025,” kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasadjo di Jakarta, pekan lalu.

Rincinya, sesuai *draft* RUPTL, *co-firing* ini akan diterapkan di 13 PLTU di Pulau Sumatera, 10 PTU di Kalimantan, 6 PLTU di Sulawesi, 3 PLTU di Maluku dan Papua, 16 PLTU di Jawa dan Madura, serta 4 PLTU di Bali dan Nusa Tenggara. Asumsi produksi listrik hijau dari *co-firing* sebesar 1,8 GW jika persentase biomassa yang digunakan bisa mencapai 6% di boiler tipe PC,



**Darmawan Prasadjo**

50% di CFB, dan 70% di Stoker.

Untuk merealisasikan target tersebut, PLN memperkirakan akan dibutuhkan bahan baku biomassa hingga 9 juta ton per tahun pada 2025. Sehingga, di *draft* RUPTL juga disebutkan bahwa perlu ada dukungan regulasi atau kebijakan terintegrasi, terbentuknya pasokan biomassa yang berkesinambungan, serta skema bisnis dan rantai pasok biomassa yang telah berjalan dengan baik.

Sejauh ini, perseroan telah berhasil melakukan uji coba *co-firing* di 26 PLTU. Sebanyak tujuh di antaranya telah berhasil beroperasi secara komersial, yakni, PLTU Paiton, Ciranjang, Ketapang, Sanggau, Pacitan, Suralaya dan Anggrek.

Namun, Direktur Eksekutif Intitute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tuniwa menilai strategi *co-firing* ini tidak

efektif untuk mengejar target bauran energi terbarukan 23% di 2025. Sekalipun *co-firing* diterapkan di PLTU PLN dengan kapasitas 28 GW, total kapasitas pembangkit yang akan disubstitusikan hanya sekitar 1,4 GW dengan penggunaan biomassa 5%. Padahal, perseroan perlu menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 13 GW untuk mengejar target 23%.

“Jadi *co-firing* ini sebenarnya tidak menambah bauran energi terbarukan secara signifikan. Tetap saja PLN harus membangun kira-kira 10-11 GW pembangkit energi terbarukan sampai dengan 2025,” kata dia kepada *Investor Daily*.

Menurut Fabby, *co-firing* hanya solusi temporer perseroan untuk mengoptimalkan kapasitas PLTU yang ada dan menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa melakukan perbaikan dan pembauran (*retrofitting*) yang esensial. Apalagi usia PLTU PLN sebagian besar masih di bawah 15 tahun dan penambahan investasi untuk *retrofitting* akan meningkatkan biaya produksi listrik.

“Selain itu saya melihat PLN masih terjebak dengan pandangan bahwa batu bara itu murah, dan berharap masih bisa memperpanjang pemakaian batubara. Padahal selain polutif, dalam beberapa tahun mendatang, biaya produksi listrik dari PLTU akan lebih mahal dari pembangkit energi terbarukan,” ungkapnya. (ayu)

# Pertamina Impor LPG dan Sulfur dari Perusahaan Migas UEA

**JAKARTA** – PT Pertamina Patra Niaga, subholding komersial dan niaga PT Pertamina (Persero), telah meneken perjanjian pembelian gas minyak cair (*liquefied petroleum gas*/LPG) dan sulfur dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Penandatanganan ini dilakukan oleh *Vice President Trading and Other Business* Pertamina Patra Niaga Maya Kusmayana dengan *Senior President International Relations* ADNOC Salem Raheb Al Meheiri dalam kegiatan Business Forum Indonesia-Emirates Amazing Week (IAEW) akhir pekan lalu. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al Mazrooei.

Suhail menuturkan, kontrak pasokan LPG dan sulfur ke Per-

tamina ini berlaku untuk empat tahun. Nilai kontrak ini mencapai US\$ 500 juta per tahun atau total US\$ 2,2 miliar tergantung harganya. Kontrak ini juga dapat diperpanjang. Bahkan, peluang untuk kesepakatan-kesepakatan lainnya juga terbuka.

“Kami akan selalu berkomitmen dan mendukung Indonesia dan segala porsyaratannya. Jika kami memang memilikinya (pasokan), Indonesia akan selalu menjadi prioritas,” tegas dia dalam jumpa pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Hasto Wibowo menuturkan, kerja sama ini memastikan keamanan pasokan LPG nasional yang diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun depan, kebutuhan LPG nasional diperkirakan sebesar 8,3 juta ton, dan akan naik menjadi 9,12 juta ton di 2023 kemudian mencapai 10,01 juta ton di 2024. “Saat ini *balance* kebutuhan

impor LPG nasional mencapai 6 juta ton per tahun, harapannya dengan kerja sama ini Pertamina dapat memperluas sumber pasokan dan menjaga kestabilan pasokan,” kata dia dalam keterangan resminya, kemarin.

Dikatakannya, perjanjian ini dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan tetap dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum perjanjian berakhir. Kerja sama ini merupakan salah satu strategi pengadaan *bundling* produk LPG dan petrokimia yang dibeli langsung dari produsen.

“Diharapkan kerja sama ini dapat menciptakan peluang kolaborasi jangka panjang untuk produk LPG dan petrokimia dengan tentunya tetap memperhatikan perkembangan dari bisnis petrokimia serta mengacu kebijakan bauran energi nasional sebagaimana tercantum dalam RUCN (Rencana Umum Energi Nasional),” tambah Hasto. (ayu)

# Penyelesaian 113 Perizinan Blok Rokan Butuh Dukungan Pemda

**JAKARTA** – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) harus menuntaskan 113 perizinan sebagai bagian dari alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Dukungan pemerintah daerah setempat dibutuhkan untuk merampungkan perizinan ini sebelum alih kelola terjadi pada 9 Agustus 2021.

Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Didik Sasono Setyadji menghargai dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam proses perizinan alih kelola Blok Rokan. Pasalnya, jika transisi pengelolaan dan operasional blok ini berjalan baik, bakal dampak positif, terutama bagi keuangan negara.

Pihaknya berharap proses perizinan alih kelola berjalan lancar dan kegiatan operasi tidak terganggu. “Kelancaran operasi Rokan sangat bermanfaat untuk keuangan negara. Kita semua sebagai aparat pemerintah punya tanggung jawab untuk menjalankan kepentingan negara,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (7/3).

Pejabat Sementara Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara Haryanto Syafri menambahkan, semua pihak yang terkait dengan proses perizinan alih kelola tersebut harus menyamakan persepsi. Hal ini mengingat kegiatan operasi di Blok

Rokan tidak boleh berhenti. “Dan kita akan tetap *comply* pada semua peraturan dan ketentuan,” ujarnya.

Pengurusan izin akan mulai diproses dengan memenuhi semua kelengkapan administrasi dan diharapkan berlaku mulai 9 Agustus 2021. Adapun izin yang saat ini masih dikelola Chevron Pacific Indonesia tetap dapat digunakan sampai batas waktu masa berlakunya sebelum nantinya diperbarui oleh Pertamina Hulu Rokan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1-PS) Provinsi Riau Helmi D mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan PHR. Di sisi lain, PHR diminta tetap melakukan komunikasi efektif dalam rangka harmonisasi perizinan.

“Maka kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan percepatan bagaimana alih fungsi dan perubahan perizinan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga nantinya 9 Agustus tidak kendala yang menghambat,” kata Helmi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kampar Yusri akan melakukan paralelisasi perizinan dengan Pemprov Riau. “Karena Pemerintah Kabupaten Kampar itu satu atap, kalau provinsi sudah kasih tanda, kabupaten ikut saja,” ungkap dia. (ayu)

**WOM Finance**  
a member of the group

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT WAHANA OTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

Direksi PT Wahana Otomitra Multiartta Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Wisma Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

**Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan wajib diujikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan.
- Penghasilan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan serta Merca dan Perhitungan Laba/Rugi wajib diujikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
- Penetapan Penghasilan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.c dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usul penggunaan dan/atau pembagian laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.
- Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Penjelasan:** Ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penetapan besaran gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelaksanaan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan menentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan menentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2021.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penjelasan:** Ketentuan Pasal 19 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penjualan Aset Perseroan selama Tahun 2020.
- a. Obligasi Berkejanguan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020.  
b. Obligasi Berkejanguan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020.
- Penjelasan:** Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penjualan Aset Perseroan dan Pasal 12 ayat. 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan pengajian, penjelasan hak atau menjalankan sebagian besar atau seluruh pilihan milik Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSeS KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses kse.com.id.
- a. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASYKSEI melalui situs web easy.kse.com.id.  
b. Apabila pemegang saham belum melakukan registrasi, maka pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses kse.com.id.  
c. Apabila pemegang saham telah melakukan registrasi, maka pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses kse.com.id.  
d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASYKSEI dan AKSeS KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.kse.com.id dan/atau situs web akses kse.com.id.

4. Apabila Pemegang Saham bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:

a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Saham menandatangani Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASYKSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSeS KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses kse.com.id.
- Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASYKSEI melalui situs web easy.kse.com.id.
- Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suratnya, mengubah penunjukan Pemegang Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pengumuman Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASYKSEI dan AKSeS KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.kse.com.id dan/atau situs web akses kse.com.id.

b. Pemegang Saham yang hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Saham menandatangani Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASYKSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSeS KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses kse.com.id.
- Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASYKSEI melalui situs web easy.kse.com.id.
- Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suratnya, mengubah penunjukan Pemegang Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pengumuman Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASYKSEI dan AKSeS KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.kse.com.id dan/atau situs web akses kse.com.id.

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**RALAT**  
**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan adanya perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini Perseroan mengumumkan ralat atas tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2021, sebagaimana telah diumumkan pada situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASYKSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional yaitu *Investor Daily* pada tanggal 15 Februari 2021, menjadi sebagai berikut :

Hari / tanggal : Selasa, 30 Maret 2021  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Function Room, Plaza Timor Building  
Jl. Timor No. 2, Menteng  
Jakarta Pusat 10350

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**Perseorutan atas rencana penjualan menara telekomunikasi Perseroan termasuk penyewaan tanah-tanah milik Perseroan yang terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

**Rencana penjualan menara telekomunikasi Perseroan termasuk penyewaan tanah-tanah milik Perseroan yang terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.**

Catatan:

Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk mengikuti Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (“RI”) dengan melakukan *Physical Distancing* selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) dan Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat menjadi sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirinkan pengumuman tersendiri kepada pemegang masing-masing para pemegang saham. Pengumuman ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Sinarmata Gunita pada tanggal 5 Maret 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 5 Maret 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara, melalui fasilitas eASYKSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASYKSEI, maka pemegang saham dapat mengundungi formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan [www.ibstower.com](http://www.ibstower.com).
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
- Perseroan akan menyediakan kamar Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
- Notaris dengan dibantu oleh BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan: (a) suara dari pemegang saham yang hadir; maupun (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) diatas.
- Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan diharapkan oleh gedung tempat Rapat diselenggarakan serta mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi terlibnya Rapat serta mempertimbangkan alasan kesehatan, maka prosedur pemeriksaan kesehatan untuk pemegang saham atau kuasanya yang sah dimulai 1 (satu) jam sebelum Rapat.

Jakarta, 8 Maret 2021  
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk  
Direksi



# Aturan Turunan UU Ciptaker Butuh Sinkronisasi

Oleh Edo Rusyanto

► JAKARTA - Pengembang properti menilai perlu adanya sinkronisasi aturan perizinan di sektor properti pascakeluarnya turunan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Selama ini, terdapat 48 aturan di sektor properti yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

"Perlu ada persepsi dan interpretasi yang sama terhadap aturan turunan UU Cipta Kerja. Pelaksana aturan di daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat," ujar Alim Gunadi, *managing director* Sinar Mas Land (SML), kepada *Investor Daily* saat dihubungi dari Jakarta, baru-baru ini.

Setidaknya ada tujuh aturan turunan UU Ciptaker yang terkait dengan sektor properti, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, PP No 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2017 tentang Arsitek. Lalu, PP No 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kemudian, PP No 20 tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar. Selain itu, PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

"Dengan adanya aturan itu beberapa hal terkait industri properti menjadi lebih *clear* dan jelas. Contoh, mengenai pendirian bangunan kini memakai instrumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bukan lagi izin mendirikan bangunan (IMB). Lalu, mengenai kepemilikan asing juga lebih jelas, demikian juga soal tanah terlantar dan rumah subsidi," papar Alim Gunadi.

Dia menambahkan, implementasi perizinan tergantung instansi yang menjalankan. Pengembang sebagai *user* mengikuti saja ketentuan yang ada. Terpenting dapat lebih *transparan*, *brudent*, dan *clear*.

Terkait perizinan, kata Joko Suranto, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI)



Alim Gunadi

Jawa Barat, kehadiran UU Ciptaker yang disahkan tahun lalu, tidak serta merta implementasi di lapangan. Kini, setelah dikeluarkan peraturan turunannya pada Februari 2021, juga belum langsung bisa diimplementasikan.

"Perizinan properti sampai sekarang belum ada perubahan signifikan, malah ada yang kebingungan. Aturan mana yang dipakai dan tidak dipakai. Misal, soal IMB. Di UU Ciptaker katanya tidak butuh IMB, melainkan PBG, tapi di lapangan masih memakai IMB," kata dia, kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

#### Tim Monitoring

Joko Suranto mengatakan, saat ini, untuk mengurus perizinan, jika dalam kondisi normal butuh sekitar enam bulan. Kalau kondisi tidak normal, bahkan bisa lebih dari satu tahun.

DPP REI pernah menyebutkan, terdapat sebanyak 48 perizinan di sektor properti. Izin-izin itu terdiri atas yang terkait pemerintah daerah

sebanyak 20 izin, yaitu izin prinsip, izin lokasi, izin *masterplan*, Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), izin domisili, izin lingkungan, rekomendasi Tim ahli bangunan gedung (TABG), sertifikat laik fungsi (SLF), dan penyerahan Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Lalu, delapan terkait pertanahan yang mencakup pelepasan hak, pensertifikatan (HGB), pemecahan sertifikat, izin pertelaan (bangunan tinggi), penjualan/PPJB, AJB, balik nama sertifikat, dan rekomendasi Tata Guna Tanah (TGT). Kemudian terkait perbankan ada lima, mencakup *loan to value* (LTV), *buyback guarantee*, bunga konstruksi, bunga kredit pemilihan rumah (KPR), dan KPR inden.

Sementara itu, terkait infrastruktur ada sembilan, yakni pembayaran biaya penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langanan (UJL) listrik, Pemb. Jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan gardu, pembangunan jaringan Saluran Kabel tanah Tegangan Rendah (SKTR) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), pemasangan KWH meter, penyediaan jaringan telkom, jaringan air bersih, pemeliharaan infrastruktur minimal tiga tahun, penyerahan 40% area untuk fasos fasum ke pemda, dan kewajiban hunian berimbang.

Terakhir, terdapat enam perpajakan terkait properti yang mencakup atas pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, pajak penghasilan (PPh) 2,5%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%, PPh 22 atas transaksi super mewah 5%, pajak bumi dan bangunan (PBB) atau nilai jual objek pajak/NJOP, dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 20%.

"Menurut saya butuh tim monitoring yang mengawasi sekaligus memandu agar lebih terkoordinasi, bisa saja di bawah kementerian dalam negeri yang membawahi pemda. Tanpa itu, aturan turunan UU Cipta Kerja belum berati," kata Joko Suranto.

Dia menegaskan, pentingnya insitusi yang menjadi koordinator agar jangan banyak penafsiran aturan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian. Padahal, pengusaha butuh kepastian. "Pengusaha karena tekanan dan kondisi butuh cepat, akhirnya mengeluarkan ekonomi biaya tinggi," jelas dia.



#### Perlu Stimulus

Seorang anak bersepeda di perumahan kawasan Parung Panjang, Bagor, Jawa Barat, Sabtu (6/3/2021). Pengamat properti Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trangganda menilai sektor properti mampu menahan kontraksi ekonomi lebih dalam lagi akibat pandemi Covid-19. Karena itu sektor properti perlu ada stimulus, karena mampu membangkitkan ekonomi dan menyerap 30 juta tenaga kerja.

## PUPR Bedah 915 Rumah di Kawasan Wisata Lombok

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membedah 915 rumah di Kawasan wisata Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari jumlah tersebut sebanyak 817 berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika di Lombok, NTB. Peningkatan kualitas hunian itu digulirkan lewat program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Rini Dyah Mawarty menyatakan, tahun 2020, Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan dana Rp 62,22 miliar untuk membangun 915 unit rumah melalui Program Sarhunta. Dari jumlah tersebut sebanyak 817 unit telah dibangun di Kabupaten Lombok Tengah, yakni di sepanjang koridor masuk kawasan Mandalika sebanyak 517 unit dan 300 unit untuk rumah singgah atau *homestay* serta usaha lainnya mendukung pariwisata. Sedangkan sisanya sebanyak 98 unit telah dibangun di Kabupaten Lombok utara.

"Kami berharap rumah dan *homestay* yang telah dibangun ini bisa dikelola dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat sehingga bisa menjadi modal untuk perawatan kedepannya. Selain itu, kami berharap bisa menjadi daya tarik tersendiri dan wisatawan bersempang untuk menginap. Dengan mengelola *homestay* juga membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya," ujar Rini, dalam siaran pers, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, *homestay* dapat dijadikan sebagai alternatif akomodasi yang terjangkau bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Program Sarhunta diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan tempat penginapan bagi wisatawan yang diperkirakan melonjak terutama saat gelaran Moto GP 2021 berlangsung di Sirkuit Mandalika.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, pihaknya akan terus mendukung pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional dari

berbagai sektor termasuk di sektor pariwisata. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami memiliki Program Sarhunta agar kawasan pariwisata dapat tertata dengan baik. Rumah-rumah penduduk yang berada di dalam kawasan dan koridor masuk kawasan wisata kami bedah sehingga kualitas hunian masyarakat bisa lebih layak huni," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kememparekrif, Wawan Gunawan berterimakasih kepada kementerian PUPR karena sudah membangunkan rumah singgah atau *homestay* bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan pariwisata.

"Kememparekrif siap memberikan dukungan kepada Kementerian PUPR untuk membangun begitu banyak *homestay* di Mandalika dan Gili serta tempat wisata lainnya. Kememparekrif melalui politetnik pariwisata juga akan mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan *homestay* yang ada," ujar dia. (ed)

## Penemuan Mutasi Virus COVID-19 Berkat Upaya Penguatan 3T Pemerintah



Jakarta, 6 Maret 2021 - Dua kasus mutasi virus Corona dari Inggris atau B.1.1.7 mulai ditemukan di Indonesia pada Senin, 1 Maret 2021. Mutasi virus Corona B.1.1.7 sebelumnya pertama kali diumumkan di Inggris pada akhir tahun lalu.

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa temuan ini merupakan hasil dari penguatan 3T, terutama dari sisi testing dan tracing yaitu melalui peningkatan kegiatan pengurutan genom menyeluruh (Whole Genome Sequencing/WGS) serta penguatan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi virus varian baru di seluruh Indonesia. "Temuan ini menunjukkan kemampuan dan kapasitas dari laboratorium Balitbangkes Kemenkes dalam melakukan metode Whole Genome Sequencing (WGS)," ujarnya.

Lebih lanjut dr. Nadia mengatakan bahwa virus Corona adalah tipe virus RNA (ribonucleic acid) yang secara alami mudah mengalami mutasi dan mutasi memang merupakan kemampuan virus untuk bertahan hidup. "Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa virus mutasi COVID-19 ini lebih tinggi tingkat keganasannya dibanding virus COVID-19 yang ada sebelumnya,

namun, beberapa penelitian di negara lain menunjukkan varian virus baru ini lebih cepat menular. Namun, kecepatan penularan mutasi virus tersebut tidak menyebabkan bertambah parahnyanya penyakit, namun penelitian terkait varian baru ini terus dilakukan," ujar dr. Nadia.

dr. Nadia juga menambahkan bahwa vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berjalan masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus. "Para peneliti yang mendalami virus Corona B.1.1.7 mengonfirmasi bahwa efektivitas inokulasi terhadap virus masih ada di level yang bisa diterima sehingga sejauh ini belum mengganggu kinerja vaksin," ucap beliau.

Meskipun tingkat keganasan varian baru virus COVID-19 ini belum diketahui, namun dengan kemampuan penularan yang lebih tinggi, masyarakat diharapkan lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. "Menjelang libur panjang akhir pekan ini, kami himbau dengan sangat masyarakat untuk menahan diri dan tidak bepergian dulu mengingat setelah libur panjang, umumnya terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 dari kluster keluarga," seru dr. Nadia.

Prof. Amin Subandrio dari Eijkman Institute for Molecular Biology mengatakan dua temuan kasus varian B.1.1.7 di Indonesia merupakan hasil temuan dari proses analisis WGS. "Deteksi varian B.1.1.7 dilakukan melalui proses analisis Whole Genome Sequencing (WGS) yang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 1 atau 2 minggu," ucap beliau.

Prof. Amin mengatakan proses pemeriksaan WGS membutuhkan waktu hingga hasilnya dapat keluar. "Kasus tersebut tiba di Indonesia pada akhir Januari 2021, kemudian dilakukan tes PCR, lalu suspek dikarantina selama 5 hari. Setelah itu dilakukan tes PCR kembali. Barulah beberapa hari setelahnya dilakukan proses analisa WGS. Hasilnya baru diperoleh pada 1 Maret malam dan segera dilaporkan. Proses analisa WGS bukanlah pemeriksaan rutin dan tidak semua sampel dengan hasil tes PCR yang positif dianalisa dengan proses ini," jelas Prof. Amin.

Menurut Prof. Amin, tidak ada perlakuan khusus yang dibutuhkan dalam menghadapi mutasi virus ini, karena mutasi merupakan sifat alami dari virus. "Aktifitas testing dan tracing harus lebih cepat dan giat dilakukan, termasuk melakukan proses analisa WGS," ujar Prof. Amin.

## Arebi Jatim: Insentif PPN Dongkrak Penjualan 75%

SURABAYA- Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Jawa Timur (Jatim) meyakini bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hunian tapak dan rumah susun (rusun) akan mendorong penjualan 75%. Insentif itu akan menggerakkan pasar properti yang kini lesu akibat pandemi Covid-19.

"Kebijakan ini sangat tepat *timing*-nya. Ini menunjukkan pemerintah telah menggali aspirasi dari pelaku pasar. Saya optimistis kebijakan insentif pajak ini akan mampu meningkatkan penjualan sampai 75%," kata Ketua Arebi Jatim Rudy Sutanto, kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rusun yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk hunian yang sudah jadi (*ready stock*) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Properti yang dibeli tidak boleh dijual kembali dalam waktu satu tahun.

Ketentuan PPN ditanggung pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. PMK itu berlaku mulai 1 Maret 2021.



Rudy Sutanto

Dia berharap, insentif itu menjadi momen percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di bidang properti. Lalu, mendorong penjualan rumah yang telah dibangun pengembang pada 2020 dan 2021 serta membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni.

Rudy mengatakan, kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Ketentuan insentif untuk satu nama dan satu unit, secara faktual di lapangan cocok bagi pembeli dan investor pemula. Dan, kebijakan ini juga mengakomodasi permintaan pengembang agar bisa menyesuaikan harga tanpa mengurangi kualitas bangunan. Bagi pembeli, kebijakan ini meru-

pakan koreksi harga, seakan-akan ada diskon 10%. Secara psikologis nilai diskon ini besar sekali bagi mereka. Saat ini, banyak pembeli menanyakan kebijakan itu ke para broker anggota Arebi Jatim.

Bagi broker, tambahnya, antusiasme pembeli itu merupakan angin segar, setidaknya daya beli memang masih ada dan cukup besar. "Bagi pengembang inilah saatnya melepas *ready stock* yang menumpuk akibat gagal proses KPR penjualan yang terhambat," papar dia yang juga pengurus Kadin Jatim Bidang Real Estat.

Rudy menilai, pemerintah ingin perekonomian bisa bergerak dengan mengeluarkan kebijakan insentif PPN ini, mengingat industri properti terkait dengan 170 industri lainnya.

"Bila properti *slow*, yang lainnya pasti lebih turun, bahkan bisa tutup. Jika properti bergolak bahkan meningkatkan penjualannya, industri lain pun ikut bergerak sehingga perekonomian pun bisa cepat *recovery*," kata Principal Java Property ini.

Tak hanya itu, tambah dia, kebijakan ini juga bisa mendorong pemilik dana mengalihkannya ke properti. "Kita tahu penempatan dana pihak ketiga meningkat cukup tajam dan bila 25% saja mengalihkan investasinya ke properti, tentu besar sekali *multiplier effect*-nya. Apalagi saat ini, dukungan perbankan dengan suku bunga yang rendah serta ada kebijakan DP 0%," ujar Rudy. (ros)

## SML Incar Penjualan Lampau 4.800 Unit

JAKARTA - Sinar Mas Land (SML) membidik penjualan lebih dari 4.800 unit lewat program *Wish for Home* tahun 2021. Optimisme itu mencuat seiring dengan beragam relaksasi dan stimulus di sektor properti yang digulirkan pemerintah belakangan ini.

"Target penjualan dari program *Wish for Home* tahun 2021 kami harapkan melebihi perolehan tahun lalu. Kami melihat masih ada daya beli di masyarakat," ujar *Managing Director* SML, Alim Gunadi, dalam jumpa pers virtual, baru-baru ini.

Dia menambahkan, pihaknya juga optimistis permintaan hunian masih besar seiring tingginya *backlog* hunian di Indonesia, yakni mencapai 11,4 juta unit. "Sekitar 33% penjualan tahun 2020 didukung oleh agen prop-

erti dari eksternal SML," paparnya, di acara yang sama.

Menurut Alim, SML memberikan sejumlah promosi untuk memudahkan masyarakat dalam membeli properti impian. Kali ini, SML mengulirkan program *Wish for Home*. "Periode Program Sinar Mas Land *Wish for Home* mulai dari 6 Maret hingga 31 Desember 2021. Tipe produk yang ditawarkan yaitu *ready stock* dan *under construction* untuk rumah, kaveling, apartemen, ruko, dan kios," ujar dia.

Selain memberikan diskon, tambahna, lewat program tersebut SML memberikan fasilitas lain seperti gratis bea perolehan hunian tanah dan bangunan (BPHTB) serta gratis biaya pengalihan. Lalu, subsidi uang muka dan gratis biaya kredit

pemilikan rumah/kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA).

Dalam memuluskan target penjualan, tambah dia, pihaknya menggandeng 13 bank, di antaranya Bank Mandiri, Permana Bank, Maybank, BCA, dan BNI. Bank merupakan *backbone* bagi para developer. "Dua tahun terakhir mayoritas *term of payment* nasabah kami memakai kredit pemilikan rumah/kredit pemilikan apartemen. Tahun lalu, sekitar 60% memakai skema tersebut," kata dia.

Proyek SML yang turut dalam program nasional *Wish for Home* tersebar di sejumlah daerah. Lokasi proyek itu di Jabodetabek, Surabaya, Balikpapan, dan Batam. Jenis properti yang ditawarkan mulai dari hunian tapak, apartemen hingga properti komersial. (imm/ed)



# Pemerintah Ajak Swasta Kembangkan *Shrimp Estate*

Oleh Ridho Syukra

► JAKARTA – Pemerintah mengajak pelaku usaha swasta (*private sector*) nasional untuk berbondong-bondong terjun ke bisnis di sektor kelautan dan perikanan (KP), di antaranya dalam pengembangan kawasan tambak udang (*shrimp estate*) pada 2 juta hektare (ha) lahan tambak telantar (*idle*) yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Keterlibatan swasta diharapkan bisa mewujudkan target Indonesia menjadi Raja Udang Dunia pada 2024 dengan produksi nasional sebesar 2,34 juta ton dengan 2 juta ton berasal dari budidaya.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) KKP Sjarief Widjaja mengatakan, KKP memiliki tiga terobosan untuk meningkatkan peran sektor KP dalam perekonomian nasional, salah satunya mendorong perikanan budidaya untuk kesejahteraan dan dalam kegiatan budidaya guna mendorong ekspor difokuskan pada tiga komoditas unggulan yakni udang, lobster, dan rumput laut. "Kenapa udang, nilai produksi perikanan budidaya itu Rp 144 triliun pada 2020, itu baru dari 600 ribu tambak *idle* yang efektif jalan dari total 2 juta ha. Ini *opportunity*, karena itu kami buka kesempatan *private sector* untuk ikut mengelolanya kita aktifkan lagi, kita buat kawasan tambak udang (*shrimp estate*)," ujar dia.

Sjarief Widjaja mengatakan hal itu saat Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Sabtu (6/3), menggantikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang berhalangan hadir. Sjarief menjelaskan, ceruk pasar udang yang besar di pasar global juga mendukung pilihan pemerintah tersebut. Total nilai pasar

produk perikanan global pada 2019 mencapai US\$ 163,72 miliar dan udang US\$ 24,51 miliar atau berada di posisi nomor dua setelah salmon dengan Indonesia yang baru menyumbang US\$ 1,72 miliar. Pada 2020, udang di perdagangan global berkontribusi US\$ 26,54 miliar dan kontribusi Indonesia meningkat menjadi US\$ 2,04 miliar dengan volume ekspor 239.227 ton dari 2019 yang hanya 207.703 ton.

Dari kondisi itu, kata Sjarief, Menteri Trenggono menginginkan pada 2024 produksi udang budidaya bisa mencapai 2 juta ton dari posisi 2019 yang hanya 856.753 ton dan pada 2020 sebesar 1.028.000 ton. Salah satu caranya dengan mengaktifkan tambak udang *idle* menjadi *shrimp estate*, pemerintah akan membantu dari sisi perbenihan, pakan, infrastruktur seperti jalan produksi, irigasi, tandon, sumber air, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). "Pemerintah masuk dari sisi benih unggul, pakan, dan infrastruktur, nanti *private sector* masuk sebagai pengelola, tinggal hitung *grace period*-nya nanti bisa saja *private sector* ting-



Sjarief Widjaja

gal bayar sewa, silakan pilih ada tambak *idle* di mana, dan nanti kita buat desain *shrimp estate*-nya bersama. Polanya bisa intensif, semiintensif, superintensif, atau *silvofishery*," jelas dia.

Sjarief menjelaskan, dengan produksi udang budidaya yang meningkat menjadi 2 juta ton maka ekspor udang bisa dinaikkan hingga 250% pada 2024 menjadi 727 ribu ton. Saat ini, Indonesia di posisi nomor tujuh eksportir udang dunia. "Kita akan naikan ekspor dari saat ini sekitar US\$ 2 miliar, kita sodok ke atas. Kita juga sedang mengunci agar tarif bea masuk (BM) udang RI ke Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) diturunkan agar udang kita jadi kompetitif, jadi *tarif barrier* dan *nontarif barrier* kita coba atasi," kata dia. AS dan UE adalah salah satu dari 10 konsumen udang terbesar dunia, AS nomor dua dan UE nomor enam.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia mencapai US\$ 1.338 miliar per tahun atau lima kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun atau US\$ 190 miliar) atau 1,30 produk domestik bruto (PDB) nasional saat ini. Ke-11 sektor kelautan itu menyediakan 45 juta lapangan kerja atau 40% dari total angkatan kerja Indonesia, kontribusi ekonomi kelautan saat ini bagi Indonesia baru sekitar 22%, padahal negara-negara lain yang potensi ekonomi kelautannya lebih kecil, seperti Thailand,



Pusat Koi dan Maskoki Nusantara

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono didampingi Dirjen PDS Artati Widiarti, Dirjen PB Slamet Soebjanto, Irjen KKP Muhammad Yusuf serta Plt. Dirjen PT Muhammad Zaini saat meresmikan Pusat Koi dan Maskoki Nusantara di Kantor Saker BBB3KP, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Dalam kesempatan itu juga menteri meninjau Kontes Ikan Hias "4th Indonesian Golden Fish League".

Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia, kontribusinya lebih dari 30%. "Kita baru garap perikanan tangkap, sektor lain belum tersentuh maksimal, seperti perikanan budidaya, bioteknologi, dan hilirisasi. RI ekspor rumput laut terbesar tapi masih *raw material*," jelas dia.

Secara rinci, ke-11 potensi ekonomi kelautan dengan total US\$ 1.338 miliar per tahun itu terdiri atas perikanan tangkap senilai US\$ 20 miliar, perikanan budidaya US\$ 210 miliar, industri pengolahan hasil perikanan US\$ 100 miliar, industri bioteknologi kelautan US\$ 180 miliar, energi dan sumber daya mineral (garam, BMKT) US\$ 210 miliar, pariwisata bahari US\$ 60 miliar, transportasi laut US\$ 30 miliar, serta industri dan jasa maritim US\$ 200 miliar. Kemudian, *coastal forestry* US\$ 8 miliar, sumber daya wilayah

pulau-pulau kecil US\$ 120 miliar, dan sumber daya nonkonvensional US\$ 200 miliar.

## SKPT Sebatik

Pada bagian lain, Indonesia berhasil melakukan ekspor perdana produk perikanan dari Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik. KKP bersama Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), mengekspor ikan perdana ke Tawau, Malaysia, Rabu (3/3), senilai Rp 4,21 miliar berupa ikan bandeng dan ikan demersal. Penerbitan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) oleh Bea Cukai melengkapi surat keterangan asal (SKA) dan health certificate (HC) produk ekspor tersebut. Menurut Koordinator SKPT Sebatik Iswadi Rachman, kelengkapan dokumen ekspor tersebut menjadi langkah pemerintah

untuk menghindari kegiatan ekspor ilegal. Pencatatan itu juga menjadi penyokong dalam menambah devisa negara dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan dari komoditas perikanan.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Dhan Kumsanto menerangkan, selama ini hasil tangkapan nelayan dijual di pasar Nunukan atau Sebatik, sebagian dijual hingga ke Tarakan atau Tanjung Selor, tapi sebagian besar hasil laut mereka dijual ke Tawau, Malaysia, dengan harga jual yang lebih menjanjikan. "Sayangnya, transaksi para nelayan itu masih tradisional. Hal ini tentu saja rawan terjadi tindak pelanggaran keimigrasian karena para nelayan biasanya langsung menjual hasil tangkapannya ke pasar di Tawau tanpa melewati pintu keimigrasian yang resmi," jelas

dia dalam keterangan KKP.

Ekspor dari SKPT Sebatik salah satu keberhasilan KKP dalam membangun daerah pinggiran Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya ikan. SKPT Sebatik menjadi titik pemeriksaan (*check point*) serta titik pengeluaran (*exit point*) dan pemasukan (*entry point*) kapal yang mengangkut hasil perikanan dari berbagai daerah di Kaltara, seperti Tarakan, Berau. Perairan di Kaltara masuk zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 meliputi Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera dengan potensi 597.139 ton yang terdiri atas spesies biota laut, seperti ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. (tl)

## Kementan Kembangkan Agrowisata

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan sektor pertanian yang digabungkan dengan pariwisata atau agrowisata di seluruh daerah di Indonesia untuk meningkatkan nilai ekonomi selain komoditas. "Saya kira ini langkah maju bahwa pertanian itu bukan hanya menghasilkan padi, jagung, kacang-kacangan, tapi sebenarnya dengan penataan yang baik banyak akselerasi yang bisa kita intervensi jadi kan potensi untuk mendapatkan tambahan lagi bagi masyarakat," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan Kementan, kemarin.



Syahrul Yasin Limpo

perekonomian yang luas dari sektor pertanian. "Ini tidak mengganggu komoditas yang kita tanam, bahkan ini akan menjadi bagian yang merangsang masyarakat untuk terus melakukan upaya agar pertanian seempit apapun sebenarnya bisa kita lipat gandakan pendapatan masyarakat setempat," katanya.

Pengembangan agrowisata untuk mengangkang perekonomian ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar berinovasi dalam

memperkuat perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Selain agrowisata buah dengan mengembangkan kawasan buah lokal, bisa juga dikembangkan agrowisata sawah. Untuk agrowisata buah, Mentan mendorong agar kawasan buah lokal bisa dikembangkan jangsan di satu daerah tapi di setiap daerah. Pengembangan kawasan buah lokal harus memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah. Bahkan harus dikelola secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk buah lokal yang dikembangkan.

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, pertumbuhan positif sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya komoditas hortikultura yang tumbuh 7,85% akibat kenaikan permintaan buah dan sayur selama pandemi Covid-19. Pada 2021, Kementan terus meningkatkan produk hasil hortikultura, terutama

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tiga strategi utama pengembangan hortikultura 2021-2024, yaitu pengembangan kampoeng hortikultura, penumbuhan UMKM hortikultura, dan digitalisasi pertanian melalui pengembangan sistem informasi.

Pekan lalu, Mentan mengunjungi sekaligus panen padi di Svarga Bumi Borobudur yang merupakan lokasi agrowisata sawah Kabupaten Magelang. Kawasan spot foto baru di Kabupaten Magelang tersebut bertema hamparan sawah yang menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat setempat terutama petani. Saat meninjau kawasan wisata itu, Mentan meminta kawasan agrowisata Svarga Bumi diduplikasikan di daerah lain karena kawasan itu menjadi pilihan menarik bagi para anak muda untuk mempelajari dunia pertanian sehingga berawal dari wisata semakin banyak kaum milenial atau masyarakat tertarik dengan pertanian. (dho)

## KLHK Modifikasi Cuaca Atasi Karhutla

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersiap melaksanakan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat (Kalbar). TMC menjadi salah satu upaya paling efektif mencegah karhutla pada 2020 karena hasilnya dapat membasahi gambut, mengisi kanal, serta embung untuk membantu tim pemadam darat.

KLHK telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi musim panas di beberapa wilayah rawan karhutla serta potensi dilakukannya rekayasa hujan bagi daerah-daerah yang akan mengalami bulan kering atau

tertentu. Mempertimbangkan kondisi itu, perlu dilakukan TMC melalui rekayasa hujan awal Maret ini," ungkap Basar dalam keterangan KLHK.

TMC dilakukan awal Maret karena masih terdapat awan potensial yang dapat disemai menjadi hujan, ini juga sebagai upaya mengurangi potensi karhutla di beberapa daerah yang dalam beberapa waktu ini mengalami karhutla. Terlebih masih di masa pandemi Covid-19 dan menjelang Puasa untuk menjamin agar masyarakat tidak mendapatkan dampak yang menyulitkan akibat dari karhutla dalam menjalani aktivitas sehari-hari. "TMC terus didorong menjadi salah satu upaya permanen dalam pengendalian karhutla. TMC dilakukan dengan meniru proses yang terjadi di dalam awan melalui aktivitas penyiapan awan (*cloud seeding*), yang bertujuan mempercepat proses tumbukan dan penggubangan butir air di dalam awan sehingga terjadi hujan," jelas Basar. (tl)

tertentu. Mempertimbangkan kondisi itu, perlu dilakukan TMC melalui rekayasa hujan awal Maret ini," ungkap Basar dalam keterangan KLHK.

## Stimulus Jumbo di AS Jadi Sentimen Positif IHSG

► Sambungan dari hal 1

Meski demikian, kata Zamzami, paket stimulus AS pun bisa memicu kekhawatiran terhadap naiknya tingkat inflasi di Negeri Paman Sam yang bisa mendorong kembali kenaikan imbal hasil (*yield*) US Treasury Bond tenor 10 tahun. Oleh karena itu, pekan ini investor akan mencermati data inflasi dan selang obligasi pemerintah AS.

Adapun dari dalam negeri, menurut Anugerah Zamzami, investor pekan ini akan memperhatikan data indeks kepercayaan konsumen Februari 2021 untuk menimbang indikator konsumsi sebagai pemulih ekonomi. Data ini juga patut diperhatikan karena indeks kepercayaan konsumen pada Januari 2021 menurun ke level 84,9 dari 96,5 pada bulan sebelumnya. "Dengan mencermati sentimen-sentimen tersebut, IHSG berpeluang menguat terbatas, dengan perkiraan *support* dan *resistance* pekan ini di level 6.205-6.350," tutur dia.

Zamzami menambahkan, investor pekan ini bisa memilih

sejumlah saham, di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan PT Kalbe Farma Tbk (KALBF).

### Ke Level 6.351

Di sisi lain, analis PT Binaartha Sekuritas, M Nafan Aji menjelaskan, pengesahan paket stimulus AS sebesar US\$ 1,9 triliun akan berdampak positif terhadap IHSG. Pekan ini, indeks diperkirakan menguat ke level 6.179-6.351. "Selain itu, investor akan memperhatikan data *US nonfarm payroll*. Kemudian sentimen lainnya datang dari Inggris dan Jepang yang akan mengumumkan data produk domestik bruto (PDB)-nya," papar dia.

Nafan Aji mengemukakan, dari dalam negeri, sentimen yang akan memengaruhi IHSG antara lain rilis laporan keuangan emiten dan progres vaksinasi massal. "Namun, investor tetap harus memperhatikan sentimen negatif yang berasal dari Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) Mikro," tandas dia.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021. Selain memperpanjang perodinya, PPKM Mikro diperluas ke tiga provinsi, sehingga total daerah yang akan melakukan PPKM Mikro berjumlah 10 daerah. "Ini bisa mendatangkan sentimen negatif di lantai bursa," ucap dia.

Menurut Nafan Aji, saham yang bisa dipilih investor pekan ini antara lain saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan target harga Rp 1.215-1.715, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dengan target harga Rp 4.240-4.670, dan PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) di level Rp 266-364.

Saham pilihan lainnya, kata Nafan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di level Rp 6.300-7.000, PT PP London Sumatra Tbk (LSIP) di level Rp 1.350-1.740, dan PT United Tractors Tbk (UNTR) dengan target harga Rp 22.050 - 34.500.

Sementara itu, Direktur PT Anugerah Mega Investama, Hans Kwee memperkirakan IHSG pekan ini menguat, ditopang oleh

disahkannya paket stimulus AS sebesar US\$ 1,9 triliun dan menurunnya *yield* US Treasury Bond dari level tertinggi. Dalam beberapa pekan terakhir, *yield* obligasi pemerintah AS bergerak di level 1,4-1,6%.

Namun, menurut Hans Kwee, pemulihan ekonomi yang terlalu cepat bisa mendorong peningkatan inflasi di AS. Akibat, *yield* US Treasury Bond dikawatirkan meningkat lagi. "Prediksi *support* IHSG pekan ini adalah 6.173-6.245. Sedangkan *resistance* IHSG akan berada di level 6.307-6.394," jelas dia.

Associate Director of Research Investment PT Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus memprediksi IHSG pekan ini bergerak dengan potensi antara penguatan dan pelemahan masing-masing sebesar 55% dan 45%. Dengan prediksi tersebut, IHSG bakal berada di level 6.220-6.330.

"Sentimen penggerak penguatan IHSG tentu saja datang dari paket stimulus AS. Paket stimulus akan memberikan kekuatan ekstra bagi IHSG yang sempat loyo karena kenaikan *yield* US Treasury Bond," papar dia.

Di tengah ekspektasi penguatan IHSG, kata Nico, investor bisa memilih saham-saham sektor perbankan, infrastruktur, dan pertambangan. "Saham di sektor ini berpeluang menguat setelah Presiden AS, Joe Biden memberikan stimulus ke pasar," tutur dia.

### Diteken Joe Biden

Pada Sabtu (6/3), Senat AS mengesahkan paket stimulus Covid-19 senilai US\$ 1,9 triliun, dengan suara 50:49. Parlemen, yang didominasi Partai Demokrat, dijadwalkan bakal mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) paket stimulus tersebut pada Selasa (9/3), untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joe Biden guna diteken sebagai UU sebelum batas waktu 14 Maret 2021.

Di tengah euforia kemenangan kubu Partai Demokrat, kubu Partai Republik tetap mempertanyakan paket bernilai jumbo tersebut. Alasannya, pemerintahan Donald Trump baru saja mengesahkan stimulus Covid-19 pada Desember 2020.

Paket US\$ 1,9 triliun yang bakal ditandatangani Presiden Joe Biden merupakan paket

stimulus kedua terbesar dalam sejarah AS setelah paket stimulus *CARES Act* senilai US\$ 2 triliun yang disahkan tahun silam untuk membantu ekonomi Negeri Paman Sam yang terpuruk oleh pandemi.

Paket US\$ 1,9 triliun terdiri atas bantuan langsung senilai US\$ 1.400 kepada sebagian besar rakyat AS, tunjangan pengangguran sebesar US\$ 300 per pekan yang berlaku hingga September 2021, serta perpanjangan kredit pajak anak selama satu tahun.

Itu belum termasuk dana US\$ 350 miliar untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah, bantuan US\$ 130 miliar untuk sekolah, anggaran US\$ 49 miliar untuk memperluas riset, pelacakan, dan pengetesan Covid, serta US\$ 14 miliar untuk distribusi vaksin.

Stimulus lainnya yaitu bantuan sewa hunian bagi rumah tangga yang kesulitan keuangan akibat pandemi Covid, bantuan US\$ 14 miliar untuk maskapai penerbangan AS, bantuan federal untuk industri yang tidak merumahkan atau memangkas gaji karyawan hingga 30 Septem-

ber 2021, serta bantuan untuk para kontraktor maskapai penerbangan senilai US\$ 1 miliar.

"Kita telah mengambil langkah raksasa lagi hari ini untuk memenuhi janji bahwa bantuan bagi rakyat Amerika segera tiba," tegas Biden, dalam konferensi pers di Gedung Putih di Washington, Sabtu (6/3) waktu setempat, seperti dikutip AFP.

Di pihak lain, Menteri Keuangan (Menkeu) AS, Janet Yellen pada Jumat (5/3) menegaskan, naiknya *yield* obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun merupakan pertanda bahwa pelaku pasar mengantisipasi pemulihan yang lebih kuat, bukan meningkatnya kekhawatiran terhadap laju inflasi.

"Saya tidak melihat pasar memperkirakan inflasi naik di atas sasaran inflasi 2,0% yang dipatok Fed sebagai tingkat inflasi rata-rata dalam jangka panjang," tandas Janet Yellen.

Menurut Yellen, AS membutuhkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lebih cepat dibanding realisasi Februari lalu. Dia yakin lapangan kerja akan terpenuhi tahun depan sejalan dengan dikucurkannya stimulus US\$ 1,9 triliun. (sn)



## Anies Terima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, yaitu Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP.

Penghargaan ini terkait dengan peran Anies dalam memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP DKI Jakarta sehingga Satpol PP bisa menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

"*Alhamdulillah*, Kamis lalu menerima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri. Penghargaan diserahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Wilayah bersama Direktur Satpol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta," ujar Anies dalam postingannya di facebook pribadi sebagaimana dikutip **Beritasatu.com**, Minggu (7/3).

Anies menjelaskan, penghargaan diberikan berdasarkan kriteria penilaian sesuai Permendagri Nomor 17 Ta-

hun 2019. Penghargaan ini merupakan apresiasi Mendagri terhadap kepala daerah yang memberikan dukungan penuh dalam peningkatan peran, tanggung jawab serta peningkatan tugas dan fungsi Satpol PP di daerahnya.

"Penghargaan ini makin memperkuat komitmen dan integritas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam menegakkan peraturan daerah (perda), menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat," tandas Anies.

Lebih lanjut Anies mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, Satpol PP bukan sekadar menegakkan peraturan. Lebih dari itu, kata dia, penindakan dan pengawasan Satpol PP adalah untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya virus corona.

"Pada setiap tindakan tunjukkan bahwa kita bekerja atas nama negara, karena itu harus bertindak sesuai dengan seluruh protokol yang dimiliki Satpol PP. Selamat

dan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP DKI Jakarta," pungkaskan Anies.

Sebelumnya, Anies mengatakan, Satpol PP menjadi salah satu bagian paling depan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, kata dia, kehadiran Satpol PP juga telah mendorong tumbuhnya kebiasaan baru untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan warga Jakarta agar bisa mengendalikan Covid-19.

"Hal ini agar warga Jakarta bisa melewati masa pandemi dengan baik, jauhkan dari keterpaparan dan *insyaallah* bisa muncul sebagai masyarakat yang lebih kuat," tandas dia.

Lebih lanjut Anies mengatakan, tiap anggota Satpol PP DKI merupakan garda terdepan dan perwujudan dari wajah Pemprov DKI Jakarta di hadapan masyarakat. Karena itu, dia berharap Satpol PP hadir dengan cara-cara beradab dan humanis. (b1)



**Vaksinasi Covid-19**

Tenaga kesehatan Siloam Hospitals Group melayani para peserta vaksinasi yang umumnya lansia di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pendaftaran vaksinasi dapat dilakukan secara langsung di Lippo Mall Kemang tiap Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang.

## Pemprov DKI Persilakan Kemenpupera Kerjakan Normalisasi Ciliwung

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Basuki Hadimuljono untuk mulai mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung. Peralpnya, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan 7,6 kilometer lahan di bantaran Sungai Ciliwung.



**Ahmad Riza Patria**

pihaknya menargetkan selesai paling cepat pada tahun 2020.

"Mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun kembali normalisasi sungai," imbuh Ariza.

Diketahui, normalisasi sungai dikerjakan bersama antara Pemprov DKI untuk pembebasan lahannya dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kempupera untuk pengerjaan konstruksinya.

Ariza juga berharap dukungan Pemerintah Pusat dan DPR RI khususnya dukungan anggaran. Peralpnya, anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Prinsipnya kami kerjasama dengan BBWSCC, Kempupera, dengan pemerintah sekitarnya, nanti kita akan minta dukungan dari teman-teman Komisi V DPR RI, untuk memberikan penguatan dan dukungan anggaran bagi penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya," pungkaskan Ariza.

Sebelumnya, Ariza mengatakan pihaknya telah membebaskan lahan sepanjang 7,6 kilometer di bantaran sungai Ciliwung untuk dilakukan normalisasi atau pembangunan konstruksinya. Pembebasan lahan ini merupakan hasil kerja Pemprov DKI pada periode 2019-2020. (b1)

## Kota Bogor Wacanakan Kembali Sistem Ganjil Genap

BOGOR – Berbagai ruas jalan di Kota Bogor kembali padat, Sabtu (6/3). Karena itu, Wali Kota Bogor Bima Arya wacanakan kembali sistem ganjil genap pada libur panjang pekan depan.

Bima mengatakan, ditiadanya ganjil genap dimanfaatkan warga untuk pergi keluar rumah. Untuk itu, Bima mengusulkan Satgas Covid-19 melakukan evaluasi pada Selasa (9/3) sambil melihat perkembangan data Covid-19 di Kota Bogor.

"Saya akan mengusulkan kepada Satgas, hari Selasa

kita evaluasi lagi lah. Ini juga mengantisipasi libur panjang. Apakah betul-betul minggu depan juga kita tidak berlaku, sambil mempelajari data-data lain," ujar Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini, Minggu (7/3).

Bima menegaskan, ganjil genap yang diterapkan di Kota Bogor tidak hanya terkait dengan lalu lintas. Namun, juga sebagai salah satu cara Satgas Covid-19 Kota Bogor menekan laju Covid-19.

"Ini kan bukan hanya soal lalu lintas, tetapi ini soal protokol kesehatan, dan menekan

laju Covid-19. Data minggu ini juga kan baru ketahuan minggu depan, jadi kita harus sabar menunggu datanya," ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Bogor meniadakan ganjil genap selama dua pekan. Keputusan itu telah disepakati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor dalam rapat Satgas Covid-19 Kota Bogor, Selasa (2/3).

Namun, pantauan di lapangan, baru satu hari ganjil genap ditiadakan, Sabtu (6/3), kepadatan kendaraan terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Bogor. (b1)



**Larangan Knalpot Bising**

Petugas membawa motor dari hasil razia pengendara motor yang memakai knalpot bising dan tidak dilengkapi surat-surat, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021). Polisi melakukan penindakan terhadap para pengendara kendaraan bermotor dengan knalpot bising. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan razia sebagai tindak lanjut kebijakan terkait larangan kendaraan bermotor berknalpot bising di kawasan sekitar Monumen Nasional (Monas) untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

# Kejagung Tetapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat Tersangka TPPU Asabri

Oleh **Imam Suhartadi**

► **JAKARTA –** Jaksa Penyidik Kejaksanaan Agung kembali menetapkan Benny Tjokrosaputro (BTS) dan Heru Hidayat (HH) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri.

Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (BTS) dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat (HH) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid-sus) Kejaksaan Agung.

"Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU kali ini adalah BTS dan HH yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksanaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya diterima Jakarta, Sabtu (6/3).

Leonard menjelaskan duduk perkaranya kasus ini dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, PT Asabri (Persero) telah melakukan penempatan investasi dalam bentuk pembelian saham maupun produk reksadana kepada pihak-pihak tertentu melalui sejumlah 'nominee' yang terafiliasi dengan BTS dan HH tanpa disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal serta hanya dibuat secara formalitas saja.

Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di PT Asabri (Persero) justru melakukan kerja sama dengan BTS

dan HH dalam pengelolaan dan penempatan investasi PT Asabri (Persero) dalam bentuk saham dan produk reksadana yang tidak disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal sehingga investasi tersebut melanggar ketentuan *standard operating procedure* (SOP/prosedur standar pengoperasian) dan pedoman penempatan investasi yang berlaku pada PT Asabri (Persero).

"Atas dasar hal tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi yang menyetujui penempatan investasi PT ASABRI (Persero) tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal," kata Leonard.

Penempatan dana investasi PT Asabri (Persero) yang hanya berdasarkan analisa penempatan reksa dana yang dibuat secara formalitas saja, oleh BTS selaku Direktur PT Hanson Internasional bersama-sama HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, LP selaku Direktur PT Eureka Prima Jakarta Tbk, SJS selaku Konsultan, ES selaku nominee, RL selaku Komisaris Utama PT Fundamental Resources dan Beneficiary Owner dan B selaku nominee BTS saham SUGI melalui nominee ES mengakibatkan adanya penyimpangan dalam investasi saham dan reksadana PT Asabri yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 23,73 triliun.

Oleh karena itu BTS dan HH

sebagai pihak-pihak mengelola dan menimbulkan kerugian negara dalam hal ini PT Asabri (Persero), ditetapkan sebagai Tersangka TPPU dengan dikenakan pasal sangkaan melanggar Pasal 3 dan /atau Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Tim Jaksa Penyidik akan terus mengejar dan menindak siapapun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan akan diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara tersebut," ujar Leonard.

Selain itu, Kejagung berharap masyarakat dapat mengawal dan mendukung penuntasan perkara perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri (Persero).

### **Blokir Aset**

Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memblokir aset-aset tanah pensil (bidang) milik tujuh tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asabri yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

"Upaya pemblokiran aset tanah pensil milik dan atau yang terkait dengan para tersangka adalah upaya penelusuran aset serta dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara yang muncul akibat perbuatan tindak pidana korupsi," kata Leonard.

Total jumlah aset tanah yang disita berupa sertifikat hak milik maupun sertifikat hak guna bangunan sebanyak 2.323 bidang/pensil.

Aset-aset tersebut disita dari tujuh tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), yakni Sonny Widjaja (SW), Bachtiar Effendi (BE), Hari Setiono (HS), Ilham W Siregar (IWS), Lukman Purnomosidi (LP), Benny

Tjokrosaputro (BTS) dan Adam Rachmat Damiri (ARD).

"Beberapa aset tanah pensil yang disita sudah diajukan permohonan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota setempat," kata Leonard.

Jumlah aset tanah terbanyak yang diblokir oleh penyidik Jampid-sus Kejagung adalah milik tersangka Benny Tjokrosaputro sebanyak 2.223 bidang atau pensil yang tersebar di 3 kabupaten.

Berikutnya aset tanah milik tersangka Sonny Widjaja ada 18 bidang yang tersebar di 9 kabupaten/kota.

Sehari sebelumnya, Jampid-sus Kejagung melakukan pengeledahan ke sejumlah tempat dan perusahaan milik para tersangka dan melakukan penyegelan serta penyitaan.

Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.

Sejauh ini Jampid-sus Kejaksanaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode tahun 2011 - Maret 2016 (Purn) Mayjen Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016 - Juli 2020 (Purn) Letjen Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur PT Asabri periode 2013 - 2014 dan 2015 - 2019 Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 - Januari 2017 Ilham W Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Kemudian Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Baik Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. (b1/ant)

## 2030, Anies Rencanakan 80% Armada Transjakarta Gunakan Bus Listrik

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan, 80% armada Transjakarta bisa menggunakan bus listrik pada Tahun 2030. Penggunaan bus listrik ini, kata Anies, untuk mengurangi tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca.

"Dalam mendukung komitmen Kota Jakarta untuk udara bersih, kami berencana beralih ke bus listrik. Armada Bus listrik juga akan terus ditingkatkan, sehingga pada Tahun 2030 diharapkan 80% armada Transjakarta telah menggunakan bus

listrik, semua hal tersebut dilakukan demi membuat maju Kota Jakarta," ujar Anies melalui akun *Instagram* pribadinya, sebagaimana dikutip **Beritasatu.com**, Minggu (7/3).

Anies mengatakan, beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi kendaraan berbahan bakar minyak di jalan, terlebih menggunakan bus listrik yang berbahan bakar baterai dan bebas emisi.

Menurut Anies, transportasi itu merupakan denyut nadi dalam kehidupan perkotaan, kita harus memas-

tikan bahwa transportasi itu ramah lingkungan dan bebas polusi.

"Oleh karena itu bus listrik hadir dalam sistem transportasi di DKI Jakarta untuk memastikan bahwa transportasi itu ramah lingkungan dan bebas polusi," tandas dia.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, dengan menggunakan transportasi umum, masyarakat dapat mengurangi tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Apalagi, kata dia, jika bus kota menggunakan bus listrik yang menggunakan baterai dan bebas emisi.

"Bus listrik bukan hanya lebih bersih, bus listrik juga berjalan lebih halus, minim getaran, dan lebih tenang. Dengan menggunakan bus listrik diharapkan warga Jakarta lebih nyaman dan bahagia dalam bertransportasi," pungkaskan Anies.

### **Pencurian Suku Cadang**

Empat tersangka kasus pencurian *sparepart* (suku cadang) berupa kursi bus Transjakarta memanfaatkan celah pengamanan di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.

Kapolrestro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan para tersangka menyasar bus Transjakarta yang sudah tidak beroperasi lagi di penampungan tersebut.

"Bus itu dalam keadaan tidak beroperasi dan terparkir di penampungan Dishub sehingga mereka melihat pengawasan dan pengamanan tidak terlalu ketat," kata Erwin.

Erwin Kurniawan mengatakan masih menyelidiki dugaan keterlibatan orang dalam pada kasus pencurian kursi Transjakarta tersebut.

Erwin menambahkan para tersangka dalam aksinya itu berhasil mencuri kurang lebih sebanyak 120 kursi bus Transjakarta. Bahkan menurut dia aksi ini sudah dua kali dilakukan oleh tersangka.

Para tersangka, lanjut Erwin, diamankan anggota Resmob Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Cipinang Muara ketika hendak menjual barang hasil curian tersebut. "Kita masih melakukan penyelidikan termasuk ke mana barang itu akan dikirim," ujar Erwin. (b1/ant)



## AHY: KLB Jadi Ujian Masa Depan Demokrasi Indonesia

BeritaSatuPhoto/Joanito De Saorjoa.



### Konsolidasi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kegiatan konsolidasi secara virtual dengan sejumlah DPD, dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (7/3/2021). AHY menyatakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat (PD) di bawah kepemimpinannya bersikap melawan Kongres Luar Biasa (KLB) PD versi Ketua Umum Moeldoko yang digelar di Sumatera Utara. AHY melaksanakan rapat konsolidasi yang diklaim diikuti oleh perwakilan dari 514 pengurus tingkat kabupaten/kota (DPC) dan 34 tingkat provinsi (DPD).

Oleh Imam Suhartadi

▶ **JAKARTA** - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kongres luar biasa di Deli Serdang serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

"Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia," kata AHY saat memberi sambutan di depan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai, di Jakarta, Minggu (7/3).

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan upaya mengganti pimpinan partai bukan masalah yang hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri.

"Kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY. Tapi ini permasalahan ataupun ujian bagi kami semua, seluruh pemimpin dan pengurus, serta kader Partai Demokrat di manapun (mereka, red) berada," tutur AHY.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga menegaskan kongres luar biasa bukan sekadar masalah internal partai, karena itu melibatkan pihak luar, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

AHY dalam sambutannya mengatakan Moeldoko berupaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal

dan inkonstitusional. Ia lanjut menyebut upaya itu sebagai perbuatan yang memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan.

Oleh karena itu, AHY mengatakan pihaknya akan melawan hasil KLB di Deli Serdang. "Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," ucap AHY.

Partai Demokrat pimpinan AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus pusat, daerah, dan cabang di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta.

Di samping rapat dengan pengurus, Partai Demokrat juga mempersilakan masyarakat untuk memberi dukungan di atas mimbar. Acara pemberian dukungan lewat orasi dan mimbar bebas rencananya akan digelar di halaman dalam kantor pusat Partai Demokrat.

Dalam rangkaian konsolidasi partai, AHY juga akan menggelar apel siaga bersama ketua dewan pengurus cabang (DPC) Partai Demokrat di 514 kabupaten dan kota hari ini (7/3).

### Kepengurusan Resmi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, hingga saat ini pemerintah masih mencatat kepemimpinan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud, dalam tayangan Youtube Kemenko Polhukam RI, Sabtu (6/3).

Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepemimpinan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. "Jadi nggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.

Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB.

"Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada, misalnya, di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat," ujar Mahfud.

Tetapi, lanjut dia, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah. Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.

"Kalau terjadi perkembangan orang dari kelompok di Deli Serdang melapor, lalu pemerintah ini menilai apakah ini sah atau tidak. Sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti, nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu," papar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menjelaskan, bila ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada keputusan sulit untuk bersikap.

"Apakah ini akan dilarang atau tidak. Secara opini kita mendengar wah ini tidak sah, ini sah secara opini, tapi secara

hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja," katanya.

Hal itu juga yang terjadi pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada zaman pemerintahan Presiden SBY juga tidak melarang adanya dualisme kepemimpinan PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menyenorkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Keterangan Mahfud dianggap berbelit-belit. Hal itu terkait Mahfud yang menyebut pemerintah tak bisa melarang kegiatan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Penjelasan Prof Mahfud terlalu berputar-putar, padahal permasalahan ini sangat simpel," kata Herzaky, Sabtu (6/3).

Herzaky menuturkan KLB yang digelar segelintir kader dan mantan kader, bukan persoalan internal PD belaka. Sebab, pihak yang menyelenggarakan ada juga dari eksternal.

"Ada keterlibatan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang nyata dan terang benderang, yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan ini sebagai ketua umum abal-abal. Lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menerima keputusan ini," ujar Herzaky.

Menurut Herzaky, penetapan itu inkonstitusional, bertentangan dengan AD ART PD yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Peserta yang menghadiri KLB bukan pemilih suara sah. Dengan begitu, tindakan penyelenggaraan KLB ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Herzaky menyatakan pemerintah wajib melindungi dan mengayomi PD yang sah, dan melawan tindakan Moeldoko. Hal ini guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan. (b1)

## Ridwan Kamil: PPKM Mikro Turunkan Kasus Covid-19 Hingga 60%

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dapat menurunkan kasus penyebaran Covid-19 hingga 60%.

"PPKM mikro berhasil menurunkan kasus minggu sebanyak 60%. Jadi, kami berkesimpulan PPKM mikro berhasil dan kami ingin mengupayakan PPKM ini sebagai adaptasi baru karena mengelola kasus berbasis wilayah-wilayah kecil," ujar Ridwan Kamil saat evaluasi minggu seperti yang dikutip dari media sosial, Minggu (7/3).

Dia menjelaskan, dalam dua pekan sebelumnya, kasus mingguan di Jabar sebanyak 28.000 kasus, namun pada hari kemarin terdapat hanya 10.000-an kasus.

"Ini adalah data *real time*. Jadi, kami tidak menggunakan data yang diumumkan oleh pemerintah pusat tentang Jawa Barat karena masih banyak bercampur dengan data lama. Ini sudah dibersihkan, data harian yang kami himpun sehingga terjadi tren menurun," imbuhnya.

Pria yang kerap disapa Emil ini menambahkan, untuk pertama kalinya dalam setahun ini, tidak ada kota/kabupaten di Jabar yang masuk zona merah.

"Setelah berbulan-bulan naik turun dan empat minggu terakhir, satu (kota) pindah pindah (zona) dan minggu ini, tidak ada zona merah di Jawa Barat untuk level kota dan kabupaten," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang PPKM berbasis mikro mulai 9-22 Maret 2021. PPKM mikro sudah berlangsung sejak 9-22 Februari 2021 dan diperpanjang sampai Senin (8/3).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi ini pada 4 Maret 2021 kemarin.

Dalam Inmendagri kali ini, PPKM Mikro diperluas ke tiga provinsi, selain tujuh provinsi

lainnya yang sudah terlebih dahulu diinstruksikan. Tiga provinsi itu antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyatakan, ia tidak mau memprediksi hasil angka pandemi di akhir Maret ini. Baginya lebih baik melihat saja hasil yang dilakukan satuan petugas dan pemerintah selama ini berbuat apa saja ke depan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan penambahan harian kasus Covid-19 di Indonesia per hari ini, Minggu (7/3) sebanyak 5.826. Terjadi peningkatan dibanding kemarin yakni 5.767.

Dengan penambahan ini maka total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 1.379.662. Untuk kasus sembuh hari ini bertambah 5.146 sehingga total menjadi 1.194.656 atau 86,5% dari terkonfirmasi.

Kasus meninggal bertambah 112 menjadi total 37.266 atau 2,7% dari terkonfirmasi. Jumlah tersebut didapatkan dari pemeriksaan spesimen sebanyak 43.900. (b1)

## Kemenkes: Akses Pendaftaran Vaksin Lansia Sudah Diperbanyak

JAKARTA - Juru Bicara Kemenkes untuk vaksinasi dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, untuk mendapatkan vaksinasi harus melalui proses registrasi (pendaftaran) yang kini aksesnya sudah diperbanyak, termasuk untuk warga lanjut usia (lansia).

"Adanya kondisi keterbatasan vaksin maka pemerintah mengutamakan kelompok lansia berusia 60 tahun ke atas dengan tahap awal difokuskan untuk Pulau Jawa dan Bali. Alasannya, kedua wilayah itu mencatat banyak lansia dan daerah dengan penularan Covid-19 yang tinggi. Registrasi saat ini banyak sekali mekanismenya dan akses ini sudah dibuka sebanyak mungkin mulai dari adanya *drive thru*, pelaksanaan oleh berbagai organisasi seperti alumni, dan lainnya," kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (7/3).

Nadia mengatakan pendaftaran vaksinasi untuk lansia pada dasarnya dibuka dengan dua skema yaitu pertama,

melalui fasilitas kesehatan masyarakat baik di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah, dan kedua melalui program vaksinasi massal oleh organisasi atau instansi. Nadia menyebut informasi terkait pendaftaran vaksinasi lansia bisa didapatkan lewat sejumlah tautan yang bisa diakses publik.

Misalnya untuk skema pertama, Nadia menjelaskan peserta bisa mendaftarkan diri dengan mengunjungi situs resmi Kemenkes pada [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id) dan [sehatnegeriku.kemkes.go.id](http://sehatnegeriku.kemkes.go.id), serta situs resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id).

Di situs Kemenkes tersedia tautan <https://www.kemkes.go.id/article/view/21022000001/Informasi-Pendaftaran-Vaksinasi-pada-Lansia.html> yang bisa diakses secara mudah bagi lansia yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta vaksinasi Covid-19. Dalam situs-situs pendaf-

tan vaksin lansia tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan yang harus diisi. Dalam mengisi data, peserta lanjut usia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT atau RW setempat.

Setelah peserta mengisi data di situs terkait maka seluruh data peserta akan masuk ke Dinas Kesehatan provinsi masing-masing. Selanjutnya Dinas Kesehatan akan menentukan jadwal, termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi, kepada masyarakat lanjut usia.

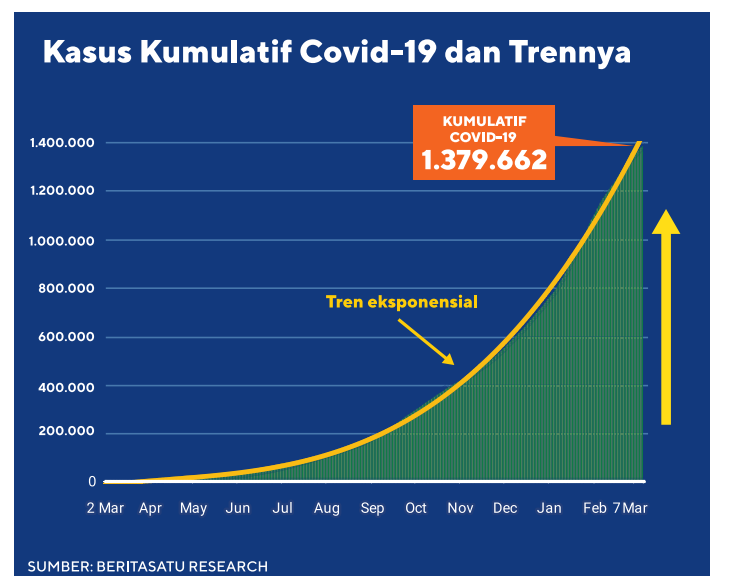
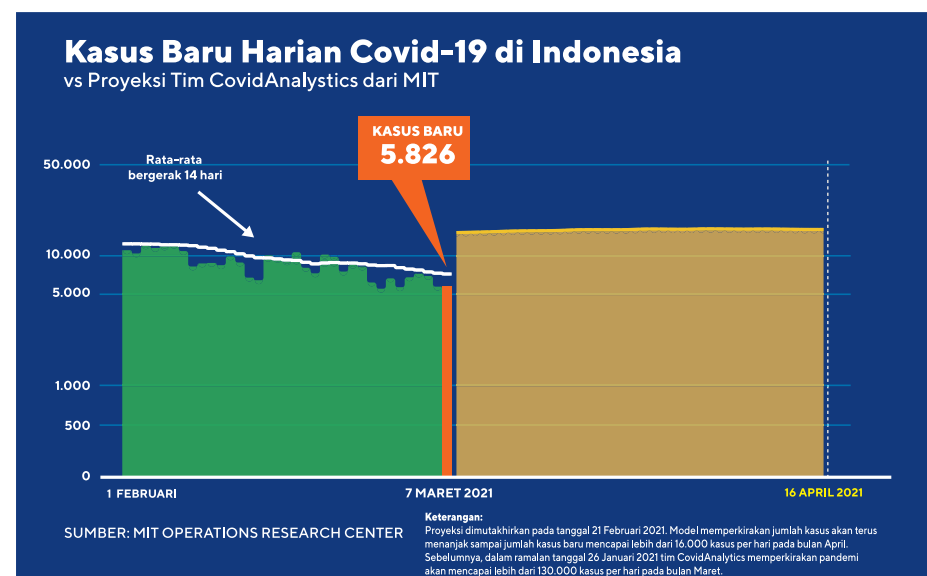
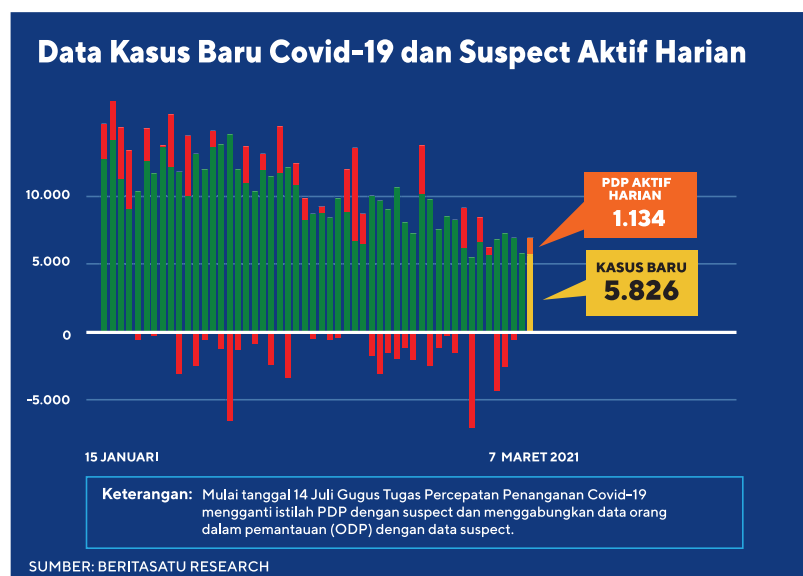
Untuk skema kedua yaitu program vaksinasi massal oleh organisasi dan instansi, mekanismenya harus dilakukan organisasi atau instansi terkait bekerja sama dengan Kemenkes atau Dinas Kesehatan.

Organisasi dan instansi yang sudah menjalin kerjasama akan menentukan jadwal, termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi, kepada masyarakat lanjut usia. (b1)



### Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Bagi Pekerja Media

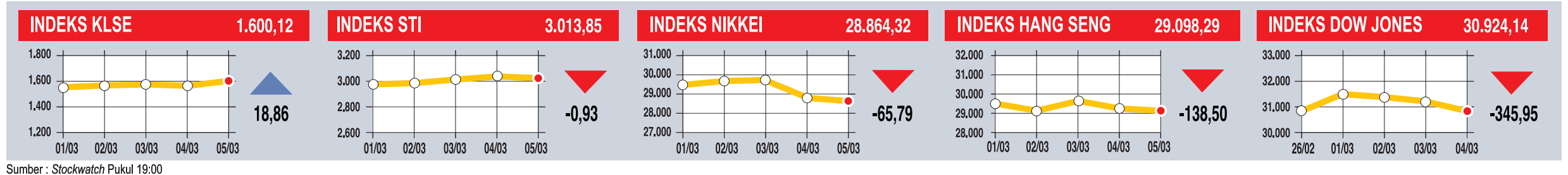
Seorang wartawan melakukan laporan langsung saat disuntik vaksin Covid-19 dalam vaksinasi tahap kedua di Denpasar, Bali, Sabtu (6/3/2021). Pemerintah Provinsi Bali menggelar vaksinasi tahap kedua bagi pekerja media yang diikuti 268 orang karena profesi itu rentan terpapar Covid-19 akibat kontak langsung dengan masyarakat di lapangan.











# Ekspansi Barito Pacific dan Pemulihan Harga Produk Petrokimia

Oleh Parluhutan Situmorang

Peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi usaha akan mendorong pertumbuhan kinerja keuangan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dalam jangka panjang. Selain itu, pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai terkendali seiring program vaksinasi juga bakal membantu perseroan dalam menjalankan usaha.



**Agus Salim Pangestu**

Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk

Agus Salim diangkat menjadi presiden direktur Barito Pacific sejak Juni 2013 dengan tugas untuk memimpin dan mengkomodasi pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Dia menyelesaikan pendidikan di Boston College Amerika Serikat (AS) pada 1994. Kemudian, ia memulai karier di Linkage Human Resource Management pada 1993 dan analisis keuangan di Merrill Lynch Amerika Serikat pada 1995. Agus Salim kemudian bergabung dengan Barito Pacific pada Juli 1997 dan mulai menjabat sebagai direktur pada 1998. Lalu, posisinya naik menjadi wakil presiden direktur perseroan pada Juni 2002-Juni 2013. Dia juga menjabat sebagai komisaris Chandra Asri hingga saat penggabungan usaha dan menjabat komisaris Chandra Asri Petrochemical.



Analisis Trimegah Sekuritas Hasbie dan Willinoy Sitorus mengungkapkan, konsistensi Barito Pacific untuk meningkatkan kapasitas produksi akan menopang pertumbuhan kinerja keuangan dan kenaikan harga saham BRPT dalam jangka panjang.

Barito Pacific melalui anak usahanya, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), merupakan produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Barito Pacific juga memiliki Star Energy Group, anak usaha yang bergerak di bidang pembangkit listrik panas bumi atau geotermal. Adapun kapasitas produksi Chandra Asri mencapai 4.231 ktpa dan Star Energy memiliki kapasitas 875 MW. "Kedua perusahaan itu memang tidak memiliki sinergi operasional, tetapi satu sama lain saling melengkapi. Chandra Asri merupakan perusahaan dengan keuangan yang sehat dan harga jual produk yang cenderung naik," tulis Hasbie dan Willinoy dalam risetnya.

Sementara, Star Energy memiliki arus kas yang stabil dan diharapkan bisa menurunkan biaya keuangan. Selain itu, bisnis geotermal tergolong pembangkit listrik yang paling

ramah lingkungan dengan gas buang karbon yang rendah dibandingkan pembangkit listrik lainnya.

Terkait *spread* keuntungan bisnis petrokimia, Hasbie dan Willinoy menyebutkan bahwa itu memang mengalami penurunan pada kuartal II-2020, namun mulai *rebound* pada kuartal III dan berlanjut pada kuartal IV-2020. "Kami optimis *spread* penjualan petrokimia akan meningkat tahun ini, seiring dengan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi," ungkap mereka.

Hasbie dan Willinoy memprediksi *spread* keuntungan penjualan HDPE-Naphtha meningkat dari US\$ 400 per ton menjadi US\$ 445 per ton tahun ini. Selain itu, LLDPE-Naphtha diproyeksi meningkat dari US\$ 450 per ton menjadi US\$ 495 per ton. Hal serupa juga diharapkan terjadi pada PP-Naphtha dari US\$ 558 per ton menjadi US\$ 595 per ton.

Di tengah tren kenaikan harga jual produk petrokimia tersebut, Chandra Asri juga gencar menambah kapasitas produksi. Perseroan akan membangun pabrik petrokimia kedua dengan target lonjakan produksi etilena dari 900 ribu tpa menjadi 2.000 ribu tpa per tahun. Pabrik tersebut diperkirakan siap beroperasi

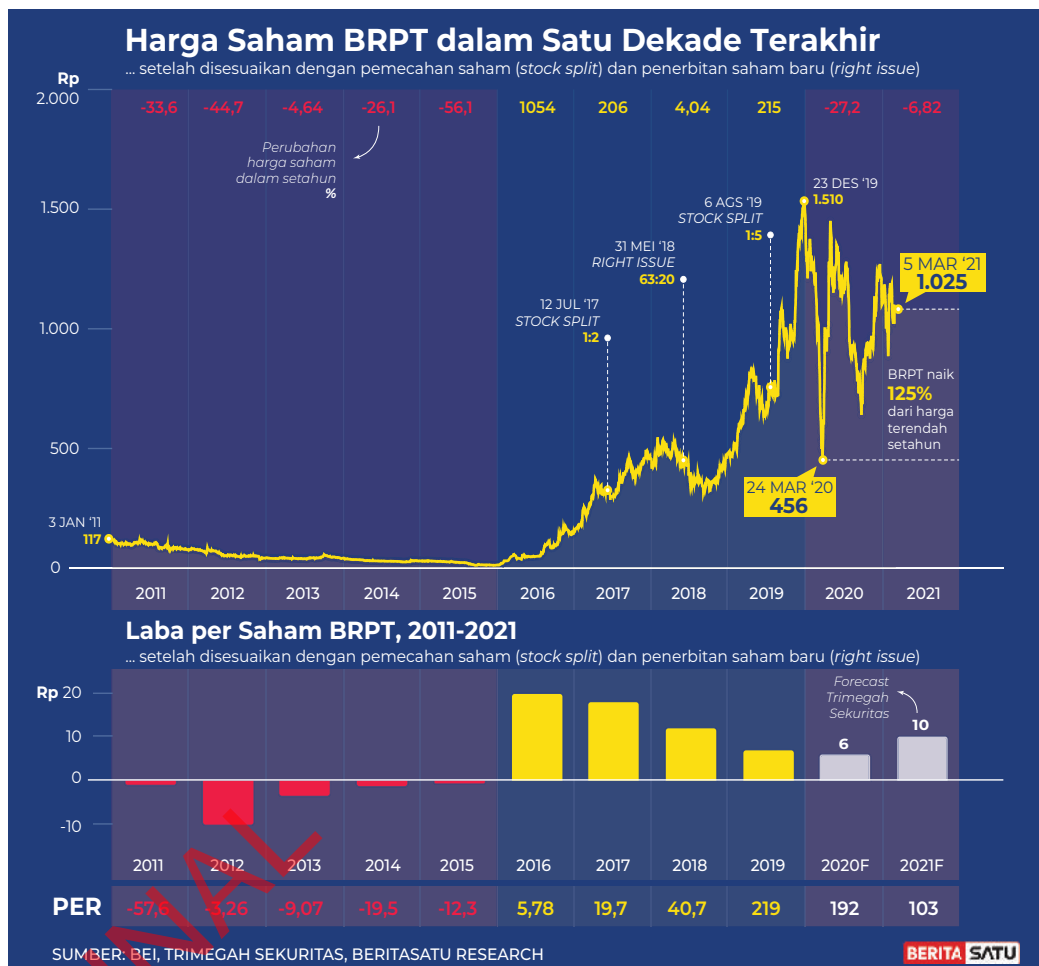
pada 2025 dengan kebutuhan belanja modal pengembangan mencapai US\$ 5 miliar.

Perseroan juga sedang menjajaki mitra strategis untuk menggarap proyek tersebut. Kehadiran mitra strategis itu bisa menjadi katalis positif terhadap Chandra Asri maupun Barito Pacific.

Dari bisnis geotermal, Star Energy menargetkan kapasitas produksi sebesar 1.200 MW pada 2028 dibandingkan saat ini 875 MW. Beberapa proyek yang segera memasuki tahap konstruksi adalah proyek Salak Binary dengan kapasitas 15 MW, Salak Unit 7 kapasitas 55 MW, dan Wayang Windu Unit 3 dengan kapasitas 60 MW.

Berbagai faktor tersebut mendorong Trimegah Sekuritas merekomendasikan *hold* saham BRPT dengan target harga Rp 1.170. Target harga tersebut mempertimbangkan EV/EBITDA 16,6 kali dan PBV 5,9 kali tahun ini.

Target harga tersebut juga mempertimbangkan proyeksi peningkatan laba bersih Barito Pacific tahun ini menjadi US\$ 67 juta dibandingkan perkiraan tahun lalu senilai US\$ 36 juta. Begitu juga dengan pendapatan diharapkan meningkat menjadi US\$ 2,42 miliar pada 2021 dibandingkan proyeksi tahun 2020 sebesar US\$ 2,22



**Prospek BRPT**  
Trimegah Sekuritas  
Rekomendasi : Hold  
Target Harga : Rp 1.170  
Harga Terakhir : Rp 1.025  
Potensi Gain : 14%

**BRI Danareksa Sekuritas**  
Rekomendasi : Hold  
Target Harga : Rp 1.165  
Harga Terakhir : Rp 1.025  
Potensi Gain : 13,6%

**Ringkasan Kinerja Keuangan Barito Pacific**  
(dalam juta US\$)

	2018	2019	2020F	2021F	2022F
Pendapatan	3.076	2.402	2.224	2.425	2.567
EBITDA	774	539	549	675	792
Laba bersih	72	44	36	67	105
EPS (Rp)	12	7	6	10	18
Net margin (%)	2,3	1,8	1,6	2,7	4,1
P/E (x)	92,5	157,1	191,6	103	61,6
P/BV (x)	5,7	5,8	5,5	5,5	4,9
ROAE (%)	5,9	3,8	3,1	5,4	8,1
ROAA (%)	1	0,6	0,5	0,9	1,4
Net debt to equity (x)	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Kas akhir tahun	801	744	700	612	608

Sumber: Trimegah Sekuritas

miliar. Sementara itu, analisis BRI Danareksa Sekuritas Ignatius Teguh Prayoga mengungkapkan, pertumbuhan kinerja keuangan Barito Pacific bakal berlanjut karena didukung oleh *spread* keuntungan penjualan produk petrokimia yang diperkirakan pulih. Pemulihan harga terlihat sejak Juni 2020.

"Kami memperkirakan peningkatan rata-rata harga jual produk petrokimia perseroan sebesar 24% pada 2021, dengan perkiraan margin kotor mencapai 14%. Sedangkan bisnis geotermal masih menunjukkan kehati-hatian bagi perseroan," tulis dia dalam risetnya. Sebab itu, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan

rekomendasi *hold* saham BRPT dengan target harga Rp 1.165. EV/EBITDA tahun ini diperkirakan mencapai 17,1 kali. Target harga tersebut mempertimbangkan berlanjutnya ekspansi bisnis perseroan. Target harga tersebut juga telah mempertimbangkan proyeksi peningkatan laba

bersih Barito Pacific menjadi US\$ 176 juta pada 2021 dibandingkan perkiraan tahun 2020 senilai US\$ 123 juta. Pendapatan perseroan juga diharapkan bertumbuh menjadi US\$ 3,84 miliar tahun ini dibandingkan perkiraan tahun 2020 senilai US\$ 2,38 miliar.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Barito Pacific David Kosasih mengatakan, pihaknya akan fokus melanjutkan ekspansi senilai total US\$ 8,32 miliar selama lima tahun ke depan. Pendanaan proyek akan berasal dari mitra strategis, pinjaman bank, serta kas internal perseroan.

Menurut dia, tiga proyek utama perseroan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) senilai US\$ 3,28 miliar, kompleks pabrik Chandra Asri Petrochemical (CAP) II senilai US\$ 5 miliar, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak Binary senilai US\$ 40 juta.

## Tambah Rumah Sakit, Mitra Keluarga Anggarkan Capex Rp 350 Miliar

JAKARTA - PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) menyiapkan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sebesar Rp 350 miliar tahun ini. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah sakit baru. Selain itu, perseroan tengah menjajaki akuisisi dua rumah sakit tahun ini.

Head of Investor Relations Mitra Keluarga Karyasehat Aditya Widjaja mengatakan, rumah sakit yang bakal dibangun terletak di Jabodetabek dengan target kapasitas 200 tempat tidur. Dengan dimulainya pembangunan tahun ini, perseroan berharap operasional rumah sakit tersebut bisa dilaksanakan pada 2022. "Selain membangun rumah sakit baru, kami tengah melakukan penajakan untuk akuisisi dua rumah sakit dengan target finalisasi tahun ini," jelasnya kepada *Investor Daily*, akhir pekan lalu.

Untuk memuluskan rencana itu, kata Aditya, perseroan telah menyiapkan belanja modal sebanyak Rp 350 miliar yang berasal dari kas internal. Sebanyak 75% perseroan dialokasikan untuk pembangunan dan sisanya akan digunakan untuk peremajaan rumah sakit eksisting

serta untuk mendukung operasional.

Lebih lanjut, Mitra Keluarga memproyeksikan pelayanan pada pasien yang terpapar Covid-19 masih mendominasi sumber pendapatan perseroan pada semester I tahun ini, sejalan dengan jumlah kasus yang masih cukup tinggi.

Sementara itu, pada semester II tahun ini, perseroan berharap pendapatan dari pelayanan non Covid-19 dapat berangsur pulih beriringan dengan program vaksinasi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Dengan demikian, perseroan memperkirakan pendapatan dari segmen Covid-19 dan non Covid-19 dapat berimbang.

"Penurunan kasus terpapar pada semester dua nanti diharapkan mengembalikan rasa aman kepercayaan untuk kembali melakukan perawatan umum di luar Covid-19 yang sebelumnya tertunda selama pandemi," ujarnya.

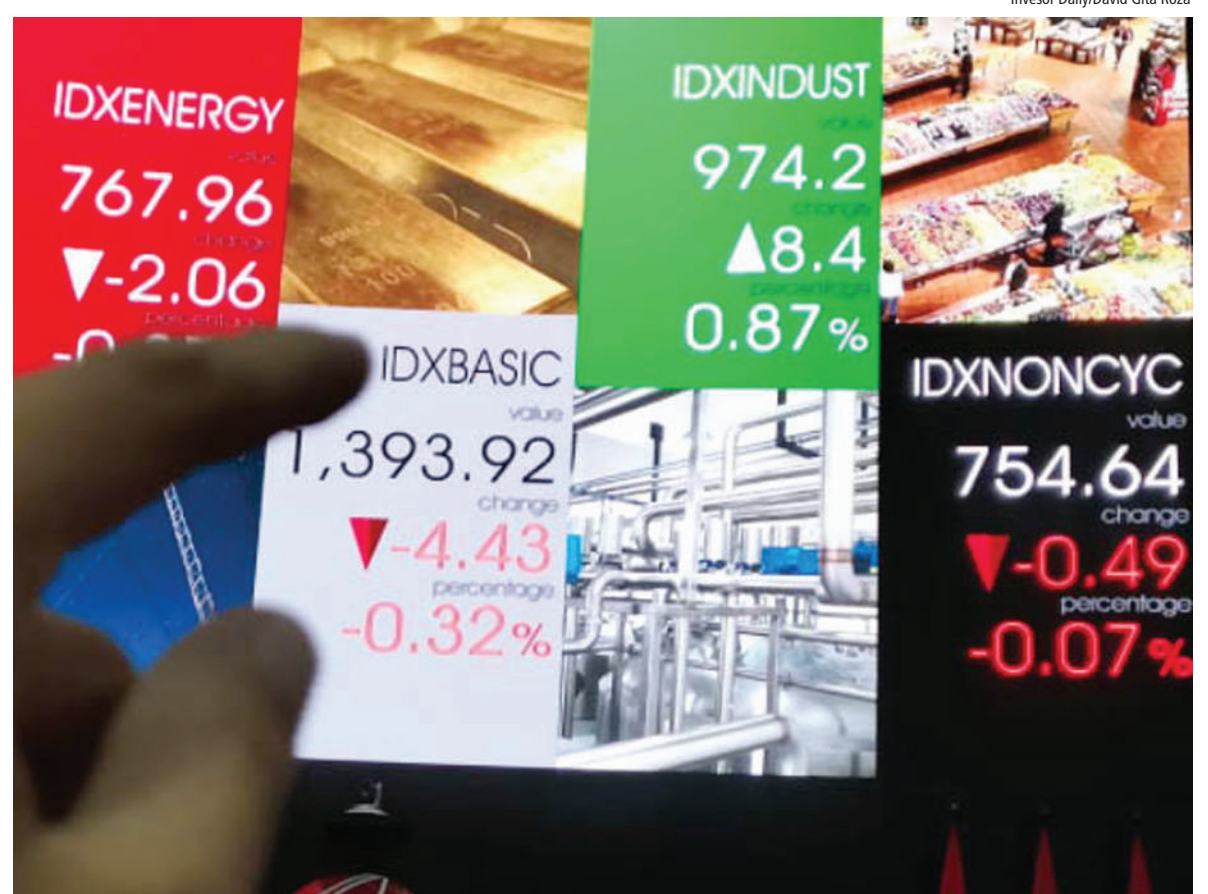
Jika melihat performa perseroan pada kuartal-IV-2020, menurut dia, perseroan dapat mengantisipasi jumlah kasus yang tinggi dengan jumlah tempat tidur yang memadai. Pihaknya yakin dapat membukukan pendapatan

dan EBITDA bertumbuh dua digit. "Ada kesamaan kondisi antara kuartal-IV dan semester pertama 2021," kata dia.

Hingga kuartal-III 2020, Mitra Keluarga membukukan pendapatan sebanyak Rp 2,31 triliun, turun 2,94% dari periode yang sama pada tahun 2019 senilai Rp 2,38 triliun. Segmen pendapatan rawat jalan terkoreksi hingga 10,19% menjadi Rp 814,2 miliar dari Rp 906,58 miliar.

Secara rinci, bagian obat dan perlengkapan medis menyumbang Rp 332,3 miliar, pelayanan penunjang medis sebesar Rp 304,09 miliar, jasa tenaga ahli Rp 129,26 miliar, dan registrasi Rp 48,54 miliar.

Meski demikian, perseroan membukukan peningkatan pendapatan pada segmen rawat inap sebanyak 2,04% menjadi Rp 1,5 triliun dari Rp 1,47 triliun di akhir Desember 2019. Segmen kamar rawat inap menyumbang pertumbuhan paling besar dengan menyumbang Rp 284,96 miliar atau naik 3,68%. Adapun total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk Mitra Keluarga Karyasehat tercatat sebesar Rp 525,44 miliar, turun tipis 1,19%. (ftr)



### IHSG Pekan Ini

Investor berada di galeri Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pekan ini berpeluang terdorong oleh stimulus jumbo yang digelontorkan pemerintah Amerika Serikat (AS), dengan catatan penguatan US Treasury tetap tertahan.



# Macquarie Capital Borong Saham Merdeka Gold Rp 2,43 T

Oleh Gita Rossiana

▶ JAKARTA – Macquarie Capital Ltd memborong satu miliar saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) pada harga Rp 2.420 per saham. Dengan demikian, nilai transaksinya mencapai Rp 2,43 triliun.

Merdeka Copper Gold menerbitkan satu miliar saham tersebut melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau *private placement*. "Macquarie Capital yang merupakan perusahaan investasi asal Australia menyerap saham tersebut. Dengan begitu, jumlah saham Merdeka Copper Gold menjadi 22,9 miliar dari sebelumnya 21,89 miliar," jelas manajemen Merdeka Copper Gold dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Sesuai rencana, dana dari hasil *private placement* tersebut akan digunakan untuk belanja modal perseroan dan anak usaha. Sebelumnya, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) telah menyetujui rencana Merdeka Copper Gold untuk melakukan *private placement*. Aksi ini dilakukan pada 4 Maret 2021.

Selain *private placement*, Merdeka Gold menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 1,5 triliun. Surat utang tersebut bagian dari Obligasi Berkelanjutan II senilai total Rp 3 triliun.

Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan tenor 367 hari dan Seri B dengan jangka waktu tiga tahun. Perseroan melangsungkan penawaran obligasi pada 23 Februari hingga 4 Maret 2021. Perkiraan tanggal efektif pada 19 Maret 2021, masa penawaran umum pada 23 dan 24 Maret 2021, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Maret 2021.

Bertindak sebagai penjamin pelaksanaan emisi obligasi perseroan adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sutor Sekuritas.



Rata-rata Frekuensi Harian Bursa

Karyawan melihat daftar saham di sebuah sekuritas di Jakarta. Pada pekan kemarin rata-rata frekuensi harian bursa mengalami peningkatan sebesar 0,85% menjadi 1.408.070 kali transaksi dari 1.396.236 kali transaksi pada sepekan sebelumnya. IHSG mengalami peningkatan sebesar 0,27% atau ditutup pada level 6.258,749 dari level 6.241,796 pada penutupan perdagangan pekan sebelumnya.

Sementara, wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Perseroan menyebutkan bahwa sekitar 23% dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran pokok utang dalam perjanjian fasilitas bergulir mata uang tunggal sebesar US\$ 25 juta pada 23 Desember 2020.

Kemudian, sekitar 11% akan dimanfaatkan PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk mendanai kegiatan eksplorasi proyek tembaga Tuhuh Bukit. Saat ini, perseroan sedang menyusun pra-studi kelayakan untuk proyek itu yang diharapkan selesai pada 2021.

Sisanya akan digunakan oleh Merdeka Gold dan anak usaha untuk kebutuhan modal kerja. Kebutuhan itu mencakup pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan pembayaran beban keuangan.

**Tsingshan Group**

Belum lama ini, Merdeka Gold telah mencapai kesepakatan untuk membentuk perusahaan patungan melalui *joint venture agreement* (JVA) dengan nilai transaksi sebesar US\$ 90 juta.

Perseroan telah menandatangani perjanjian usaha patungan proyek *Acid Iron Metal* (AIM) bersama dengan Wealthy Source Holding Ltd dan Eternal Tsingshan Group Ltd pada 11 Februari 2021.

Melalui perjanjian tersebut, perseroan akan mendirikan perusahaan patungan melalui anak usahanya, yakni PT Batutua Pelita Investama (BPI), yang akan memiliki 80% saham dan Tsingshan melalui afiliasinya, yaitu Wealthy, akan memiliki 20% saham.

"Berdasarkan JVA, para pihak akan membangun proyek pabrik AIM di Indonesia, Morowali Industrial Park

(IMIP), di Sulawesi untuk memproses bijih pirit dari proyek tembaga Wetar Merdeka Copper Gold," ujar *Corporate Secretary* Merdeka Copper Gold Adi Adriansyah Sjoekri.

Proyek AIM tersebut diharapkan menjadi aset multi komoditas yang berumur panjang serta memperluas basis sumber daya tembaga Wetar Merdeka Copper Gold. "Selain itu, pendirian perusahaan patungan ini jika telah beroperasi akan memberikan potensi tambahan pendapatan dan laba perseroan," jelas dia.

Nilai transaksi aksi tersebut sebesar US\$ 90 juta, termasuk di dalamnya setoran modal awal pada perusahaan patungan. Sumber pendanaan untuk proyek AIM tersebut berasal dari pemegang saham perusahaan patungan dan pihak ketiga yang akan diusahakan oleh perseroan.

# Sejumlah Perusahaan Milik Anggota Hipmi Jabar Siap IPO

JAKARTA – Beberapa perusahaan yang dimiliki sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat sedang menjajaki penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*) saham.

Sejumlah perusahaan yang berniat IPO saham tersebut berasal dari industri properti, aneka industri, dan industri barang konsumsi. "Ada beberapa perusahaan yang dimiliki sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Hipmi Jawa Barat sedang mempersiapkan IPO saham, namun masih proses dan mencari waktu yang tepat, seperti kondisi pasar setelah terdampak Covid-19. Untuk detail perusahaannya dan target dananya belum bisa disebutkan," ucap Ketua Komite Investasi UKM BPD Hipmi Jawa Barat sekaligus CEO PT Modal Saham Asia Investama Muhammad Reza Alkharisni kepada *Investor Daily*, Minggu (7/3).

Sebagai perusahaan swasta yang berfokus pada investasi di industri UKM dan *start-up*, Modal Saham mengajak anggota Hipmi maupun non-Hipmi untuk terus membangun ekosistem agar bisnisnya bisa berkembang dan bisa IPO terlebih dahulu. Modal Saham, diakuinya, memang memiliki niat untuk IPO dalam beberapa tahun ke depan.

Saat ini, Modal Saham, sambung Reza, sedang dalam tahap menginkubasi beberapa UKM di sejumlah sektor yang memiliki potensi untuk *go public*, baik dari sisi bisnis dan terutama mengenai *good corporate governance* (GCG).

"Saat semua hal sudah *proper*, kami kemudian mendorong UKM tersebut untuk IPO saham. Jujur saja, masih butuh waktu dan persiapan untuk ke arah sana. Karena kita tidak mau mereka sekadar IPO untuk mendapat dana murah dari publik, tapi juga ingin memuaskan investor publik ke depan dari sisi kinerja perusahaan. Dan, yang kita inkubasi tidak hanya untuk anggota Hipmi, tetapi terbuka untuk umum, selama ada potensi untuk disnergi-



Muhammad Reza A

kan dan dikolaborasi," tuturnya.

Reza menegaskan, pihaknya akan membuat inkubator bisnis khusus UKM dengan memohon izin dan bersinergi dengan kompartemen lainnya di BPD Hipmi Jawa Barat, dimana inkubator tersebut di dalamnya memberikan materi bisnis dan pendampingan bisnis, seperti memberikan bimbingan mengenai keuangan yakni pembukuan dan perpajakan, serta mengenai lingkup teknis lainnya, yang selama ini masih menjadi salah satu problem UKM. Selain itu, memberikan bimbingan legalitas usaha, yang mana masih banyak UKM yang masih bersifat perseorangan untuk dapat segera berbadan usaha dan berbadan hukum, serta mengenai teknis hukum bisnis lainnya. "Melek keuangan dan hukum sangat penting untuk UKM saat ini," kata Reza yang juga menjabat sebagai presiden direktur di *holding* Alkharisni Venture Capital Investment.

Dia menambahkan, rencananya inkubator tersebut juga akan memberikan pelatihan serta pengenalan teknologi kepada UKM untuk *go digital*. Itu semua menurutnya perlu untuk membantu UKM di Jawa Barat untuk *go public* dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesegera mungkin, jika mereka sudah siap setelah diinkubasi. (Iov)

# Mirae Asset Sekuritas akan Terbitkan 5 Produk ETF

JAKARTA – PT Mirae Asset Sekuritas berencana menerbitkan lima produk *exchange traded fund* (ETF) tahun ini. Hal tersebut seiring pesatnya pertumbuhan ETF dalam beberapa tahun terakhir.

*Business Innovation* Mirae Asset Sekuritas Simon Gunawan mengatakan, dari kelima produk tersebut, sebanyak tiga produk ETF akan diluncurkan pada semester I-2021. Sisanya diluncurkan pada semester II-2021.

"Seharusnya dalam *pipeline* kami, satu produk meluncur pada kuartal I-2021, namun karena adanya beberapa kendala administrasi, penerbitan kemungkinan direalisasikan pada kuartal II-2021," ujar dia dalam paparannya, baru-baru ini.

Peluncuran lima produk tersebut seiring dengan pandangan Mirae Asset Sekuritas terhadap pasar ETF, yaitu produk ini akan berkembang pesat di Indonesia didukung peningkatan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.

Simon menambahkan, pertumbuhan pasar ETF dalam kurun waktu empat tahun terakhir meningkat signifikan, dimana jumlah produk ETF naik empat kali lipat dari 10 produk menjadi 45 produk pada akhir tahun lalu.

Sebagai informasi, Mirae Asset Sekuritas telah memiliki satu produk ETF dengan *ticker* XNVE. Produk ini dikelola bekerjasama dengan reksa dana investama Indonesia. Simon menilai, transaksi

produk ETF ini dari bulan 11 tahun lalu pergerakannya cukup aktif.

Di sisi lain, Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Maret ini menguat terbatas dengan pergerakan level *support* di 6.241 dan *resistance* di level 6.428.

*Investment Information* Mirae Asset Sekuritas Martha Christina mengatakan, pergerakan IHSG pada Maret akan dipengaruhi oleh faktor rilis laporan keuangan sepanjang tahun 2020. Namun demikian, kinerja keuangan emiten diperkirakan turun akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Pergerakan IHSG juga dipengaruhi rilis data PMI manufaktur sejumlah negara bulan ini, diantaranya Tiongkok, Amerika Serikat (AS), Indonesia, Malaysia dan India. Namun demikian data PMI manufaktur negara tersebut mengalami penurunan dan dinilai anomali.

"Ini agak anomali, sebab data Januari meningkat dan Februari menurun, sementara di tahun sebelumnya bulan Februari mengalami kenaikan dan Januari menurun karena memang awal tahun," ujar dia dalam konferensi pers virtual.

Faktor lainnya adalah aksi korporasi beberapa emiten, termasuk RUPS, *dividen*, *rights issue* dan *stock split*. Untuk *dividen*, terdapat beberapa emiten yang diprediksi memberikan *dividen* per lembar saham dengan cukup tinggi, salah satunya PTBA. (bil)

# Smartfren Segera Rights Issue Rp 700 Miliar

JAKARTA – PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) segera mengeksekusi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *rights issue* dengan target dana maksimal Rp 700 miliar. Emiten Grup Sinarmas ini akan menyerap emisi tersebut untuk kebutuhan pelunasan utang.

Direktur Keuangan Smartfren Telecom Antony Susilo mengatakan, perseroan telah meraih persetujuan pemegang saham atas rencana *rights issue* pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) 2 Maret. Harga pelaksanaan *rights issue* akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (8/3).

"Dana *rights issue* rencananya akan kami pakai untuk pembayaran pinjaman bank serta modal kerja. Pinjaman bank yang akan jatuh tempo di semester I ini adalah pinjaman dari CDB," jelas dia kepada *Investor Daily*, Minggu (7/3).

Berdasarkan prospektus, Smartfren akan menerbitkan saham baru maksimal 7 miliar saham. Pada aksi ini, perseroan juga akan menerbitkan waran hingga 91,99 miliar waran atau sekitar 34,9% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari

perseroan pada harga tertentu setelah enam bulan sejak waran diterbitkan.

Jika terdapat pemegang saham yang tidak mengesekusi haknya pada *rights issue* Smartfren kali ini, maka persentase kepemilikan sahamnya akan terdilusi maksimal 37,6%. Per 9 Februari, struktur pemegang saham Smartfren antara lain PT Global Nusa Data sebanyak 30,30%, PT Wahana Inti Nusantara sebanyak 18,49%, PT Bali Media Telekomunikasi sebanyak 12,26%, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) sebanyak 12,15%, dan masyarakat menguasai 26,7% saham.

Tahun ini, Smartfren menganggarkan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sekitar US\$ 200-300 juta pada tahun ini. Perseroan diperkirakan akan bergantung pada pendanaan eksternal untuk kebutuhan ekspansi maupun membayar utang jatuh tempo sepanjang 2021.

Lembaga peringkat internasional, Fitch Ratings menilai, industri telekomunikasi Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi secara terus menerus agar tetap kompetitif, terutama karena jangkauan jaringan Smartfren masih tergolong terbatas dibandingkan tiga operator besar lain.

Fitch menilai, pengurangan investasi dapat mengakibatkan Smartfren menjadi tertinggal lebih jauh dibanding

dengan kompetitor-kompetitornya yang lebih besar dan berdampak pada momentum pertumbuhannya, walaupun belanja modal pada dasarnya bersifat fleksibel.

Pada 10 Desember, Fitch mengkonfirmasi peringkat nasional jangka panjang Smartfren, yakni CCC+, dan menarik peringkat tersebut secara bersamaan dengan alasan komersial. Fitch menilai, peringkat Smartfren tetap dibatasi lantaran perseroan mendanai kegiatan operasional dan belanja modal dalam jangka menengah dengan bergantung pada pendanaan eksternal. "Kami memperkirakan Smartfren akan tetap bergantung terhadap pembiayaan eksternal untuk membayar utang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," tulis Fitch.

Fitch mencatat, perseroan memiliki utang jatuh tempo sebesar US\$ 37,5 juta pada semester I-2021, dan US\$ 37,5 juta pada semester II-2021. Kemudian, arus kas bebas negatif Smartfren diprediksi akan bertahan dalam jangka menengah. Hal ini karena perusahaan berencana untuk mempertahankan belanja modal yang signifikan untuk memperkuat cakupan *4G long-term evolution* (LTE).

"Kami memperkirakan arus kas dari operasi (*cash flow from opera-*

*tion*/CFO) Smartfren akan tetap tidak mencukupi untuk menutupi belanja modal tahunan yang diproyeksikan sekitar Rp2,45 triliun untuk 2021-2023, meskipun Smartfren telah menunjukkan perbaikan CFO," kata Fitch.

Secara historis, Fitch mencatat, defisit *free cash flow* (FCF) Smartfren tetap tinggi di atas Rp 3,8 triliun pada tahun 2018 dan 2019 karena belanja modal yang signifikan di atas Rp 2,7 triliun.

**Rugi Berkurang**

Smartfren Telecom membukukan pendapatan Rp 9,40 triliun pada 2020, atau melonjak 34,63% dibanding 2019 sebesar Rp 6,98 triliun. Pendapatan jasa telekomunikasi data berkontribusi Rp 8,62 triliun, non-data Rp 345,78 miliar, jasa interkoneksi Rp 170,09 miliar, dan lain-lain Rp 265,53 miliar.

Seiring lonjakan pendapatan, perseroan mampu menekan rugi usaha 65,9% menjadi Rp 784,67 miliar pada 2020, dibanding Rp 2,30 triliun pada 2019. Perseroan pun meraih keuntungan dari perubahan nilai wajar opsi konversi sebesar Rp 36,82 miliar, dari sebelumnya membukukan kerugian Rp 28,72 miliar. Alhasil, rugi bersih perseroan menurun 30,3% menjadi Rp 1,52 triliun, dari sebelumnya Rp 2,18 triliun. (rid)

# Pasar Surat Utang Pantau Yield Obligasi AS

JAKARTA – Harga surat utang negara (SUN) diproyeksikan bergerak mendarat pekan ini, seiring aksi investor untuk mengamati pergerakan imbal hasil (*yield*) obligasi Amerika Serikat (*US Treasury*). Sementara itu, lelang surat berharga syariah negara pekan ini diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

*Associate Director of Fixed Income* Anugerah Sekuritas Ramadhan Aria Maruto mengatakan, dalam kurun waktu dua pekan terakhir, *US Treasury* mengalami peningkatan yang bisa menghambat investor asing masuk ke Indonesia. "Investor asing terkendala masuk ke Indonesia dalam waktu 1-2 minggu terakhir ini, karena ada peningkatan *yield US Treasury* dan ada beberapa kebijakan yang mereka ambil ke depan ini," ujar dia kepada *Investor*

*Daily*, Minggu (7/3).

Meskipun demikian, Ramdhan menilai, pasar Indonesia masih cukup baik. Sebab, investor domestik masih mendominasi pasar, walaupun sebagian investor cukup berhati-hati untuk masuk ke pasar akibat perubahan eksternal. Sedangkan *yield* surat utang 10 tahun diproyeksikan bergerak di rentang 6,5-6,6%.

Sementara itu, Selasa (9/3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melelang enam seri surat berharga syariah negara dengan target indikator Rp 12 triliun. Enam seri tersebut masing-masing jatuh tempo pada 10 September 2021, 15 Mei 2023, 15 Oktober 2025, 15 Maret 2034, 15 Februari 2037, dan 15 Oktober 2046.

"Kami memperkirakan target indikator 12 triliun akan terpenuhi. Bahkan, nilainya diprediksi mencapai Rp 20 triliun ditopang investor domestik," ujar dia.

*Associate Director of Research and Investment* Pilarmas Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, total penawaran yang masuk pada pelelangan surat berharga syariah negara berkisar Rp 30-50 triliun. Dari seri tersebut, investor dinilai akan cenderung memilih obligasi jangka pendek 1-10 tahun, seiring dengan tingginya volatilitas pasar obligasi dan situasi serta kondisi pasar yang terjadi saat ini.

"Oleh sebab itu, kami melihat obligasi jangka pendek akan diminati lebih banyak oleh investor, namun obligasi jangka panjang tetap akan memiliki tempat

dalam hati investor," ujar dia.

*Head of Economics Research* PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C Permana mengatakan, total penawaran yang masuk dari lelang surat berharga syariah negara tersebut sebesar Rp 20-25 triliun. Jumlah penawaran ini dinilai menyusut, dibandingkan lelang sebelumnya. "Investor akan memilih seri dengan jangka waktu 15 Oktober 2046, 15 Februari 2037 dan 15 Maret 2034," ujar dia.

Harga SUN pekan ini diproyeksikan turun dalam rentang imbal hasil untuk 10 tahun berada di 6,6-6,8%. Adapun sentimen yang akan mempengaruhi adalah kekhawatiran pasar terhadap *economic boom* di Tiongkok, mutasi virus di seluruh dunia, dan kenaikan imbal hasil AS akibat *sell of US Bond* (*treasury*). (bil)



Saham Lapis Dua

Investor memperhatikan pergerakan saham melalui monitor, kemarin. Kinerja saham berkapitalisasi pasar menengah dan kecil yang tergabung dalam indeks saham IDX SMC Composite dan IDX SMC Liquid, terpantau naik lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks LQ45 sejak awal tahun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 5 Maret 2021, indeks IDX SMC Composite naik 8,99% atau outperform dari IHSG yang tumbuh 4,68% secara year-to-date (ytd).



# 18 FINANCIAL DATA



## Stock Widget Pilihan Tepat Emiten Indonesia.

Gunakan Stock Widget untuk Menampilkan Informasi Harga Saham Perusahaan Anda di Website.

Desain Menarik, Warna Sesuai Identitas Perusahaan dan Bebas Memilih Informasi yang Ingin Ditampilkan.

Informasi lebih lanjut hubungi (021) 5151669 atau email: sales@limas.com



## PERDAGANGAN SAHAM BURSA EFEK INDONESIA

5 MARET 2021

KODE	NAMA SAHAM	HARGA SAHAM (Rp)		▲▼ (Rp)	VOL	NILAI (Rp)	KAPITALISASI PASAR	
		SBL	PNT					
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	33.600	34.000	400	22.374.300	766.671.142.500	829.887.636.600.000	
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4.760	4.770	10	64.715.600	306.970.844.000	582.475.918.563.500	
TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	3.360	3.320	-40	128.546.000	429.121.334.000	328.886.559.112.000	
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6.550	6.475	-75	43.619.500	284.070.962.500	299.144.999.987.050	
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	6.725	6.725	0	6.029.300	40.463.150.000	256.558.750.000.000	
ASII	Astra International Tbk.	5.575	5.500	-75	48.034.400	265.175.225.000	222.659.542.270.000	
TPJA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	9.725	9.425	-300	3.457.400	32.714.185.000	168.800.928.450.500	
HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	1.465	1.445	-20	52.472.100	76.152.168.500	168.079.621.120.500	
EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	2.150	2.170	20	22.165.700	48.268.431.000	122.473.874.321.400	
BNNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	6.000	6.000	0	24.103.600	144.461.902.500	110.773.019.358.000	
BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	2.680	2.630	-50	42.364.300	112.008.508.000	106.830.142.306.360	
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	6.300	6.350	50	13.936.800	88.557.155.000	104.127.300.000.000	
ARTO	Bank Jago Tbk.	9.200	9.500	300	13.454.000	130.742.980.000	102.103.031.250.000	
ICBP	Indofood CFP Sukses Makmur Tbk.	8.600	8.500	-100	12.683.100	108.097.745.000	99.126.218.000.000	
BRPT	Barito Pacific Tbk.	1.025	1.025	0	33.661.600	34.992.714.000	95.723.544.707.625	
UNTR	United Tractors Tbk.	22.350	21.800	-550	7.691.800	168.423.947.500	81.316.945.964.800	
SMMA	Sinarmas Multiartha Tbk.	12.200	12.500	300	10.000	1.250.000	79.595.808.962.500	
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.555	1.555	0	35.614.600	55.309.133.500	72.890.814.881.050	
MEGA	Bank Mega Tbk.	10.025	10.300	275	58.000	571.082.500	71.009.623.738.100	
GGRM	Gudang Garam Tbk.	36.900	36.600	-300	1.323.200	48.516.252.500	70.421.620.800.000	
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	11.200	11.200	0	11.157.100	127.462.922.500	66.433.024.000.000	
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	12.650	12.100	-550	12.029.200	147.861.277.500	66.198.893.586.100	
BNLI	Bank Permata Tbk.	2.280	2.260	-20	323.200	735.818.000	62.742.824.697.380	
MYOR	Mayora Indah Tbk.	2.770	2.730	-40	10.211.500	27.597.298.000	61.039.250.249.250	
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.	1.210	1.175	-35	99.016.300	116.515.327.500	59.942.184.375.000	
MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	2.620	2.600	-20	47.970.300	123.156.532.000	59.552.612.119.000	
ANTM	Aneka Tambang Tbk.	2.520	2.420	-100	745.024.700	1.808.725.036.000	58.154.450.634.500	
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	6.200	6.125	-75	10.281.700	63.287.507.500	53.780.112.312.500	
INCO	Vale Indonesia Tbk.	5.525	5.150	-375	101.200.300	526.816.647.500	51.172.144.408.000	
MAYO	Bank Mayapada Internasional Tbk.	6.700	7.400	700	194.800	1.421.457.500	50.054.240.788.200	
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	13.400	13.275	-125	2.209.700	29.214.032.500	48.868.350.840.225	
DNET	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	3.260	3.330	70	4.900	16.248.000	47.232.720.000.000	
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.	2.140	2.070	-70	26.490.800	54.760.727.000	46.899.988.851.150	
TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	8.925	8.850	-75	11.635.100	102.894.222.500	44.250.000.000.000	
BYAN	Bayan Resources Tbk.	13.975	13.000	-975	5.400	70.200.000	43.333.335.500.000	
POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk.	5.125	5.150	25	2.170.900	11.430.135.000	42.841.941.540.000	
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	13.700	13.050	-650	9.089.600	120.671.422.500	40.627.567.588.500	
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	905	950	45	2.041.600	1.867.885.000	39.448.276.615.000	
MIKA	Mitra Kelurga Karyasat Tbk.	2.790	2.720	-70	27.321.400	75.014.308.000	38.750.070.640.000	
ADRO	Adaro Energy Tbk.	1.220	1.180	-40	157.251.500	187.816.309.000	37.743.435.160.000	
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	1.425	1.400	-25	100.872.900	142.140.956.000	33.938.111.474.400	
BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	4.456	4.436	-20	123.860.700	55.310.376.400	32.855.841.185.196	
PTBA	Bukit Asam Tbk.	2.710	2.710	0	19.286.700	51.996.449.000	31.220.986.567.500	
ISAT	Indosat Tbk.	5.750	5.625	-125	4.176.900	23.472.915.000	30.565.875.937.500	
BDMM	Bank Danamon Indonesia Tbk.	3.180	3.130	-50	986.000	3.106.167.000	30.285.308.277.330	
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.070	4.050	-20	4.021.700	16.283.601.000	29.394.378.360.000	
DCII	DCI Indonesia Tbk.	12.225	12.225	0	0	0	29.141.293.627.500	
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	3.920	3.650	-270	12.416.100	46.099.504.000	27.837.319.950.000	
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	1.125	1.095	-30	30.093.000	33.314.419.000	27.243.918.398.625	
PNON	Pakuwon Jati Tbk.	580	565	-15	38.363.400	21.752.853.500	27.210.175.356.000	
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.570	1.565	-5	47.689.400	75.036.591.500	26.839.750.000.000	
PMBN	Bank Pan Indonesia Tbk.	1.155	1.120	-35	6.124.900	6.892.869.500	26.698.163.517.760	
SCMA	Surya Citra Media Tbk.	1.855	1.805	-50	11.353.800	20.731.958.500	26.676.259.798.305	
MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.	27.400	27.375	-25	200	5.472.500	25.956.810.750.000	
AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agri Tbk.	1.260	1.215	-45	139.601.000	172.944.192.500	25.672.776.653.520	
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	1.235	1.205	-30	26.412.400	31.794.446.000	25.511.495.803.460	
SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	800	790	-10	11.457.500	9.050.165.500	23.700.000.000.000	
BTPN	Bank BTPN Tbk.	2.940	2.920	-20	27.600	80.138.000	23.552.879.026.120	
EXCL	XI Aviata Tbk.	2.220	2.190	-30	20.833.400	45.808.211.000	23.446.167.440.700	
FREN	Smartfren Telecom Tbk.	89	87	-2	1.455.353.600	127.419.504.000	22.903.841.067.870	
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2.130	2.110	-20	38.309.000	81.550.263.000	22.121.451.000.000	
CASA	Capital Financial Indonesia Tbk.	390	390	0	12.900	5.031.000	21.245.738.901.270	
CTRA	Ciptura Development Tbk.	1.160	1.130	-30	41.568.100	47.359.987.500	20.973.142.838.610	
AAAI	Astra Agro Lestari Tbk.	10.950	10.850	-100	1.541.800	16.692.545.000	20.882.868.413.050	
NISP	Bank OCB NiSP Tbk.	900	895	-5	3.626.000	3.275.460.000	20.300.619.548.640	
JPPA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	1.565	1.645	80	72.828.200	118.869.584.000	19.290.216.205.645	
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	9.125	9.100	-25	25.900	234.245.000	19.173.700.000.000	
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	1.430	1.405	-25	100.836.800	142.070.485.000	19.071.401.155.000	
FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	7.600	7.600	0	0	0	18.831.954.781.200	
BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	590	570	-20	135.625.100	78.063.174.000	18.530.770.948.470	
KAFF	Kimia Farma Tbk.	3.320	3.260	-60	3.394.100	11.065.264.000	18.106.039.996.740	
ULJY	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.	1.530	1.525	-5	758.100	1.153.666.000	17.619.130.200.000	
BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	1.065	995	-70	32.042.800	35.830.342.500	17.177.874.050.870	
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	650	655	5	63.449.300	41.780.138.000	16.464.231.470.600	
MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	1.105	1.090	-15	22.180.000	24.211.186.500	16.404.268.603.900	
WKAJ	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.745	1.725	-20	18.190.000	31.536.427.000	15.473.166.116.700	
BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	1.585	1.575	-10	71.110.500	11.124.485.000	15.118.942.000.050	
GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2.550	2.550	0	0	0	15.000.000.150.000	
LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	202	202	0	50.374.500	10.130.583.900	14.321.399.710.538	
SRGT	Saratoga Investama Sedaya Tbk.	5.450	5.275	-175	672.200	3.561.127.500	14.310.900.925.000	
HRUM	Harum Energy Tbk.	5.650	5.275	-375	28.817.800	154.661.275.000	14.261.595.500.000	
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	830	850	20	38.409.400	32.744.307.000	14.110.000.000.000	
TINS	Timah Tbk.	1.890	1.890	0	207.815.500	392.431.040.500	14.076.254.028.060	
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	3.380	3.400	20	30.435.300	103.639.948.000	13.649.962.728.000	
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	11.900	11.675	-225	2.568.600	30.226.335.000	13.191.874.375.000	
SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	1.715	1.715	0	71.000	121.783.500	13.141.873.500.000	
KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.	635	650	15	65.176.000	41.623.837.500	12.575.157.985.000	
SMRA	Summarecon Agung Tbk.	895	870	-25	23.134.700	20.249.575.500	12.551.300.061.600	
MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	1.360	1.360	0	0	0	12.488.807.845.200	
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	860	835	-25	55.318.900	46.645.958.500	12.412.561.489.335	
HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.	4.160	4.100	-60	2.080.000	8.544.300.000	12.209.800.687.500	
CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.	2.890	2.950	60	400	1.162.000	11.683.065.687.500	
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	1.560	1.575	15	817.900	1.290.588.500	11.622.838.958.325	
IPTV	MNC Vision Networks Tbk.	284	278	-6	31.436.100	8.849.878.600	11.540.904.965.642	
RMBA	Bentol International Investama Tbk.	314	316	2	47.000	14.847.600	11.502.759.055.000	
DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	234	236	2	81.200	19.141.359.600	11.374.574.219.600	
POWR	Cikarang Listrindo Tbk.	705	700	-5	9.525.600	6.681.878.000	11.261.009.200.000	
TRIO	Trikomel Oke Tbk.	426	426	0	0	0	11.079.192.718.770	
IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	8.750	8.200	-550	100	820.000	11.077.420.401.400	
SMAR	Smart Tbk.	3.890	3.830	-60	2.600	9.919.000	11.000.500.591.780	
KPIG	MNC Land Tbk.	135	135	0	71.268.900	9.589.936.500	10.884.473.099.640	
BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	680	665	-15	36.163.000	24.032.684.500	10.618.131.887.300	
CARE	Metro Healthcare Indonesia Tbk.	334	318	-16	142.677.700	46.064.877.800	10.573.500.000.000	



# REKSA DANA INVESTOR DAILY

5 MARET 2021

REKSA DANA		REKSA DANA		REKSA DANA		REKSA DANA								
NAMA REKSDANA	NILAI AKTIVA BERSIH	30 HARI TERAKHIR	1 TAHUN TERAKHIR	RIL. 1 TAHUN	NAMA REKSDANA	NILAI AKTIVA BERSIH	30 HARI TERAKHIR	1 TAHUN TERAKHIR	RIL. 1 TAHUN	NAMA REKSDANA	NILAI AKTIVA BERSIH	30 HARI TERAKHIR	1 TAHUN TERAKHIR	RIL. 1 TAHUN
<b>PENDAPATAN TETAP</b>					<b>Millennium Equity Growth Fund</b>	342.3087	-0.14	11.87	11.87	<b>REKSA DANA IJSA CAPITAL CAMPURAN DINAMIS</b>	692.4494	20.36	4.98	4.98
Batavia Dana Obligasi Cemerlang	1.417.90	-2.44	5.68	5.68	Millennium Equity Prima Plus	151.7241	0.01	0.05	0.05	<b>REKSA DANA IJSA CAPITAL CAMPURAN HARMONIS</b>	765.297	-2.36	13.73	-13.73
Batavia Dana Obligasi Unggulan	1.339.44	-0.29	7.01	7.01	Minna Padli Indragraha Saham Syariah	958.2442	-3.90	-27.61	-27.61	<b>REKSA DANA KRESNA FLEXIMA</b>	3.011.5888	-2.36	1.37	6.28
BATAVIA OBLIGASI UTAMA	1.425.52	-0.01	5.96	5.96	Minna Padli Pringgodana Saham (25-Nov-19)	942.3156	15.20	14.78	14.78	<b>REKSA DANA MAJORS USD BALANCE INDONESIA</b>	1.097.98	1.39	3.44	1.40
BATAVIA PENDAPATAN TETAP STABIL (20/21T)	1.192.49	-0.01	6.01	6.01	Minna Padli Sakti (08-Januari-2021)	609.3433	1.48	0.98	0.98	<b>REKSA DANA MAM BALANCED FUND</b>	1.034.4096	-0.93	3.10	4.10
Batavia Pesona Obligasi	987.37	-1.75	1.10	10.52	Millennium Equity Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI BALANCED PROGRESSIVE FUND</b>	1.878.3600	-1.48	5.20	3.87
BNI-AM DANAH PENDAPATAN TETAP SYARIAH	1.399.40	-0.19	8.20	8.20	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
BNI-AM DANAH PENDAPATAN TETAP NIRWASTA	1.399.40	-0.19	8.20	8.20	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Corpus Bond Plus	1.791.04	-0.19	6.95	6.95	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
HSBC Government Bond	1.791.04	-0.19	6.95	6.95	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Insight Government Fund	1.791.04	-0.19	6.95	6.95	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Insight Scholarship Fund	1.791.04	-0.19	6.95	6.95	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Majors Obligasi Utama Indonesia	1.248.51	-1.40	0.86	0.86	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Mega Asset Mantap Plus	1.730.47	-2.05	-1.83	-1.83	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Mega Dana Pendapatan Tetap Syariah	1.100.19	1.81	12.17	12.17	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Mega Dana Rido Teta	1.263.76	-1.77	6.69	6.69	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Mega Dana Stail	1.122.47	-1.67	16.07	16.07	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
Parin Dana Obligasi Bersama	1.057.21	-0.62	-0.66	-0.66	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
PE REKSA DANA PANIN GEBYAR INDONESIA II	2.291.84	-0.09	8.04	8.04	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
PMN Amanah Syariah	3.623.16	-1.09	2.42	0.39	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
PMN Dana Segelintir I	3.623.16	-1.09	2.42	0.39	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA ARCHITECT INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2	1.095.85	-0.80	5.72	5.72	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA ARCHITECT OBLIGASI DOLLAR	1.746.06	-3.24	-0.79	-3.81	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA ARCHITECT OBLIGASI NASUTARAH	1.746.06	-3.24	-0.79	-3.81	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48	5.20	3.87
REKSA DANA Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.529.7400	-4.53	3.95	2.41	PMN Saham Syariah	1.163.26	-4.46	0.04	-3.84	<b>REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIBANG</b>	1.326.1200	-1.48		



# 28 REKANSIAL DAN REKSA DANA

NAMA REKSA DANA	NILAI AKTIVA BERSIH	30 HARI TERAKHIR	1 TAHUN TERAKHIR	RILL 1 TAHUN
Batavia Proteksi Utama 29	1.023.960	0,42	6,40	6,40
Batavia Proteksi Utama 3	1.013.549	-16,63	0,38	0,38
Batavia Proteksi Utama 8	1.040.220	0,38	6,59	6,59
Batavia Proteksi Utama 9	1.024.901	0,88	0,88	0,88
BN-AM PROTEKSI AGATHIS	1.059.190	0,98	7,04	7,04
BN-AM PROTEKSI ALBERTA	1.033.360	0,31	5,77	5,77
BN-AM PROTEKSI KANGARA	1.022.200	0,43	5,62	5,62
BN-AM PROTEKSI KANGARA	1.059.850	0,00	0,00	0,00
BN-AM PROTEKSI RAJATA	1.034.270	0,56	7,27	7,27
BN-AM PROTEKSI RAJAWA	1.045.080	0,47	5,91	5,91
BN-AM PROTEKSI SHOHAN	1.015.800	0,46	6,02	6,02
BN-AM Proteksi Syariah LXX	1.023.520	0,46	6,02	6,02
BN-AM PROTEKSI ULTIMA	1.023.520	0,46	6,02	6,02
BN-AM PROTEKSI XLVIII	1.025.250	0,42	5,57	5,57
BNP Paribas Selaras V	1.012.348	0,45	0,22	0,22
BNP Paribas Selaras VI	1.010.116	0,45	0,00	0,00
Insight Proteksi 2	950.908	0,42	-0,62	-0,62
Insight Proteksi 3	950.908	0,42	-0,62	-0,62
Kresna Proteksi Cemerlang Seri 2	1.025.710	0,28	-1,20	-1,20
Kresna Proteksi Cemerlang Seri 3	1.012.975	-1,16	-2,28	-2,28
Kresna Proteksi Cemerlang Seri 4	1.019.987	0,57	-0,01	-0,01
Mandiri Protected Growth Dollar (USD)	1.023,6	-0,06	1,31	-0,72
Mandiri Protected Growth Dollar 2 (USD)	1.032,6	-0,06	-0,48	-0,72
Mandiri Protected Growth Dollar 3 (USD)	1.032,6	-0,06	-0,48	-0,72
Mandiri Seri 144	1.078.220	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 145	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 146	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 147	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 148	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 149	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 150	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 151	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 152	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 153	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 154	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 155	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 156	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 157	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 158	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 159	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 160	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 161	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 162	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 163	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 164	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 165	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 166	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 167	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 168	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 169	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 170	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 171	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 172	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 173	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 174	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 175	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 176	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 177	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 178	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 179	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 180	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 181	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 182	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 183	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 184	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 185	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 186	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 187	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 188	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 189	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 190	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 191	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 192	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 193	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 194	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 195	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 196	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 197	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 198	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 199	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 200	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 201	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 202	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 203	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 204	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 205	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 206	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 207	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 208	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 209	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 210	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 211	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 212	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 213	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 214	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 215	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 216	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 217	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 218	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 219	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 220	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 221	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 222	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 223	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 224	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 225	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 226	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 227	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 228	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 229	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 230	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 231	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 232	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 233	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 234	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 235	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 236	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 237	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 238	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 239	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 240	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 241	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 242	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 243	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 244	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 245	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 246	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 247	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 248	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 249	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 250	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 251	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 252	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 253	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 254	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 255	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 256	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 257	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 258	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 259	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 260	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 261	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 262	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 263	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 264	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 265	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 266	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 267	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 268	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 269	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 270	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 271	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 272	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 273	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 274	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 275	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 276	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 277	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 278	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 279	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 280	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 281	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 282	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 283	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 284	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 285	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 286	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 287	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 288	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 289	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 290	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 291	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 292	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 293	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 294	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 295	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 296	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 297	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 298	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 299	1.065.760	-0,11	7,15	7,15
Mandiri Seri 300	1.065.760	-0,11	7,15	7,15

NAMA REKSA DANA	NILAI AKTIVA BERSIH	30 HARI TERAKHIR	1 TAHUN TERAKHIR	RILL 1 TAHUN
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 133	1.015.420	0,49	4,74	4,74
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 135	1.016.263	0,50	4,60	4,60
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 139	1.017.992	0,56	0,55	0,55
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 142	1.018.400	0,51	0,55	0,55
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 143	1.013.500	0,51	6,16	6,16
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 148	1.019.370	0,57	4,14	4,14
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 151	1.018.805	0,51	5,35	5,35
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 152	1.019.370	0,57	4,14	4,14
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 154	1.016.261	-0,18	5,01	5,01
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 157	1.015.949	0,53	4,39	4,39
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 158	1.016.261	-0,18	5,01	5,01
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 160	1.021.100	0,53	6,39	6,39
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 162	1.023.460	0,41	6,17	6,17
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 172	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 173	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 177	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 178	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 180	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 181	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 182	1.023.230	0,39	5,13	5,13
REKSA DANA TERPROTEKSI MAND				



21 FINANCIAL DATA

INVESTOR DAILY

INDONESIA GOVERNMENT BOND CURVE

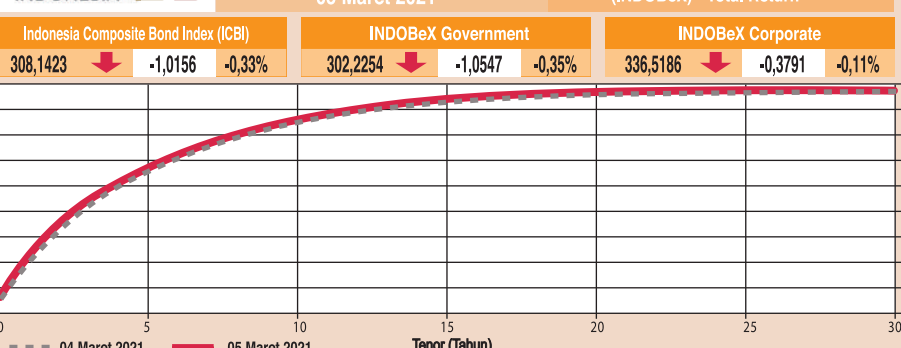
5 MARET 2021



PENILAI HARGA EFEK INDONESIA (PHEI) INDONESIA GOVERNMENT BOND YIELD CURVE & INDONESIA BOND INDEXES

05 Maret 2021

(INDOBEx) - Total Return



Obligasi Negara Ritel & Sukuk Negara Ritel

Table with columns: Nama Obligasi, Seri, Kupon, Jatuh Tempo, TTM, Fair Price (%), Change (bps), MTY(%), and Change.

SAHAM PENCETAK GAIN TERBESAR

1-5 MARET 2021

Table with columns: KODE, NAMA, 1 MAR, 5 MAR, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

SAHAM PENCETAK LOSS TERBESAR

1-5 MARET 2021

Table with columns: KODE, NAMA, 1 MAR, 5 MAR, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

VOLUME SAHAM TERBESAR

1-5 MARET 2021

Table with columns: KODE, NAMA, 1 MAR, 5 MAR, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

NILAI TRANSAKSI TERBESAR

1-5 MARET 2021

Table with columns: KODE, NAMA, 1 MAR, 5 MAR, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

KURS TRANSAKSI BI

5 MARET 2021

Table with columns: MATA, NILAI, KURS JUAL, KURS BELI, 4 MAR 2021, 5 MAR 2021.

SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS

1 OKT 2020-29 JAN 2021

Table with columns: BANK UMUM, RUPIAH, US\$, 6.00%, 1.75%, BPR, RUPIAH, 8.50%.

SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA

5 MARET 2021

Table with columns: NAMA BANK, 1 Bulan (Rp/US\$), 3 Bulan (Rp/US\$), 6 Bulan (Rp/US\$), 1 Th (Rp/US\$).

DAFTAR SAHAM PEFINDO25

5 MARET 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SEBELUM, PENUTUPAN, VOLUME, NILAI.

JAKARTA-BBI

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 5 Maret 2021:

Table with columns: KOMODITAS, BULAN, HARGA JENKASIAN, PERUBAHAN, VOLUME.

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 4 Maret 2021:

Table with columns: Komoditas, Bulan, Harga, Perubahan, Volume.

SAHAM TERAKTIF

1-5 MARET 2021

Table with columns: KODE, NAMA, 1 MAR, 5 MAR, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

LAP. TRANSAKSI OBLIGASI KE BEI

5 MARET 2021

Transaksi Obligasi Korporasi

Table with columns: NAMA OBLIGASI, TANGGAL PEL, TANGGAL PENY, TANGGAL TRANS, TMT, TMT BIP, HARGA BID, HARGA IO, VOL (ML Rp), YIELD, KUPON, RAT.

Transaksi Obligasi Pemerintah

Table with columns: NAMA OBLIGASI, TANGGAL PEL, TANGGAL PENY, TANGGAL TRANS, TMT, TMT BIP, HARGA BID, HARGA IO, VOL (ML Rp), YIELD, KUPON, RAT.

Resume Laporan Perdagangan

Table with columns: SERI, TIPE TRANS, JATUH TEMPO, TMT BIODIR, TERTINGGI BIODIR, TERENDAH BIODIR, PENUTUPAN (ML Rp), FREK, VOLUME, TOTAL.

PRODUK INSURANCE LINKED (Harga per Unit) 5 MARET 2021

Large table listing various insurance products from PT AIA Financial, PT Prudential Life Assurance, PT Sun Life Insurance, PT Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwana, PT Chubb Life Insurance, PT Sun Life Insurance, PT Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwana, PT Chubb Life Insurance, PT Sun Life Insurance, PT Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwana, PT Chubb Life Insurance.



Beritasatu Photo/Uthan AR



**Rekening Simpanan**

Petugas melayani nasabah bank di Jakarta, belum lama ini. LPS mencatat jumlah rekening simpanan pada bulan Januari 2021 ini masih mengalami kenaikan 16,4 persen menjadi 352.728.934 rekening, dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

# Disidik Kasus Suap Pajak, Bank Panin Hormati Proses Hukum

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap yang melibatkan dua oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam proses penyidikan tersebut, Bank Panin akan menghormati proses yang dijalankan.

Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo mengungkapkan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum tersebut. Pihaknya juga menekankan tidak bermaksud untuk mendahului proses hukum yang sedang berjalan.

“Jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak perusahaan kami, maka kami menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku,” terang Herwidayatmo kepada *Investor Daily*, Jumat (5/3).

Dia mengatakan, setiap pemeriksaan pajak, perseroan selalu memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku. “Bahwa selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016, kami ikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang benar. Kami selama ini adalah Wajib Pajak yang taat dan mengikuti seluruh aturan perpajakan,” tegas dia.

Pihaknya juga menjelaskan, dalam hal pemeriksaan pajak, Bank Panin didampingi oleh lembaga terpercaya dan memiliki kemampuan di bidang terkait. “Bahwa selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, kami juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel,” sambung dia.

Merujuk Surat Perintah Penyidikan

(Sprindik) yang dikeluarkan KPK bahwa dua oknum pejabat DJP menerima hadiah atau janji dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan, salah satunya kuasa wajib pajak Bank Panin yaitu berinisial VL. Menanggapi hal tersebut, Herwidayatmo tidak membenarkannya.

“Bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari kami, terkait urusan pajak tahun 2016. Kami sebagai perusahaan terbuka, memiliki tanggung jawab kepada seluruh stakeholder untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* yang baik,” jelas Herwidayatmo.

Sementara itu, KPK telah mengeluarkan Sprindik mengenai dugaan kasus suap pajak yang ditengarai melibatkan oknum pegawai DJP Kemenkeu. Sprindik bernomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 yang diteken Ketua KPK Firlil Bahuri itu menyebutkan, KPK telah menetapkan dua tersangka, masing-masing berinisial APA dan DR yang merupakan oknum pejabat DJP Kemenkeu.

Berdasarkan Sprindik tersebut, KPK menduga APA dan DR menerima suap dari konsultan dan kuasa wajib pajak (WP) berinisial RAR, AIM, AS, dan VL. RAR dan AIM adalah konsultan pajak atas pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT GMP untuk



Herwidayatmo

tahun pajak 2016.

Adapun AS, menurut KPK, adalah konsultan pajak yang terkait dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Sedangkan VL merupakan kuasa wajib pajak sehubungan dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan terbuka berinisial PT BPI untuk tahun pajak 2016.

**Kinerja Bank Panin**

Menurut data RTI, kapitalisasi pasar Bank Panin (PNBN) pada penutupan perdagangan Jumat (5/3) sebesar Rp 26,97 triliun, dengan harga saham Rp 1.120 per lembar atau turun 3,03%.

Bank Panin hingga kuartal III-2020 mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 2,34 triliun, menurun 6,77% secara tahunan (*year on year/yooy*). Penurunan disebabkan meningkatnya biaya pencadangan mencapai 96,79% (*yooy*) menjadi Rp 1,78 triliun untuk memitigasi dampak Covid-19.

Sebelumnya, Herwidayatmo mengatakan, meskipun secara konsolidasi laba bersih mengalami penurunan akibat pencadangan yang meningkat, secara individual bank (*bank only*) sampai dengan kuartal III-2020 perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 2,33 triliun atau meningkat 5,2% (*yooy*).

Secara konsolidasi, laba operasional sebelum pencadangan tumbuh 12,1% (*yooy*) menjadi Rp 4,76 triliun. Peningkatan pendapatan operasional sebelum pencadangan terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan *fee based income* yang mencapai Rp 2,26 triliun atau naik 79,2% (*yooy*). Hal ini sejalan dengan meningkatnya transaksi surat-surat berharga di tengah kecenderungan penurunan suku bunga pasar.

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi dampak Covid-19, sampai dengan kuartal III-2020 perseroan telah mengalokasikan biaya pencadangan signifikan sebesar Rp 1,78 triliun, meningkat 96,9% (*yooy*).

Total aset konsolidasi mencapai Rp 216,59 triliun, naik dari tahun 2019 sebesar Rp 212,67 triliun. Total kredit yang disalurkan sebesar Rp 133,93 triliun, mengalami penurunan 12,9% terutama disebabkan oleh perlambatan permintaan kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan perseroan untuk menjaga kualitas kredit.

Sementara itu, posisi likuiditas juga terjaga dengan baik dibuktikan dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7,0% (*yooy*) mencapai Rp 146,44 triliun. Pertumbuhan tabungan 14,3% dan giro sebesar 10,8% (*yooy*) yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK, menunjukkan bahwa perseroan terus mendorong peningkatan CASA. Rasio likuiditas *loan to deposit ratio* (LDR) berada pada posisi optimum sebesar 84,2% pada September 2020.

Dari sisi permodalan, *capital adequacy ratio* (CAR) juga terjaga dengan kuat pada posisi September 2020 sebesar 27,3%, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2019 yaitu 23,3%. Rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL gross* sedikit meningkat ke level 3,05% dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 2,99%, sedangkan *NPL net* turun signifikan ke level 0,58 dibandingkan posisi September 2019 sebesar 0,81%.

# BRI Agro Salurkan Kredit Ultramikro Lewat Fintech Modal Rakyat

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Agri Agri Tbk (BRI Agro) dan perusahaan *fintech lending* PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat), tengah menjajaki peluang baru dalam kolaborasi bisnis untuk membangun ekosistem *digital financial* dalam rangka mendukung akses permodalan untuk usaha mikro kecil (UMK). Hal tersebut selaras dengan komitmen yang diresmikan dalam MoU pada Desember 2020.

Sebagai wujud komitmen tersebut, BRI Agro merealisasikan kerja sama dengan menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Melalui Modal Rakyat sebagai *fintech peer to peer (P2P) lending*, BRI Agro menyalurkan pembiayaan bagi agen pulsa. Pola kerja sama pembiayaan bagi agen pulsa melibatkan Payfazz yang merupakan salah satu mitra strategis Modal Rakyat yang bergerak di bidang ekosistem *payment point online bank (PPOB)*.

“Penyaluran Modal Rakyat 90% porsinya merupakan kredit produktif untuk segmen bisnis usaha menengah, kecil, hingga mikro. Untuk segmen mikro, Modal Rakyat menyalurkan pembiayaan bagi agen pulsa yang berada pada ekosistem Payfazz,” jelas Direktur Utama BRI Agro Ebeneser Girsang dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily*, Minggu (7/3).

Menurut dia, kolaborasi antara bank dan *fintech* berupa dukungan pembiayaan dari BRI Agro untuk agen pulsa melalui Modal Rakyat bertujuan untuk memperluas cakupan pembiayaan Modal Rakyat. “Kami berharap penyaluran ini dapat meningkatkan kapasitas para agen pulsa, baik dari sisi transaksi, layanan, hingga peningkatan kualitas bisnis. Saat ini dukungan *fintech lending* dan perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, khususnya pada masyarakat yang



Ebeneser Girsang

masih unbanked,” ungkap CEO Modal Rakyat Hendoko.

Penggunaan kredit adalah untuk menambah modal usaha sehingga bisnis para agen pulsa dapat berkembang lebih besar lagi. Mitigasi risiko dalam seleksi calon peminjam dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, memastikan agen telah lolos verifikasi akun di aplikasi Payfazz; validasi data pengajuan; menganalisis kualitas transaksi agen dalam aplikasi; verifikasi agen calon peminjam melalui *video call*; hingga analisis riwayat pinjaman yang pernah diajukan di Modal Rakyat.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan kepada agen mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta dengan periode 7-14 hari kalender. “Adapun agen yang dapat menerima pembiayaan melalui Modal Rakyat harus sudah terdaftar sebagai Agen Payfazz,” tambah Hendoko.

BRI Agro telah menyalurkan pinjaman ke UMK melalui Platform Modal Rakyat sekitar Rp 10 miliar pada posisi Desember 2020. Dengan pembiayaan kepada Agen Payfazz ini BRI Agro menasar segmen ultra mikro dengan pinjaman Rp 1-5 juta per Agen Payfazz. (ris)

# BSI Sasar Penyaluran Pembiayaan Perumahan Rp 38 Triliun

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah dengan target penyaluran Rp 38 triliun pada tahun ini. Salah satunya melalui program pembiayaan BSI Griya Hasanah yang menggunakan akad syariah dengan margin khusus dan jangka waktu pembiayaan hingga 30 tahun.

Program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, baik tapak maupun susun atau ini melakukan *takeover* KPR ini berlaku mulai Maret 2021. Program ini merupakan salah satu komitmen BSI untuk turut membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi menjelaskan, program ini diharapkan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin membeli rumah sesuai prinsip syariah dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mewujudkan hunian impian dengan berbagai kemudahan dan penawaran terbaik,” terang Hery dalam keterangan tertulis, Minggu (7/3).

Promo BSI Griya dengan margin spesial yang setara dengan 3,3% (*effective per annum*) pada 1 tahun



Hery Gunardi

pertama, selanjutnya 10% (*effective per annum*) sampai akhir pembiayaan ini dapat diakses masyarakat di seluruh kantor BSI. Masyarakat pun dapat memilih metode angsuran berjenjang dan tetap. Selain itu, masyarakat dibebaskan dari biaya admin, *appraisal*, dan provisi.

Melalui berbagai program pembiayaan perumahan, di tengah kondisi pandemi BSI memiliki keinginan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan dengan target lebih dari Rp 38 triliun hingga akhir tahun 2021. Pembiayaan perumahan merupakan salah satu fokus BSI. Sebanyak dari 3.000 lebih proyek pengembang perumahan telah bekerja sama dengan BSI. (nid)



**Bank BTN Bantu Korban Banjir**

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo Wibowo memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Kudus, Jawa Tengah, baru-baru ini. Banjir yang diakibatkan oleh meluapnya debit air sungai Jati Wetan yang menghancurkan Kabupaten Demak dan Kudus itu setidaknya telah merendam rumah warga di 7 RT Dukuh Tanggul Angin yang berada di sekitar pondok pesantren tersebut. Bank BTN memberikan bantuan CSR senilai Rp200 juta dalam bentuk pompa air, tempat sampah dan paket sembako yang berisi kebutuhan bahan pokok makanan sehari-hari yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak di daerah tersebut.

# Simpanan Turun 1,45%, LPS Nilai Kegiatan Usaha Mulai Berjalan

JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah nominal simpanan masyarakat per Januari 2021 mencapai Rp 6.639 triliun, jika dibandingkan dengan Desember 2020 mengalami penurunan 1,45% *month to month* (mtm) dari Rp 6.737 triliun. Hal tersebut mengindikasikan aktivitas usaha mulai membaik dan berjalan.

Meski secara bulanan mengalami pertumbuhan negatif, namun jika dilihat berdasarkan tahunan (*year on year/yooy*), simpanan masyarakat per Januari 2021 tumbuh 10% di perbankan.

Menurut Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih, pada awal 2021, simpanan di perbankan cenderung mulai menurun jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2020.

“Berdasarkan data historis yang kami miliki, penurunan tersebut merupakan siklus bu-

lanan yang umum terjadi pada awal tahun. Sebab, awal tahun terutama kuartal pertama nasabah cenderung melakukan penarikan terutama pada nasabah segmen perusahaan untuk keperluan bisnisnya,” jelas Lana, akhir pekan lalu.

Lana juga mengungkapkan, adanya penarikan simpanan dari perusahaan menunjukkan aktivitas ekonomi mulai meningkat yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan kredit dan bisa berkontribusi pada perekonomian nasional. “Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi mulai menunjukkan aktivitas yang membaik khususnya pada kegiatan usaha,” ungkap Lana.

Berdasarkan jenis, dari total simpanan pada Januari 2021 sebesar Rp 6.639 triliun, proporsi terbesar adalah deposito (41,4%) atau senilai Rp

2.749 triliun tumbuh 6,3% (*yooy*), tabungan (32,0%) senilai Rp 2.125 triliun naik 12,1% (*yooy*). Untuk giro (25,5%) dengan nilai Rp 1.696 triliun tumbuh paling besar mencapai 16,5% (*yooy*).

Sementara itu, porsi *deposit on call* (1%) dengan nilai Rp 63 triliun mengalami kontraksi 20,1% (*yooy*). Sertifikat deposito (0,1%) dengan nilai Rp 5 triliun, sertifikat deposito menjadi jenis simpanan yang turun signifikan yakni -71,2% (*yooy*).

LPS juga mencatat jumlah rekening simpanan pada Januari 2021 menjadi 352.728.934 rekening, naik 16,4% dibandingkan dengan Januari 2020 sebanyak 303,13 juta rekening. Peningkatan jumlah rekening juga terlihat bila dibandingkan dengan jumlah rekening pada Desember 2020. Jumlah rekening simpanan masyarakat bertambah sebanyak 2.403.984 rekening. (nid)

**astragraphia**  
MEMBER OF ASTRA

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ASTRA GRAPHIA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (“Rapat”) akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 14 April 2021  
Waktu : 14:00 – 15:30 WIB  
Tempat : Catur Dharmas Hall, Menara Astra Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6  
Jakarta 10220

Mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), pengumuman Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, 23 Maret 2021 dalam sedikitya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek Indonesia; situs web penyedia e-KSEI yakni KSEI (eASY KSEI) dan situs web Perseroan ([www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 22 Maret 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. diajukan oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitya 1/20 (satu per dua puluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggunakan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat.
2. Usulan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu Selasa, tanggal 16 Maret 2021, selambatnya pukul 16:00 WIB.
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan ikhtilaf baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan menginformasikan keputahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta pertimbangan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 8 Maret 2021  
Direksi Perseroan



Investor Daily/David Gita Riza



### Premi Asuransi Jiwa

Nasabah berada di kantor AXA Mandiri, Jakarta, belum lama ini. Industri asuransi jiwa membukukan pendapatan premi mencapai Rp 19,09 triliun atau melesat 25,12% secara year on year (yoy) per Januari 2021, mampu melampaui rata-rata perolehan premi bulanan sepanjang 2020 di kisaran Rp 14-15 triliun. Pencapaian itu disebut sebagai indikator awal kinerja asuransi jiwa tumbuh lebih baik di tahun ini.

# Dorong Pertumbuhan, Perbankan Harus Salurkan Kredit Baru Rp 1.000 Triliun

Oleh Nida Sahara

► JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menilai, terdapat *gap* antara pendanaan dan penyaluran kredit perbankan secara nasional yang terlihat dari *loan to deposit ratio* (LDR) di kisaran 83% atau berada di bawah rentang ideal antara 84-94%. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan kredit, industri perbankan tahun ini harus mengucurkan kredit minimal Rp 1.000 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, sepanjang tahun lalu dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun industri perbankan mencapai Rp 6.665 triliun dengan penyaluran kredit sebesar Rp 5.550 triliun. Hal tersebut berdampak pada LDR yang rendah di level 83%.

"LDR optimal itu 90%, kalau menuju ke LDR 90%, bank harus salurkan kredit tahun ini Rp 1.000 triliun, ini yang harus disalurkan untuk menumbuhkan kredit dan dari kredit akan mendorong perekonomian," jelas Sunarso dalam webinar, pekan lalu.

Di BRI, lanjut dia, DPK tumbuh 9,8% secara tahunan (*year on year*) pada 2020, sedangkan kredit hanya naik 3,9% (*yoy*). Sunarso mencatat posisi LDR BRI berada di level 84%, artinya masih terdapat dana yang melimpah yang harus disalurkan menjadi kredit.

Meskipun saat ini industri perbankan kebanjiran likuiditas, tantangannya adalah menyalurkan kredit di saat tidak ada permintaan. "Masalahnya adalah bagaimana cara menumbuh-

kan kredit ini? Semua cara sudah dilakukan, BI menurunkan bunga, *cost of fund* juga sudah turun, minggu lalu saya umumkan BRI juga sudah turunkan bunga kredit 3,25%," papar Sunarso.

Dia mengungkapkan, penurunan bunga kredit bukan menjadi faktor satu-satunya dalam meningkatkan pertumbuhan kredit. Sebab, berdasarkan data yang dipaparkan Sunarso, sebelum tahun 2015 suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pernah mencapai 22%, tapi pertumbuhan kredit juga bisa naik *double digit*.

"Saat itu kredit *double digit*, pernah 22% sampai 25% paling tinggi. Tapi setelah 2015 bunga KUR diturunkan dari 22% ke 15%, bahkan disubsidi sehingga masyarakat hanya bayar 7%, tapi kredit tidak pernah *double digit*, pernah hanya sekali pada 2018," jelas dia.

Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa penurunan suku bunga kredit tidak serta merta mendorong pertumbuhan kredit. Adapun faktor yang paling elastis dalam peningkatan



Sunarso

kredit adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

"Suku bunga turun *iya*, tapi mendorong daya beli masyarakat juga faktor penting, maka rasanya dibutuhkan dan dilanjutkan proyek infrastruktur yang memberikan pekerjaan untuk masyarakat mendorong daya beli," ucap dia.

Dengan berjalannya proyek infrastruktur, banyak lapangan kerja khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut terdampak mendapatkan penghasilan. Pemerintah juga tetap memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai agar daya beli masyarakat meningkat. Dengan begitu, permintaan kredit baru akan terdorong naik.

Sunarso menyebut, ada berbagai rancangan termasuk insentif PPN-BM 0% yang diberikan pemerintah guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta kebijakan pendukung oleh Bank Indonesia (BI) yang meningkatkan rasio LTV hingga 100%

supaya orang berminat ambil kredit konsumtif.

### Kredit Macet UMKM

Di sisi lain, Sunarso juga masih meminta kepada pemerintah untuk melakukan *review* kembali terhadap kebijakan pemutihan kredit UMKM yang macet di tahun 1980-an. "Dan ada yang terakhir, bahwa segmen UMKM ini dari tahun 80-an Orde Baru itu diberikan kredit berbagai skema kredit, mulai dari kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, kredit usaha tani (KUT), dan seterusnya," tutur dia.

Sunarso menambahkan, dari skema kredit UMKM tersebut, ada kredit yang masuk kategori macet, namun perbankan khususnya bank pelat merah tidak berani untuk menghapus tagih hingga saat ini. Untuk itu, Sunarso meminta agar kebijakan tersebut ditinjau kembali.

"Itu sebenarnya di dalamnya ada yang macet, dan yang macet-macet itu karena yang berikan adalah bank milik negara maka sudah dihapus buku. Tapi bank tidak berani hapus tagih atau memutihkan, karena itu dianggap aset negara. Apabila kami hilangkan sama dengan menghilangkan aset negara, dan itu juga perlu *diview* apakah masih terus diberlakukan?," imbuh dia.

Pihaknya mengharapkan, agar kredit macet tersebut bisa dihapuskan, sehingga bank pelat merah tetap bisa melanjutkan bisnisnya dengan menyalurkan kredit untuk UMKM, guna mempercepat pemulihan ekonomi.

"Sehingga, tagihan kredit macet UMKM mestinya tidak sama dengan piutang negara, itu menyangkut dengan masalah perundang-undangan. Bauran yang diperlukan untuk mendorong kredit dalam rangka memulihkan ekonomi nasional," papar Sunarso.

## Januari, NPF *Multifinance* di Level 3,87%

JAKARTA – Upaya perusahaan pembiayaan (*multifinance*) untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) terus berlanjut pada awal 2021. Per Januari lalu, rasio kualitas pembiayaan itu konsisten menurun menjadi 3,87%.

Berdasarkan pada statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPF *multifinance* mulai bergerak naik pada Januari 2020 di level 2,56%. Posisi itu terus merambat naik hingga klimaksnya pada Juli 2020 sebesar 5,60%. Pandemi Covid-19 yang memukul ekonomi debitur *multifinance* menjadi faktor utama, karena kemampuan bayar angsuran para debitur terus menurun. Berlanjut pada Agustus 2020 dan seterusnya, lonjakan NPF baru berhasil dikendalikan. Faktornya adalah pelonggaran PSBB yang membuat *collection multifinance* mulai gencar dilakukan dan pembiayaan mulai kembali disalurkan. Meski belum kembali pulih sepenuhnya, *multifinance* mampu menutup tahun 2020 dengan NPF 4,01%. Upaya itu berlanjut pada Januari 2021 dengan NPF dijaga pada posisi 3,87%.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyampaikan, program restrukturisasi pembiayaan masih berjalan. Hal itu menjadi faktor utama NPF bisa menurun. Meski belum diketahui jumlah debitur yang tidak lagi memanfaatkan program itu, ke depan diharapkan para debitur sudah kembali menunjukkan kemampuan bayarnya ketika program berakhir.

"Yang saya dengar dari beberapa teman-teman perusahaan pembiayaan, 60-70% (restrukturisasi pembiayaan) bahkan ada yang lebih, sudah kembali membayar normal. Ini sudah bagus, tapi di masing-masing perusahaan *kan* berbeda. Ini akan menjadi suatu kesuksesan dari program restrukturisasi yang diberikan oleh OJK dalam rangka relaksasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19," ujar dia kepada *Investor Daily*, Minggu (7/3).

Namun demikian, kata Suwandi, potensi NPF meningkat di masa mendatang selalu terbuka untuk terjadi. Restrukturisasi pembiayaan di *multifinance* tercatat mencapai Rp



Suwandi Wiratno

193 triliun terhadap sekitar 5 juta kontrak. "Kita masih menunggu sampai ini selesai, ujungnya yang menjadi pertaruhan kita bersama adalah pada Maret 2022 saat program restrukturisasi selesai," ucap dia.

Suwandi mengatakan, faktor eksternal memang sangat berpengaruh untuk *multifinance* menekan NPF. Faktor yang dimaksud dapat seperti perusahaan-perusahaan yang diharapkan masih bisa menjalankan bisnisnya sehingga para karyawan tetap mendapatkan penghasilan dan tidak terkena pemutusan hubungan kerja. Karena hal itu dia meyakini, kualitas pembiayaan *multifinance* akan secara konsisten membaik.

Dia juga menuturkan, keberhasilan *multifinance* menekan NPF sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021 juga berkat *credit scoring* yang semakin mumpuni pada periode-periode sebelumnya. Terutama sejak Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) turut diperkenalkan pada *multifinance* pada April 2019. Sejak saat itu, industri jasa keuangan non-bank (IKNB) termasuk *multifinance* bisa melihat kualitas dari setiap debitur yang mengajukan pembiayaan.

"Kenapa NPF semakin baik? Perusahaan pembiayaan sekarang sudah semakin rapi dalam memilih debiturnya, karena sudah ada akses ke SLIK. SLIK itu *kan* data setiap orang yang mempunyai pinjaman ke industri keuangan. Dulu SLIK itu hanya data pinjaman di perbankan saja, sejak April 2019 SLIK itu bisa digunakan di IKNB," tutur dia. (pri)

## CIMB Niaga Sudah Pangkas 250 Bps Bunga Kredit Ritel

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk terus menurunkan suku bunga kredit, khususnya segmen ritel dalam rangka transmisi kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir perseroan telah memangkas suku bunga ritel mencapai 2,5% atau 250 basis poin (bps).

"Suku bunga kredit ritel saat ini sudah rendah dan dalam 1-2 tahun terakhir telah turun sekitar 250 bps. Jadi cukup kondusif," kata Direktur *Consumer Banking* Bank CIMB Niaga Lani Darmawan kepada *Investor Daily*, akhir pekan lalu.

BI sejak Juni 2019 hingga Februari 2021 telah menurunkan suku bunga acuan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (7DRRR) sebesar 225 bps ke level 3,5%, terendah sepanjang sejarah. Artinya, penurunan suku bunga kredit ritel CIMB Niaga juga sudah sejalan dengan kebijakan bank sentral. Namun, Lani menyebut penurunan bunga pada segmen ritel tidak termasuk kartu kredit. "*Across product* kecuali kartu kredit yang memang baku dan ada panduan," ujar Lani.

Lani menyampaikan bahwa perseroan telah memberikan program suku bunga rendah untuk menarik minat masyarakat, terutama dalam memiliki hunian, melalui kredit pe-

milian rumah (KPR). CIMB Niaga menawarkan suku bunga *fixed 1* tahun sebesar 3,66% dan *fixed 2* tahun dan tiga tahun 5,88% untuk produk KPR XTRA. Promo tersebut berlaku hingga 31 Maret 2021. "Kami sudah mulai dengan *online* dan webinar promo sejak tahun lalu," kata dia.

Lani menyebut pertumbuhan KPR per Januari 2021 masih positif 6% secara tahunan (*year on year/yoy*), dan kredit kendaraan bermotor (KKB) melalui anak perusahaan CNAF juga tumbuh dua digit yakni 11% (*yoy*).

Pihaknya juga menyambut baik atas kebijakan yang diberikan oleh regulator terkait rasio *loan to value* (LTV) untuk KPR dan KKB yang dinaikkan kebijakan 100%. "Kami sambut baik saja kebijakan relaksasinya, karena memberikan keleluasaan lebih bagi bank dan pemberi kredit. Namun penerapan akan menyesuaikan dengan hasil analisa kredit masing-masing nasabah, tidak serentak sama," jelas Lani. Dia menilai, berdasarkan data, uang muka (*down payment/DP*) berkorelasi dengan kinerja kredit nasabah. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan perseroan dalam menerapkan kebijakan DP 0%, guna menjaga kualitas kredit tetap baik. (nid)

## Penurunan Bunga Kredit Tak Cukup Gairahkan Ekonomi

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, risiko ketidakpastian ekonomi yang tinggi selama masa Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan.

Secara umum, suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan telah turun secara bertahap per masing-masing segmen (korporasi, ritel, KPR). SBDK korporasi Januari 2021 sebesar 9,08% atau turun dari 10,30% pada Januari 2019. SBDK ritel Januari 2021 sebesar 9,94% turun dari 11,05% pada Januari 2019. SBDK KPR Januari 2021 sebesar 9,80%, turun dari posisi 10,91% pada Januari 2019. "Jadi, walaupun bunga acuan BI (BI 7DRRR) diturunkan 125 bps sepanjang 2020, namun bunga kredit hanya turun 83 bps," ujar ekonom Indef Eko Listiyanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Selain itu, dia berpendapat, relatif tingginya biaya dana dan operasional di bank BUMN juga menjadi salah satu penyebab lainnya bank enggan buru-buru merespons kebijakan suku bunga BI yang saat ini rendah sepanjang sejarah di 3,50%. "Dari sisi efisiensi

rata-rata bank di Indonesia BOPO-nya 86,58% (Desember 2020), menggambarakan besarnya biaya operasional bank di tengah sempitnya ruang pendapatan operasional saat pandemi. Kondisi ini memang membuat bank tidak cepat merespons (rigid/kaku) penurunan suku bunga acuan BI," tutur dia.

Sementara terkait aktivitas ekonomi, Eko membeberkan, meskipun bank telah menurunkan bunga kreditnya, hal ini tidak akan menggairahkan kinerja sektor riil lantaran kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

"Karena sektor swasta tetap akan berhati-hati dalam ekspansi (apalagi kalau sumbernya utang perbankan, akan lebih hati-hati lagi karena ada kewajiban cicilan). Di saat seperti ini kebijakan fiskal perlu 'jalan duluan', mengatasi pandemi dan mendorong daya beli, baru kemudian sektor perbankan akan mengikuti seiring optimisme yang mulai pulih. (stimulus kebijakan fiskal) salah satunya stimulus penanganan krisis kesehatan," jelas dia.

Senada dengan Eko, *Chief Economist* BRI Anton Hendranata menuturkan, penurunan suku bunga kredit tidak akan cukup mendorong

kredit pertumbuhan untuk menopang pemulihan ekonomi. Jika kita mau mengakselerasi pertumbuhan kredit, lanjut Anton, syarat kecukupan dan tambahannya adalah dorong kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan daya beli secara signifikan.

"Oleh karena itu, mendorong kembali permintaan masyarakat dan daya belinya, serta pengendalian pandemi Covid-19 adalah kunci utama mendorong pertumbuhan kredit," ucap Anton.

Makanya, stimulus ekonomi melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih sangat dibutuhkan. Bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan program padat karya adalah jalan terbaik, cepat, dan relatif mudah implementasinya di lapangan. "Hal ini cukup efektif mendorong kembali belanja masyarakat level bawah karena kecenderungan mengonsumsi (*marginal propensity to consume/MPO*)-nya tinggi. Masyarakat level bawah dan rentan miskin jika mendapatkan uang akan langsung dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya," imbuh Anton. (ris)



### Naik Aset Perbankan

Nasabah menarik uang di mesin ATM di Jakarta. Aset perbankan secara keseluruhan mampu naik 7,18 persen secara tahunan pada 2020, dan bahkan lebih kuat dibandingkan dengan 2019.

Beritasatu Photo/Uthan AR





## RAHMAD PRIBADI DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KALTIM

# Bisnis Harus Membawa Berkah bagi Masyarakat

dapatkan jalan keluar, yakni akan membangun industri di Bintuni, terdiri atas industri amoniak, industri urea, sekaligus industri metanol.

Strategi ketiga adalah membangun bisnis baru, yang bagus, yang mudah berkelanjutan dan bisa mengimbangi gambaran risiko dari Pupuk Kaltim secara keseluruhan. Saya beranggapan ada dua *nih*, satu mengembangkan industri berbasis sumber-sumber yang *renewable*.

Itu penting. Karena kami adalah orang yang ahli di kimia, pilihannya adalah oleo kimia berbasis kelapa sawit. Sebab, Indonesia mengeksport minyak sawit mentah (CPO), sedangkan kita mengimpor sebagian produk hilirnya.

Bisnis baru kedua adalah melakukan hilirisasi amoniak atau urea. Kami sudah pikirkan akan membangun industri soda *ash*, yaitu produk turunan amoniak. Saat ini Indonesia mengimpor 100%. Fungsinya untuk membikin kaca. Soda *ash* itu bahan bakunya kita punya, yaitu amoniak dan garam.

Strategi pertumbuhan keempat adalah merger dan akuisisi. Bagi kami, ini sesuatu yang baru dan belum pada suatu titik keputusan untuk melakukan merger dan akuisisi. Tapi bayangan saya, perusahaan di sektor pangan harus punya kelengkapan *services*. Ini sedang kami evaluasi satu per satu, kira-kira di mana kami bisa mengambil peran penting dalam rantai pasok atau rantai nilai. Masih di agrikultur, apakah di hulu, tengah, atau hilirnya.

Kami sedang menyusun program yang berkelanjutan. Tahun kemarin kami ulang tahun ke-43. Dalam 10 tahun, kami harapkan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) sudah *double*. Itu penting karena Pupuk Kaltim adalah industri strategis. Tak mungkin kita membangun ketahanan pangan tanpa memperhatikan ketahanan inputnya, seperti benih, pupuk, dan pestisida. Kalau ketahanan pangan hanya menanam maka kita hanya jadi tukang jahit. Semuanya impor, benih impor dan pupuk impor. Itu ketahanan pangan yang sedikit semu. Untuk itu, kami harus memastikan Pupuk Kaltim berkembang secara berkelanjutan.

**Cara Anda menyelesaikan**

### persoalan di perusahaan?

Saya senang mengambil inisiatif dan gebrakan-gebrakan untuk dapat memecahkan masalah dan menorehkan pencapaian baru perusahaan. Kami mengeluarkan strategi-strategi dengan fokus bagaimana perusahaan ini dapat *sustain* dan bertumbuh.

Saya sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan semua karyawan. Saya memberikan kesempatan sebarang-lebarannya, terutama bagi mereka yang masih muda, untuk berkarya dan mengembangkan diri, sehingga nanti bisa menjadi generasi-generasi muda pemimpin di masa depan.

### Apa filosofi atau nilai-nilai hidup yang Anda pegang?

Yang melatarbelakangi dan memotivasi saya dalam berkarier adalah bagaimana saya dapat memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat atau orang-orang sekitar. Dalam hidup, kita harus mengimbangi karier dan pekerjaan dengan kehidupan sosial.

Saya selalu menganggap kepedulian sosial itu sangat penting. Dalam konteks kecilnya adalah keluarga. Kita harus dapat mengetahui apa yang menjadi prioritas dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Sebagai contoh, mungkin jika saat itu saya tidak ditawari pekerjaan di Petrokimia Gresik, maka saya tidak akan ambil, karena pada masa itu keinginan saya adalah berada lebih dekat dan dapat lebih meluangkan waktu untuk mengurus kedua orang tua saya, serta pada saat bersamaan dapat berkontribusi cukup besar terhadap sektor pangan, sektor yang secara pribadi menjadi perhatian saya setelah belajar *Master of Public Administration* di Harvard.

Memberikan dampak sosial dalam konteks besar adalah bagaimana kita bisa selalu membawa manfaat dan berkah, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat lingkungan sekitar, bahkan dalam hal mengelola perusahaan.

Bagi saya, dalam memimpin perusahaan, fokus tidak hanya pada mengejar profit, tetapi perusahaan minimal harus mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan kepada masyarakat sekitar, baik dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dalam menentukan langkah perusahaan, saya selalu mengutamakan keberlanjutan (*sustainability*). Kami tidak selalu melakukan hal atau kebijakan yang hanya memberikan *short-term impact* secara finansial terhadap perusahaan. Jika kita memikirkan dampak yang juga akan terasa secara *long-term*, maka hasilnya pun akan lebih baik untuk seluruh *stakeholder* yang terlibat, termasuk bagi perusahaan itu sendiri.

### Obsesi Anda yang belum terwujud?

Secara pribadi, obsesi saya adalah ingin mengantarkan anak-anak untuk bisa mandiri. Selain itu, saya juga ingin menjadi lebih aktif di bidang sosial. Ada satu impian terdalam saya, yakni memiliki pesantren dan mampu menghafal Alquran.

Harapan saya adalah bisa mendedikasikan waktu untuk kehidupan sosial. Secara perusahaan, obsesi yang selalu ingin saya capai di bawah kepemimpinan saya adalah melahirkan generasi pemimpin-pemimpin baru yang bisa lebih sukses dari saya.

Saya sendiri sudah melihat *talent pool* dan ekosistem di Pupuk Kaltim ini sangat mendukung. Saya berharap ke depan, generasi-generasi pemimpin baru akan tumbuh dari perusahaan yang saya pimpin ini.

Ketika saya masuk ke perusahaan, SDM menjadi bagian penting yang selalu saya pikirkan. Beberapa teman sudah merasakan, yang biasa kerja A saya putar-putar begitu supaya orang punya *skill*.

Menjadi *leader* itu harus mempunyai *skill* yang cukup. Tidak bisa di situ terus. Saya bisa menjadi seperti sekarang karena saya sudah memasuki berbagai macam industri, sehingga memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik.

### Peran keluarga dalam karier Anda?

Istri adalah teman diskusi. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, juga banyak hal lainnya. Dukungan secara pemikiran dan emosional sangat penting. Misalnya ketika mencintai pekerjaan, kita kadang terlibat secara emosional. Dalam situasi seperti itu, dukungan secara emosional dari lingkungan dan keluarga berperan sangat besar bagi saya. □

Seorang *chief executive officer* (CEO) tak semata dituntut mengejar laba (profit) atau pendapatan (*revenue*) perusahaan. Ada satu prinsip atau nilai-nilai yang juga harus dikejar seorang CEO, yakni mampu memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, baik dampak sosial, ekonomi, maupun dampak lingkungan.

Nilai-nilai itulah yang sedang terus diperjuangkan Rahmad Pribadi bersama perusahaan yang dinakhodainya, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim).

"Dalam hidup, kita harus mengimbangi karier dan pekerjaan dengan kehidupan sosial," kata eksekutif kelahiran Yogyakarta, 13 April 1970, itu kepada wartawan *Investor Daily*, Kunradus Aliandu di Jakarta, baru-baru ini.

Rupanya, nilai-nilai itu pula yang senantiasa memotivasi Rahmad Pribadi dalam meniti karier di berbagai bidang, termasuk setelah ia memimpin anak BUMN tersebut. "Saya termotivasi, bagaimana agar saya dapat memberikan dampak sosial bagi orang-orang sekitar, membawa berkah dan manfaat," ujar dia.

Apa saja langkah yang disiapkan Rahmad Pribadi agar anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) itu mendatangkan berkah dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara? Mengapa ia menganggap kepedulian sosial sangat penting? Berikut petikan lengkapnya:

### Bisa cerita perjalanan karier Anda?

Saya pertama kali bekerja di Caltex Pacific Indonesia yang sekarang menjadi Chevron Indonesia. Awalnya saya masih menjadi mahasiswa fakultas ekonomi UGM, tapi saya coba mengikuti pendaftaran beasiswa yang diselenggarakan oleh konsorsium perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, dan ternyata diterima.

Saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di University of Texas, Austin, AS. Selesai dari sana, saya pulang ke Indonesia. Saya kemudian diundang beberapa perusahaan untuk *interview*, karena yang kasih beasiswa itu konsorsium. Saya akhirnya memilih Caltex Pacific Indonesia karena Caltex di Riau adalah produsen minyak terbesar. Saya menjadi *internal auditor*

sampai 1997. Saya memutuskan untuk keluar dari ikatan dinas di Caltex dan pindah ke PT Bakrie and Brothers Tbk sebagai *internal audit manager*. Tak lama berselang terjadi krisis moneter (krismon), hancur-hancuran waktu itu. Saya *diketawain* oleh teman-teman. Mereka bilang, coba kamu bertahan di Caltex.

Tapi saya meyakini keputusan yang saya ambil itu atas saran dan dukungan dari ibu saya. Jadi, saya percaya *nggak* mungkin keliru. Saya disarankan (ibu) bekerja saja di Jakarta supaya punya kebebasan untuk selalu mencari tantangan baru.

Saat itu banyak orang yang meninggalkan Bakrie, sementara saya diajak ikut bersama tim untuk membantu restrukturisasinya. Pada 1999, saya menjadi *Chief Operating Officer* (COO) PT Bakrie and Brothers Tbk. Setelah itu diminta menjadi Dirut di anak usaha unit *trading*, PT Bakrie Niagatama.

Pada 2006, saya memutuskan keluar dari Bakrie. Bersama beberapa teman eks perusahaan minyak, kami membuat perusahaan minyak, namanya Pasir Petroleum Limited yang kemudian ikut tender mengoperasikan blok minyak

### BIODATA

Nama: Rahmad Pribadi, BBA, MBA  
Tempat/tanggal lahir:  
Yogyakarta, 13 April 1970

### PENDIDIKAN:

- Universitas Gadjah Mada (2 tahun) (1993-1997).
- S1 Akuntansi, The University of Texas, Austin, AS (1992).
- S2, Master, Public Administration Harvard University, AS (2013).

### KARIER:

- Auditor PT Caltex Pacific Indonesia (1993-1997).
- Internal Audit Manager PT Bakrie and Brothers Tbk (1997-1998).
- Chief Operating Officer PT Bakrie and Brothers Tbk (1998-2000).
- CEO PT Bakrie Niagatama (2000-2009).
- Direktur Pasir Petroleum Resources Limited (2009-2016).
- Direktur SDM PT Petrokimia Gresik (2016).
- Direktur Utama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017-2018).
- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2018-2010).
- Direktur Utama PT Pupuk Kaltim (26 Agustus 2020 - sekarang).

di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Sekitar tahun 2012, saya kuliah di Harvard dengan fokus tetap di *oil*, sektor energi. Pada 2013, saya kembali, saat itu masih menjalankan usaha dengan teman-teman. Lalu pada 2016, saya diajak bergabung dengan perusahaan BUMN, PT Petrokimia Gresik sebagai Direktur SDM.

Saya bekerja di Petrokimia Gresik sampai 2017. Setelah itu, saya diminta memimpin BUMN yang lain, Semen Baturaja, sekitar setahun. Pada 2018, saya diajak kembali ke Petrokimia Gresik, tapi kali ini ditunjuk sebagai Direktur Utama. Pada 2020, saya menjadi Direktur Utama di PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sampai sekarang.

### Kiat Anda mengelola perusahaan?

Sejak masuk di Pupuk Kaltim, di luar perbaikan operasional, yang saya lakukan adalah mengondisikan Pupuk Kaltim bisa menghadapi perubahan lingkungan bisnis secara strategis. Pupuk Kaltim adalah sebuah industri strategis, kegiatan pengolahannya menggunakan gas. Produknya sangat mendukung bagi ketahanan pangan, sehingga *sustainability* Pupuk Kaltim ini harus dijaga.

Ke depan, saya menggagas program untuk mempertahankan *sustainability* Pupuk Kaltim. Pertama, memastikan adanya sebuah pertumbuhan. Kedua, adanya *sustainability*.

Platform ini kami kembangkan dengan empat strategi utama. Pertama, melakukan rekonfigurasi pabrik. Kalau ada pabrik yang tidak efisien maka kami upayakan kembali efisien. Kalau tidak bisa, kami coba cari cara agar pabrik yang sama bisa menghasilkan produk yang berbeda supaya tetap kompetitif. Kalau itu juga tidak bisa, terpaksa pabrik itu ditutup.

Cara kedua, *extension of capacity*. Itu tidak mungkin dilakukan di Bontang, karena pipa yang mengalirkan gas ke Bontang dari waktu ke waktu turun. Maka strategi kami adalah ekspansi ke daerah-daerah yang menjadi sumber gas baru yang belum diproduksi.

Dari beberapa diskusi, kami



## Menulis adalah Cara yang Efektif untuk Belajar

Menulis merupakan kebiasaan sekaligus hobi Dirut PT Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi. Tak hanya menulis artikel di koran, Rahmad juga menulis buku. "Memang saya punya hobi menulis. Dulu saya sering menulis artikel ke koran, menulis buku, dan bantu teman menulis buku," ujar dia.

Menurut Rahmad, menulis adalah salah satu cara yang efektif untuk belajar sesuatu. "Saya percaya, menulis itu salah satu cara untuk belajar. Ketika menulis, pasti kita belajar," tutur dia. Selain menulis, Rahmad sejatinya punya banyak hobi, dari mulai menerbangkan pesawat (menjadi pilot), renang, golf, hingga menyelam (*diving*). Bahkan, waktu masih duduk di bangku SD, Rahmad menggemari silat.

"Hobi saya banyak dan berevolusi. Waktu kecil, saya ingin menjadi pilot. Tapi eyang saya melarangnya. Setelah saya bekerja, mulai tahun 2000-an, saya mengambil *pilot license*. Kemudian pada tahun 2000-an banyak kecelakaan, akhirnya hobi saya pindah ke pesawat *aeromodelling*, pesawat model yang kecil-kecil itu," papar dia.

Kini, menyelam adalah satu-satunya hobi yang masih dilakoni Rahmad Pribadi. Namun, akibat pandemi Covid-19, Rahmad terpaksa untuk sementara menunda hobinya itu. Padahal, ia sudah lama ingin menyelam di perairan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Sumba (NTT). "Mudah-mudahan Covid segera selesai," kata Rahmad. (ks)